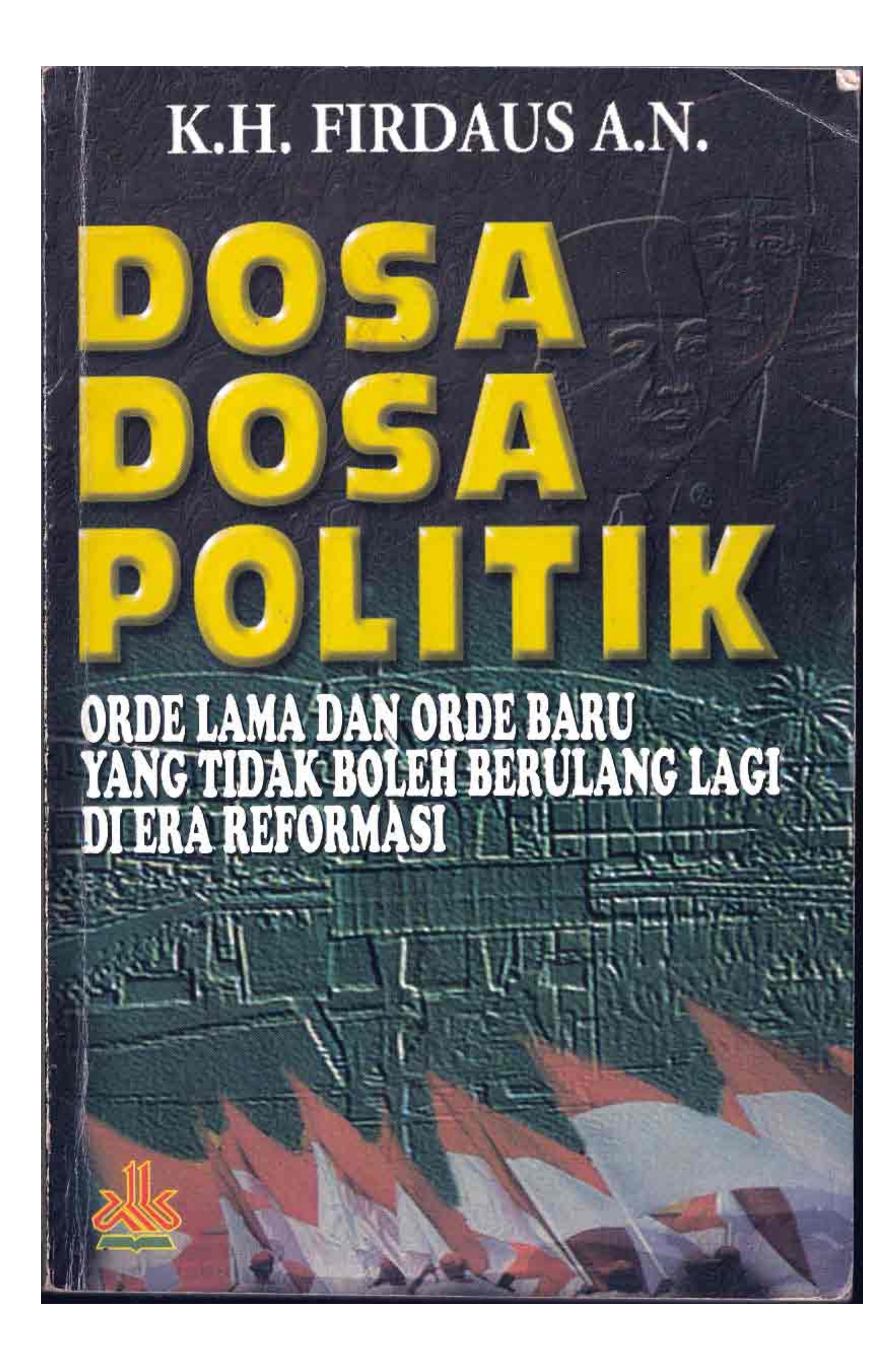

K.H. FIRDAUS A.N.
DOSA DOSA POLITIK
ORDE LAMA DAN ORDE BARU
YANG TIDAK BOLEH BERULANG LAGI
DI ERA REFORMASI



DOSA-DOSA POLITIK
Orde Lama dan Orde Baru yang Tidak Boleh Berulang Lagi di Era Reformasi



K.H. Firdaus A.N.

DOSA-DOSA POLITIK

Orde Lama dan Orde Baru yang Tidak Boleh Berulang Lagi di Era Reformasi



PUSTAKA AL-KAUTSAR

Penerbit Buku Islam Utama

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
A.N., K.H. Firdaus
Dosa-dosa Politik Orde Lama dan Orde Baru Yang Tidak Boleh Berulang Lagi di Era Reformasi/K.H. Firdaus A.N.
Jakarta: Al-Kautsar, 1999. ---cet. 1---
192 hal.; 21 cm.

ISBN 979-592-115-0

1. sejarah Indonesia 2. Dosa-dosa Politik...
I. Judul II. K.H. Firdaus A.N.

297.68

Judul:
DOSA-DOSA POLITIK
Orde Lama dan Orde Baru
Yang Tidak Boleh Berulang Lagi di Era Reformasi

Penulis:
K.H. Firdaus A.N.
Design Cover:
Dea Advertising
Cetakan: I dan II pada Penerbit Pedoman Ilmu Jaya
Edisi Baru:
Cetakan Pertama, April 1999
Cetakan Kedua:
Juni 1999
Penerbit:
Pustaka Al-Kautsar
Jl. Kebon Nanas Utara II/12
Jakarta Timur 13340
Telp. (021) 8199992, Fax. 8517706

PERSEMBAHAN

Kepada Para Pemimpin dan Mujahid Islam,
dan seterusnya kepada Generasi Penerus
dan Pelurus.



K.H. FIRDAUS A.N.

PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah, atas anjuran dan saran beberapa kawan akhirnya beberapa buah artikel saya yang telah tersiar dalam berbagai media massa dapat juga dihimpunkan dan kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku agar mudah mengulang membacanya kembali.

Dalam buku ini yang Penulis beri nama dengan "Dosa-dosa Politik Orde Lama dan Orde Baru Yang Tak Boleh Berulang Lagi di Era Reformasi" terdapat tiga belas karangan yang memuat kekeliruan politik, baik yang dilakukan para politisi maupun ulama yang telah membuat umat Islam tidak berperan dalam percaturan politik maupun dalam lembaga-lembaga negara. Ini tidak sesuai dengan harapan umat yang jumlahnya hampir 90% dari jumlah penduduk Indonesia.

Orang-orang di luar negeri sering merasa heran, mengapa kaum Muslimin Indonesia yang sering dibangga-banggakan sebagai umat Islam terbesar di dunia, tetapi tidak berpengaruh dalam pembuatan keputusan-keputusan negara yang penting-penting? Mengapa umat Islam sering muncul sebagai pihak yang kalah setiap pemilihan umum diadakan?

Mestinya umat Islam di Indonesia sesuai dengan jumlahnya yang banyak dan sesuai pula dengan hukum demokrasi, harus tampil sebagai golongan yang memimpin, bukan yang dipimpin, menentukan, bukan umat yang didekte orang lain.

Yang jelas, kesalahan terletak di pundak para pemimpin Islam sendiri baik yang pernah duduk dalam badan eksekutif

maupun yang duduk puluhan tahun dalam lembaga-lembaga legislatif seperti DPR/MPR.

Mereka seolah-olah lupa kepada Islam setelah berada di atas kursi yang empuk-empuk itu. Bahkan keberanian seolah-olah hilang sirna untuk menyampaikan kebenaran dan aspirasi umat Islam, seakan-akan mereka hanya duduk menurutkan kemauan arus belaka. Kalau hanya untuk menjadi manusia 5D (Datang, Duduk, Dengar, Diam dan Duit) seperti yang disinyalir oleh Ketua DPR/MPR waktu itu, Kharis Suhud sendiri, rasanya mereka tidak perlu duduk sebagai wakil rakyat. Dengan begitu mereka bukan Pejuang, tetapi "Penguang", alias pemburu materi dan kursi belaka. Itu akan mengundang dosa belaka, karena mereka senantiasa dicela dan dikritik rakyat setiap waktu. Mereka mungkin hanya akan merupakan beban rakyat dengan gaji yang besar.

Mudah-mudahan setelah Pemilu yang sebentar lagi diadakan di era reformasi ini rakyat Indonesia akan beroleh wakilnya yang bersuara vokal dan bermutu sebagai wakil-wakil pilihan rakyat yang sejati! Amien!

Tiga belas artikel yang kita turunkan kembali di sini berisi uraian-uraian yang diharapkan berguna bagi generasi Penerus agar mereka mendapat pelajaran dan pengajaran di mana letak kekeliruan tokoh-tokoh pendahulu kita untuk tidak diulangi lagi di masa-masa yang akan datang.

Masa depan bagi generasi Penerus dan Pelurus merupakan titik balik bagi kebangkitan Islam di Indonesia ini. Dan terutama kepada merekalah kita persembahkan tulisan-tulisan ini agar bisa menjadi sumbangan pikiran bagi mereka dalam meniti perjuangan di masa depan, demi kebahagiaan Islam dan Kaum Muslimin Indonesia.

Sebelumnya buku ini pernah kami terbitkan dengan judul "Dosa-dosa Yang Tidak Boleh Berulang Lagi" oleh penerbit Pedoman Ilmu Jaya. Sebagai edisi yang disempurnakan ini kami menganggap perlu mengangkat persoalan ini sekaligus kami

tambahkan bahan-bahan baru yang kami kemukakan setelah berakhirnya era Orde Baru, sebagai bahan renungan kita bersama agar kesalahan ini tidak berulang lagi.

Terhadap pihak-pihak yang mungkin ada yang merasa tersinggung dan tersenggol dalam tulisan ini, terlebih dahulu saya minta maaf sebanyak-banyaknya, demi Islam dan generasi yang akan datang, dalam rangka amar makruf dan nahi munkar!

"Aku hanya ingin mengadakan perbaikan sekuat kemampuan yang ada padaku. Taufikku hanya pada Allah. Kepada-Nya aku tawakkal dan kepada-Nya aku bertaubat!" (Hud: 88). Semoga Negara kita selamat sejahtera dari segala marabahaya dan malapetaka!

Insya Allah bila buku ini sampai ke tangan para pembaca yang budiman, usia Pengarang Anda genap 75 tahun (20 Agustus 1924 - 20 Agustus 1999). Semoga Allah memberikan karunia-Nya berupa kesehatan yang cukup, kesalehan, dan ketakwaan yang tinggi serta istiqamah dalam pendirian! Amien!

Dan akhirnya kepada Penerbit yang lama "Pedoman Ilmu Jaya" dan Penerbit yang baru "Pustaka Al-Kautsar" yang telah berusaha menerbitkan buku ini, dan kepada semua pihak yang membantu dan mendorong, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga upaya dan jerih payah ini dapat bermanfaat dan mencapai sasaran yang diharapkan demi ibadah karena Allah! Amien!

Billahi Fi Sabilil Haq!

Jakarta, 28 Maret 1999
Penulis,

K.H. Firdaus A.N.

PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Alhamdulillah, buku kita *Dosa-Dosa Politik* cetakan pertama, dalam masa yang singkat, kurang dari dua bulan telah habis terjual. Suatu prestasi yang cukup menggembirakan. Suatu bukti bahwa isinya dapat menimbulkan minat dan gairah selera pembaca yang budiman.

Dalam Cetakan Kedua yang akan menyusul, segala kekhilafan dan salah cetak yang terdapat dalam Cetakan Pertama telah kami perbaiki.

Patut kami beritahukan bahwa dalam Cetakan Kedua ini telah kami tambah beberapa baris butir-butir kalimat yang penting untuk diketahui oleh para pembaca, demi untuk kesempurnaan sehingga halaman buku sedikit bertambah.

Kepada pembaca yang arif dan budiman kami senantiasa mengharapkan masukan dan tegur sapa kalau sekiranya dalam buku kita terdapat kesalahan yang tidak disengaja.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi Generasi Penerus dan Pelurus yang akan mewarisi kepemimpinan di masa depan!

Akhirnya kepada Allah jua kita mengharap ridha, berkah, taufik, dan hidayah-Nya! Semoga kita sukses selalu di bawah perlindungan-Nya dan terhindar dari segala malapetaka dan

marabahaya! Amien! Dan terima kasih atas sambutan para pembaca yang budiman! Kemudian selamat membaca!

Billahi Fi Sabielil Haq!

Jakarta, 19 Mei 1999
Penulis,

K.H. Firdaus A.N.

DAFTAR ISI

MUKADDIMAH: DOSA-DOSA POLITIK



Dosa-dosa politik mungkin lebih berat daripada dosa-dosa yang bersifat keagamaan. Dosa terhadap Allah karena melanggar aturan agama bisa segera minta ampun dan taubat kepada Allah. Tetapi dosa-dosa yang bersifat politis harus meminta ampun ke seluruh rakyat yang kena getahnya, tidak bisa dengan hanya bertaubat kepada Allah saja. Karena dampaknya jauh lebih berat dan menimpa hampir seluruh lapisan masyarakat yang turut menanggung risiko politik itu. Demikianlah kegagalan dari pemberontakan atau sesuatu kudeta akan menimbulkan risiko yang bukan saja ditanggung oleh pihak yang bersangkutan, tetapi pahit dan deritanya juga dirasakan oleh masyarakat umum. Bahkan nyawa kaum pemberontak itu ada yang berakhir dalam terali penjara atau tewas ditembus peluru atau berakhir di tiang gantungan. Tetapi semua orang yang melakukan dosa politik biasanya suatu waktu akan menebus dosanya itu. Dari itu berhati-hatilah bermain api dalam arena politik! Soekarno dan Sutan Sjahrir sendiri mati dalam status tahanan politik. Sedang Imam Kartosuwiryo dan D.N. Aidit mati ditembus peluru.

Dulu di zaman kolonial hampir semua partai politik mengarahkan ujung tombaknya ke jantung pemerintah jajahan itu untuk menumbangkan pohon kolonialisme yang berakar

lebih tiga ratus tahun lamanya. Tetapi disamping itu, ada golongan yang menohok kawan seiring dan menggunting dalam lipatan dengan cara memuja-muja pemerintah kafir itu. Silakan simak laporan pemerintah kolonial Belanda yang berbunyi seperti ini yang dimuat oleh sebuah Majalah terkemuka ibu kota:

"Arsip kolonial dengan kode 261/X/28. Isi arsip melaporkan kongres NU di Surabaya 13 Oktober 1927 yang penuh dengan pidato-pidato yang menjunjung pemerintah Belanda sebagai pemerintah yang *adil, cocok* dengan *Islam,* dan patut *dijunjung* sepuluh jari. Sementara itu tokoh Islam yang menantang Belanda, menurut laporan itu, dicaci-maki dan pantas dibuang ke Digul." (*Tempo*, 26 Desember hal. 23, Jakarta, 1987). (Baca selanjutnya artikel: Takluknya Sebuah Benteng). Dan ternyata kemudian, hambatan terhadap cita-cita Islam datang dari golongan-golongan yang berwatak seperti itu.

Ini termasuk salah satu dosa politik di zaman kolonial. Dan dosa kultus terhadap penguasa oleh beberapa golongan tertentu tampaknya berlanjut sampai kini. Dalam hal ini termasuk kultus yang dilakukan oleh *kelompok 21* yang dipimpin oleh beberapa orang tokoh politik dan Ulama yang cukup terkenal. Juga termasuk kultus Sekjen PPP yang dikecam Menteri Rudini karena mencalonkan Soeharto jadi Presiden terlalu pagi.

Piagam Jakarta

Piagam Jakarta atau sering disebut dengan "*Jakarta Charter*" yang dikatakan orang sebagai "perjanjian moril yang sangat luhur" yang ditandatangani di Jakarta pada tgl. 22 Juni 1945 oleh 9 orang tokoh terkemuka Indonesia dari berbagai golongan, hanya keutuhannya bertahan 56 hari saja. Pada tgl. 18 Agustus 1945 tujuh kata yang amat penting dalam Piagam yang mulia itu telah dicoret orang. Ini juga dosa politik karena melanggar janji yang baru saja diikrarkan. (Baca: 22 Juni yang "Keramat").

Yang mencoret *Piagam Jakarta* itu tidak lain dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang anggotanya

terdiri dari 27 orang. Semula anggotanya hanya 21 orang, kemudian ditambah 6 orang yang mau mencoret Piagam Jakarta, tegasnya tujuh kata yang amat penting itu.[1] Dan mereka bersidang hanya sekali saja. PPKI dibentuk Jepang pada tgl. 14-15 Agustus 1945 di Jakarta setelah Jepang kalah perang.

Di antara 27 orang anggota itu hanya 3 orang yang dapat dianggap eksponen perjuangan Islam atau yang berideologi Islam. Mereka itu adalah Ki Bagus Hadikusumo orang Muhammadiyah yang moderat. Mr. Kasman menurut Prawoto Mangkusasmito, anggota tambahan yang baru mendapat undangan untuk pagi itu, belum mengetahui sama sekali persoalannya. Sedang Wahid Hasyim tidak hadir pada rapat yang membawa tragedi itu. (Baca: Prawoto Mangkusasmito, Alam Fikiran, hal. 320).

Ketika Bustamam, SH. bertanya kepada Sayuti Melik yang mengetik teks Proklamasi Kemerdekaan: mengapa Ki Bagus Hadikusumo mau mencoret tujuh kata yang amat penting itu (dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya)? Dijawab antara lain: "Saya tahu Ki Bagus, dia guru saya. Beliau mau mencoret karena beliau sebenarnya tidak setuju Piagam Jakarta!" Apa benar demikian? Wallahu a'lam!

Tanpa mereka sadari, pencoretan itu akan membawa malapetaka Nasional. Kepercayaan daerah-daerah mulai goncang, kepercayaan mereka mulai luntur terhadap *kredibilitas* para pemimpin di Pusat. Apakah mereka bisa dipercaya setia memegang janjinya? Mengapa baru satu hari umur Republik Indonesia, janji sudah dilanggar? Padahal untuk menghasilkan Piagam yang amat bersejarah itu memerlukan tenaga dan rapat yang berkali-kali, bahkan Soekarno konon merayu-rayu dengan airmata yang berlinang supaya Piagam itu ditandatangani untuk diketa-

---

[1] 6 orang anggota tambahan itu ialah: Wiranatakusumah, Ki Hadjar Dewantara, Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Kusuma Sumantri dan Subardjo. (Baca: B.J. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia, hal. 37, Grafiti Press, Jakarta, 1985).

hui rakyat Indonesia dan dunia Internasional. Tetapi setelah dicoretnya tujuh kata yang penting itu, makin jelaslah bagi kaum Muslimin bahwa *Deislamisasi* telah diawali. Dan Bung Karno termasuk orang yang mencoret Piagam yang ditandatanganinya sendiri.

Daerah-daerah Bergolak

Karena tidak percaya kepada pemimpin-pemimpin Republik yang sudah mengkhianati janjinya, maka pada tgl. 7 Agustus 1949, meletuslah Proklamasi Darul Islam Jawa Barat di bawah pimpinan Imam Kartosuwiryo. Tiga tahun kemudian, pada tahun 1952 memberontak pula Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan mengikuti Kartosuwiryo. Dan pada tgl. 21 September 1953 memberontak pula *Tengku Daud Beureueh*, Ulama besar Aceh bersama murid-murid dan para pengikutnya. Pemberontakan-pemberontakan ini cukup lama bertahun-tahun dengan segala susah payah dan dengan menelan banyak korban dan kerugian yang besar di kedua belah pihak, baru bisa dipadamkan.

Begitu sikap rakyat bila sudah tidak percaya kepada para pemimpinnya, mereka memilih jalannya sendiri-sendiri sesuai dengan panggilan hati nuraninya; entah benar atau salah jalan yang ditempuhnya itu, mereka tidak peduli. Pokoknya mereka merasa tertipu oleh kaum *Deislamisasi*.

Pemberontakan PRRI

Di ibu kota RI udara politik semakin hari terasa bertambah panas juga. Kelihatannya kaum komunis diberi hati untuk meningkatkan aktivitasnya untuk mengincar kekuasaan politik. Tetapi mereka belum sempat berkuasa. Beberapa tokoh politik merasa cemas kalau-kalau mereka akan diganyang PKI dan mereka pergi ke daerah bergolak, Sumatera Barat. Di sana mereka bergabung dengan perwira-perwira TNI yang tidak puas terhadap kebijaksanaan pemerintah pusat. Perwira-perwira itu baru saja mengambil-alih kekuasaan pemerintah dari tangan Gubernur Ruslan Mulyoharjo.

Karena merasa dapat tenaga yang kuat dari tokoh-tokoh politik yang datang dari pusat (Jakarta), maka Ketua Dewan Banteng melayangkan ultimatum kepada Perdana Menteri Djuanda pada tanggal 10 Februari 1958 dan 5 hari kemudian muncullah Proklamasi yang disusul dengan pelantikan menteri-menteri PRRI oleh Ketua Dewan Banteng, Letkol. Ahmad Husein. Kabinet PRRI diketuai oleh Perdana Menteri Syafruddin Prawiranegara dan diumumkan tgl. 15 Februari 1958 di kota Padang.

Inilah pemberontakan yang membawa tokoh-tokoh dan nama-nama besar. Tetapi itu saja belum bisa jadi jaminan akan berhasilnya pemberontakan mencapai sasarannya. Ada beberapa faktor yang harus dimiliki bagi suatu revolusi untuk mencapai sasarannya. Antara lain: Persiapan yang matang. Ideologi yang mantap dan tahan uji, kader-kader yang siap tempur, mental yang kuat membaja dan kekompakan dalam barisan pimpinan serta senjata yang cukup. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah logistik yang terjamin.

Tampaknya syarat-syarat itu banyak yang belum bisa terpenuhi, dan karena itu PRRI lemah dan goyah. Demikianlah setahun kemudian telah terjadi perubahan dan pergeseran pimpinan. Pimpinan bergeser dari Syafruddin Prawiranegara ke tangan Mr. Assaat sebagai Presiden dan Moh. Natsir sebagai Wakil Presiden. Sedang Syafruddin, PM merangkap Menteri Keuangan. Perubahan pimpinan itu dilakukan di Lintau Buo pada tanggal 15 Februari 1959 setahun setelah Proklamasi PRRI.

Pukulan-pukulan yang dilancarkan APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia) di babak pertama dari serangan yang datang dari Pusat ternyata tak tertahankan oleh PRRI. Pekanbaru jatuh hanya dalam sehari tanpa perlawanan. Konon yang paling dulu lari adalah komandannya sendiri. Serangan ke jantung PRRI kota Padang praktis tak ada perlawanan yang berarti, sehingga Jenderal A. Yani yang memimpin sendiri operasi 17 Agustus merasa terheran-heran karena dengan mudahnya

menundukkan basis PRRI itu. Dan anak buahnya jalan lenggang-lenggang kangkung saja di ibu kota PRRI itu.

Setelah Padang jatuh pada tgl. 17 April 1958, berturut-turut kota-kota lainnya terbuka dengan mudah. Kayutanam jatuh pada 27 April. Padang Panjang diduduki 1 Mei dan 4 Mei Bukittinggi yang termasuk basis PRRI bertekuk lutut tanpa perlawanan sedikit pun juga. Jelaslah APRI bukan tandingan bagi PRRI.

RPI Terbentuk

Dalam pada itu perkembangan di pusat bergerak dengan cepat. Konstituante gagal mencapai hasil yang diharapkan, karena kedua belah pihak yang bertentangan tidak ada yang mau mengalah. Akibatnya Presiden Soekarno menempuh jalan pintas dengan membubarkan Konstituante pilihan rakyat itu dan kemudian mengumumkan Dekrit kembali pada UUD 45 dengan Piagam Jakarta sebagai kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dekrit itu diumumkan Presiden 5 Juli 1959.

Dekrit inilah yang menggoncangkan kaum PRRI karena dengan pulihnya Piagam Jakarta kembali, berarti Syariat Islam akan hidup kembali dalam masyarakat dan Negara. Tetapi politisi-politisi yang keras hati tidak memperhatikan faktor psikologis itu, sehingga mereka malah meningkatkan perjuangannya dengan membentuk apa yang mereka sebut dengan *Republik Persatuan Indonesia* (RPI) pada tgl. 8 Februari 1960, setahun setelah terjadinya pergeseran-pergeseran dalam tubuh PRRI.

Kini Syafruddin Prawiranegara tampil sebagai Presiden dan merangkap Perdana Menteri. Mr. Assaat sebagai Ketua Mahkamah Agung dan Moh. Natsir sebagai Menteri Agama, PK merangkap Juru Bicara pemerintah. (Baca: Dr. A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas, jilid 4, hal. 340, Gunung Agung Jakarta).

Peningkatan PRRI menjadi RPI ternyata kelak mempercepat proses kehancuran PRRI, karena telah mengakibatkan timbulnya perpecahan di kalangan mereka sendiri. Disamping itu serangan-serangan dari pusat bertambah hebat juga baik dari

darat, laut maupun dari udara. Sehingga dengan terbentuknya RPI dapatlah diperkirakan bahwa pemberontakan sudah dapat diduga akan hanya menunggu waktu berakhirnya. Ketua Dewan Banteng, Ahmad Husein dan Menteri Luar Negeri PRRI, Simbolon, tidak setuju atas lahirnya RPI dan mereka lebih suka menyerah kepada pemerintah pusat. Dan dengan menyerahnya Ketua Dewan Banteng yang melantik PRRI, maka tamatlah riwayatnya PRRI pada tgl. 29 Mei 1961. Ahmad Husein dan anak buahnya menyerah di kota Solok pada tanggal tersebut di atas. Dan tak lama kemudian RPI pun bubarlah.

Para peninjau politik berpendapat bahwa dengan lahirnya RPI sebenarnya mereka mempertinggi tempat jatuh dan menegakkan benang basah. PRRI saja mereka tidak bisa membinanya dengan baik, kini mereka melangkah lebih jauh meliputi beberapa wilayah di luar Sumatera. Di samping itu, dengan RPI dosa politiknya bertambah besar pula, karena itu berarti menegakkan Negara dalam Negara (Staat in Staat). Dan kemudian kaum PRRI/RPI masing-masing menebus dosanya pula akibat politik yang salah hitung, dengan masuknya mereka ke dalam rumah tahanan yang telah disediakan oleh pemerintah pusat. Di mana-mana berlaku adagium: *terpijak di bara hitam kaki dan terpijak di kapur putih kaki.* Ya, memang tangan mencincang bahu memikul! Sedang rakyat senantiasa bertanya-tanya: Quo Vadis PRRI/RPI? Mungkin gerakan ini tidak beroleh ridha Allah, karena itu mudah kalah!

Menjelang mereka dibebaskan dari tahanan di Jalan Keagungan Jakarta Kota, para tokoh-tokoh Masyumi itu dan lain-lainnya disodorkan *Surat Perjanjian* oleh Jaksa untuk ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan. Isinya antara lain berisi kalimat-kalimat seperti ini:

"*Yang bertanda tangan di bawah ini berjanji dengan sepenuh hati bahwa saya akan tetap setia dan taat kepada Pancasila, terhadap semua ketentuan Undang-undang Dasar 1945 dan terhadap semua ketentuan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.*" (S.U. Bajasut, Alam Fikiran dan Jejak

Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, hal. 255, Documenta, Surabaya, 1972).

Prawoto Mangkusasmito, mantan Sekjen dan Ketua Umum Masyumi pada mulanya merasa keberatan menandatangani Surat Perjanjian itu. Mengapa? Karena dia merasa tidak bersalah dan tidak pernah ikut dalam PRRI. Memang hampir semua tokoh-tokoh DPP Masyumi apakah yang terlibat atau tidak terlibat dalam PRRI masuk dalam tahanan Pemerintah Orde Lama, kecuali mereka yang lihai atau pandai bermain mata dan berhubungan dengan pihak Istana, antara lain seperti H. Hasan Basri yang pernah menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan anggota MPR Fraksi Golkar, Dr. Sukiman dan lain-lain. Mereka itu selamat!

Tetapi setelah Prawoto yang sekamar dengan Natsir bermusyawarah berdua, maka akhirnya mereka itu mau juga menandatangani Surat Perjanjian itu. Surat Perjanjian itu sebenarnya bersifat *Blackmail*, baik politis maupun ideologis. Kalau hal yang sifatnya demikian, sebenarnya terserah kepada pribadi masing-masing. Bisa menolak atau menerima tergantung kepada nilai iman pada diri masing-masing. Itu sebenarnya merupakan *test case* bagi kepribadian sang Pemimpin. Karena tak ada dalam Undang-undang bahwa tahanan politik sebelum bebas harus menandatangani surat perjanjian.

Andaikata menolak juga tidak apa-apa, karena kondisi dan situasi politik zaman transisi dari Orde Lama kepada Orde Baru mengharuskan mereka supaya bebas, apalagi anak-anak pelajar dan mahasiswa Angkatan 66 sedang ramainya berdemonstrasi di jalan-jalan mengajukan tuntutannya kepada Pemerintah. Dan salah seorang tokoh demonstran itu datang bertanya kepada Penulis dan saya menganjurkan supaya mereka datang ke Rumah Tahanan di Jalan Keagungan. Alhamdulillah, para tahanan politik itu pun bebaslah.

Sebagai perbandingan marilah kita ambil Bilal bin Rabah, si budak Negro, shahabat Rasulullah. Dia ditahan dan disiksa oleh majikannya di padang pasir di tengah panas matahari yang

amat terik. Dalam pada itu dia diperintahkan supaya *murtad* kembali menjadi kafir. Ia keberatan! Majikannya mengancam: *"Engkau akan senantiasa dibiarkan begini terus sampai mati atau engkau kafir dengan Muhammad dan menyembah Lata dan 'Uzza!" Bilal menjawab tegas: "Ahad, Ahad" (Esa, Esa).* Maksudnya: *Saya hanya mau menyembah Allah Yang Maha Esa, sekali lagi, Maha Esa!* Dan kemudian ditambahnya dengan kalimat-kalimat yang lebih tegas: *"Demi Allah, sekiranya saya tahu ada kalimat lain lagi yang lebih menyakitkan hati kamu daripada kalimat yang aku ucapkan itu, niscaya akan saya ucapkan juga."* (Baca: *Detik-detik Terakhir Kehidupan Rasulullah, hal. 91).*

Karena suaranya merdu, sikapnya jantan, pendiriannya Istiqamah tidak bergeming dan tidak mudah bergeser-geser tempat tegak sampai akhir hayatnya, maka Rasulullah mengangkatnya sebagai *Muadzdzin,* si tukang bang yang memanggil manusia yang beriman untuk shalat berjama'ah di masjid bersama Rasulullah SAW.

Sedikit informasi, lebih dahulu daripada tokoh-tokoh Masyumi itu, saya dimasukkan ke dalam penjara karena diduga menulis apa yang disebut *"Bulletin Revolusioner"* yang oleh polisi dikatakan ditulis oleh orang-orang PRRI di ibukota, justru setelah tokoh-tokoh PRRI di Sumatera menyerah. Tetapi dugaan itu tidak bisa dibuktikan polisi dan Penulis bebas dari penjara, Alhamdulillah tanpa dibebani untuk menandatangani *Surat Perjanjian* seperti apa yang disodorkan kepada Prawoto dan Natsir di atas. Kemudian perjuangan dilanjutkan di muka meja hijau dan Penulis tidak mau menyerah kepada dikte dan tekanan hakim ataupun jaksa.

Memang dalam hal-hal yang amat prinsip seorang Pemimpin dan seorang ideolog yang idealis dan konsekuen tidak boleh menyerah. Seperti masalah ideologi, masalah akidah dan masalah asas partai atau organisasi perjuangan, maka dalam hal itu semua tidak boleh ada kompromi. Berkompromi dalam hal itu atau menyerah kepada kemauan lawan, maka itu berarti

kapitulasi dan harakiri. Mestinya seorang *Mujahid* membela asas dan ideologinya dengan sekuat daya yang ada padanya bahkan kalau perlu dengan jiwa-raganya.

Ibnu Taimiyah. *Mujtahid* dan *Mujahid* serta ilmuan besar itu mati dalam penjara Damaskus. karena dia tidak mau didekte oleh penguasa yang berkuasa. Tetapi dia mati secara terhormat dengan segala kebesarannya sebagai ulama dan pejuang yang konsekuen dan konsisten dalam memperjuangkan cita-citanya tanpa kenal menyerah. Dan beratus ribu penduduk Damaskus laki-laki dan wanita menyalatkan jenazahnya dan kemudian mengantarkannya beramai-ramai ke makam peristirahatannya yang terakhir. Dan namanya hidup terus sampai kini walau badannya telah hancur di dalam kubur. Demikianlah bahagianya akhir hidup pejuang yang tak mau didekte dan tidak kenal menyerah kepada lawan politiknya.

Disamping itu Harsja Bachtiar, seorang profesor dari Universitas Indonesia dalam mencari pemimpin berkata antara lain: "*Carilah pemimpin yang tidak pernah menyerah!*" Karena di waktu revolusi fisik, pemerintah RI telah membuat ketentuan bahwa orang-orang yang telah pernah menyerah kepada musuh tidak boleh diangkat jadi pahlawan. Bagaimanapun juga orang-orang yang telah menyerah, martabatnya luntur di mata lawannya dan mungkin juga di mata kawannya sendiri. Dan dalam agama Islam, Rasulullah melarang mundur atau menyerah kepada musuh dan dipandang salah satu dosa besar di antara tujuh dosa besar yang lainnya. Ya, Islam melarang menyerah secara fisik. mental maupun ideologis dalam jihad fi sabilillah.

Dari itu carilah pemimpin yang istiqamah (konsisten) dalam pendirian, tak pernah menyeberang ke pihak lawan (renegat), tidak Soehartois atau pun Soekarnois, dan tidak pula zig-zag, berjalan berbelok-belok bagaikan ular!

Reaksi Masyarakat terhadap PRRI

Karena yang terlibat dalam PRRI adalah nama-nama besar maka reaksi datang dari orang-orang besar pula.

Bung Hatta mantan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam wawancara dengan Solichin Salam yang dimuat dalam *Kompas*, 27 Maret 1980, sedang wawancaranya sendiri dilakukan pada tanggal 1 Februari 1963, antara lain berkata seperti di bawah ini:

"Tetapi kepentingan yang timbul itu untuk membangun daerah sendiri, dibelokkan oleh pemimpin-pemimpin politik dari pusat, seperti Sumitro (Prof. Dr., Pen.), Natsir, Syafruddin bersama dengan Kolonel Lubis dan lain-lain ke jurusan pemberontakan. *Empat* kali saya berusaha menghalangi dengan berbagai jalan, tetapi tidak berhasil. Saya tegaskan, bahwa tindakan itu akan mencapai yang sebaliknya dari yang dimaksud, akan menghancurkan apa yang telah dibangun dengan usaha sendiri, serta menjadikan Sumatera Barat sebagai padang dilajang gajah, dan *last but not least* memperkuat diktatur di kalangan pemerintah." (Dr. A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas 4, hal. 214, Gunung Agung Jakarta, 1984).

Suwiryo, mantan ketua PNI menyatakan "pemberontakan PRRI melanggar Proklamasi 1945".

Mr. Muh. Yamin menamakan "itu gerakan kontra-revolusioner".

K.H. Ilyas, Menteri Agama mengatakan dengan tegas, bahwa pembentukan pemerintah di luar pemerintah yang sah seperti apa yang dinamakan PRRI itu terang-terangan melanggar sendi-sendi agama.

Rasuna Said, putri Minangkabau dan anggota Dewan Nasional mengatakan dalam rapat umum *Pancasila* di Bandung antara lain mengatakan, "Petualang-petualang A. Husein dan kawan-kawan mengkhianati cita-cita negara, bangsa dan diri sendiri, memberontak, berdurhaka, melanggar sumpah setia dan sumpah terhadap UUD RI. Mereka bukannya revolusioner melainkan reaksioner." (Op.cit, hal. 186).

Itu semua reaksi tokoh-tokoh di luar Masyumi. Maka kini silakan simak reaksi dari dalam tubuh tokoh-tokoh Masyumi sendiri.

Dr. Sukiman mantan Ketua Umum Masyumi berkata seperti apa yang diungkapkan oleh isteri beliau di waktu menerima Bintang Mahaputera Adipradana Kelas II di Istana Negara, Ny. Kustani Soekiman berkata seperti ini:

"....pemberontakan PRRI pecah dan akhirnya Masyumi dibubarkan", ucap Ny. Soekiman, seraya melanjutkan. "Ah, saya tak mau lagi mengingat-ingat masa itu. Pokoknya sudahlah! Tapi satu hal saya ingat, Pak Dokter pernah berkata. "Natsir memang keliru. Semuanya sekarang harus menanggung kerugian."" (*Kompas*, 15-8-1985).

K.H. Isa Anshary mengecam keras tokoh-tokoh DPP Masyumi yang aktif di PRRI. Beliau membuat pernyataan panjang-lebar bahwa langkah-langkah mereka itu akan membawa bahaya serta malapetaka terhadap negara dan partai Masyumi sendiri. Pernyataan itu ditulisnya lebih dari 15 halaman folio dan kemudian dikirimkannya kepada tokoh-tokoh Masyumi dan yang bukan Masyumi.

Dan yang paling keras dari semuanya itu adalah reaksi dari Sekretaris Umum Majelis Syura Masyumi sendiri, K.H. Saleh Suaidy yang mengatakan bahwa mereka itu telah *berkhianat* baik terhadap negara maupun terhadap partai. Terhadap partai, ialah karena mereka menyia-nyiakan amanah yang dipikulkan kepada pundak mereka, meninggalkan tugas dan posnya tanpa musyawarah dan tanpa sepengetahuan pimpinan harian partai sendiri. Mereka pergi ke Sumatera dengan diam-diam, tanpa sepengetahuan Prawoto Mangkusasmito sebagai Sekjen partai waktu itu, tidak setahu Dr. Soekiman, Kasman Singadimejo dan tidak setahu Fakih Usman. Dan di samping itu mereka melanggar garis perjuangan Partai yang memperjuangkan cita-citanya secara legal-parlementer bukan *illegal* ekstra-parlementer. Dan ini juga suatu dosa politik karena melanggar amanah umat.

Dapat dimengerti kalau Ustadz Saleh Suaidy berkata keras demikian, karena demi cintanya kepada Masyumi yang ternyata kemudian bubar juga karena tokoh-tokoh utamanya terlibat PRRI. Kemudian beliau eja Masyumi dengan *Masy-umi*,

yang dalam bahasa Arab artinya *malang* atau *sial*. Ya, Masyumi adalah partai yang bernasib malang. Ia bubar sebelum waktunya. Sungguh perbuatan yang sia-sia!

Keterangan Perdana Menteri Djuanda

Waktu APRI bersiap-siap untuk mendarat di Padang, Penulis dengan kualitas sebagai Sekjen *Liga Anti Komunis Rakyat Indonesia* (LAKRI), nama baru dari *Front Anti Komunis (FAK)*, menghadap kepada Perdana Menteri Djuanda/Menteri Pertahanan di kantornya di Pejambon, Jakarta.

Kepada Perdana Menteri, Penulis mengharap supaya pendaratan diundurkan, karena kaum Muslimin tak lama lagi akan menunaikan Shalat 'Id. Djuanda menjelaskan bahwa dia telah cukup mengemukakan iktikad baiknya kepada pihak PRRI dan dia telah mengirimkan orang yang cukup disenangi oleh pihak sana yaitu Moh. Roem. "Saya kalau perlu rela meletakkan jabatan, tetapi tunggulah dulu Presiden datang dari luar negeri. Tetapi pihak sana tidak sabar dan tidak mau mengerti dan Moh. Roem pulang dengan tangan hampa, dan saya bahkan diultimatum oleh Ahmad Husein." Demikian Dj uanda. Kemudian beliau menambahkan, "karena itu, semua janji yang sudah saya kemukakan kepada Sdr. Roem, saya cabut kembali; dan saya malu dijawab dengan *ultimatum.*"

"Karena merasa sudah biasa di sana, apakah Bapak Djuanda telah memperhitungkan bahwa Syafruddin akan melakukan perang gerilya?" tanya Penulis.

"Saya sudah perhitungkan, dan mari kita lihat sampai di mana dia tahan bergerilya," jawab sang Perdana Menteri yang merangkap Menteri Pertahanan itu secara tegas. Enak juga bicara dengan Perdana Menteri Djuanda, karena dia bicara secara terbuka walau kadang-kadang mukanya kelihatan merah-padam karena saya selingi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kurang enak di hatinya.

Karena ternyata kemudian PRRI makin lama makin terdesak juga ke hutan-hutan, maka saya berteriak sekeras-

kerasnya melalui Kantor Berita ANTARA Jakarta: AMNESTI UMUM. Dan Alhamdulillah, teriakan ini didengar oleh Penguasa dan ternyata dijalankan dengan baik dan PRRI berakhir dengan selamat.

Mungkin ada baiknya waktu itu Pemerintah dipegang oleh Ir. H. Djuanda dan Militer dipegang oleh Jenderal A.H. Nasution, kalau tidak, saya rasa tidak akan ada Amnesti Umum dan tokoh-tokoh PRRI akan mengalami nasib yang amat menyedihkan.

Kini mari kita simak pengakuan dari seorang guru SMEA Padang yang turut bergerilya bersama PRRI bertahun-tahun masuk hutan ke luar hutan yang mengungkapkan isi hatinya, penyesalan serta pengalaman suka-dukanya yang dituangkannya dalam Bonus Majalah SARINAH sepanjang 19 halaman. Tulisan itu berjudul: *"Perjalanan Dalam Kelam"*.

Setelah menjelaskan malapetaka yang mengerikan dan menyedihkan, suatu pertarungan berdarah yang meminta korban ribuan jiwa, serta memusnahkan harta-benda yang tak terhitung jumlahnya (hal. 3), maka Soewardi Idris, sang Penulis mengakhiri tulisannya dengan kalimat-kalimat yang berbunyi seperti ini:

"Pemberontakan PRRI merupakan bagian sejarah bangsa kita, betapapun gelapnya. Dan sebagai sejarah yang menandai turun-naiknya perjuangan bangsa, perlulah dipelajari secara lugas. Barangkali saatnya sudah datang untuk menelaahnya agar kita dapat memetik pelajaran daripadanya, walaupun dapat dipastikan bahwa jalan itu tidak akan kita tempuh lagi" (hal. 19). (SARINAH No. 153, 14 Agustus 1988).

Kabinet Nasakom

Berakhirnya PRRI dengan Amnesti Umum ternyata tidak mengenakkan bagi PKI, karena mereka menghendaki PRRI ditumpas sampai kepada akar-akarnya. Disamping itu mereka berusaha sekuat daya untuk mendekatkan diri kepada Presiden

Soekarno yang sikapnya sudah ke kiri-kirian itu. Makin lama angin Nasakom makin terasa berhembus. Kabinet Nasakom (Nasional, Agama dan Komunis) kelihatannya akan muncul ke permukaan.

Penulis pada suatu hari menyempatkan diri datang kepada Ketua Umum PB. NU, Idham Chalid. Penulis bicara empat mata dengan Idham dan menyarankan kepadanya agar NU jangan duduk dalam Kabinet bersama PKI.

Idham menjawab, "bagaimana caranya?" Mudah kata saya, Anda bisa menyingkir ke luar kota dengan alasan sakit." Konon kabarnya dalam rapat PB. NU, Idham kalah suara dan akhirnya NU duduk dalam Kabinet bersama PKI. Kabinet Nasakom terbentuk dan dilantik tgl. 27 Agustus 1964 dan dari NU duduk Idham Chalid, Saifuddin Zuhri dan Fatah Yasin. Dari Muhammadiyah duduk Marzuki Yatim. Dari SI duduk Sudibyo yang kekiri-kirian. Sedang dari PKI duduk Aidit dan Nyoto sedang Lukman menjadi Wakil Ketua Parlemen. Kabinet ini nama resminya adalah *Kabinet Dwikora* yang mustahil terjadi bila dipikirkan berdasarkan akal sehat. Bagaimana bisa mencapuradukkan antara susu, gula dan racun. Bila dicampurkan pasti susu dan gula akan kalah. Tetapi karena Soekarno, Presiden waktu itu tidak berpikir berdasar akal sehat, maka akhirnya ternyata Kabinet Nasakom itu membuat malapetaka bagi negara dan rakyat Indonesia dengan meletusnya Peristiwa Lubang Buaya yang memakan korban tujuh orang Jenderal TNI yang mati dibantai PKI dengan cara yang amat biadab dan menyedihkan sekali. Peristiwa biadab yang memilukan hati ini tidak akan bisa dilupakan oleh bangsa Indonesia karena telah direkam oleh pita sejarah dan film dokumentasinya diputar setiap tanggal 30 September, karena peristiwa itu meletus pada tanggal 30 September 1965.

Kabinet Nasakom itu juga merupakan malapetaka bagi negara-negara tetangga Indonesia seperti Malaysia dan Singapura, karena negara-negara itu diserang oleh pasukan Indonesia walau banyak memakan korban pada pihak penyerang sendiri. Untunglah gerakan Kup PKI itu dapat dipatahkan dalam tempo

yang singkat. Tetapi namun demikian, tokoh-tokoh Islam yang duduk dalam Kabinet Iblis itu, tentu tidak bisa cuci tangan begitu saja, karena sedikit banyaknya mereka telah melakukan dosa politik yang menyebabkan PKI besar dan berlaku sewenang-wenang.

Pemerintah waktu itu menuduh *Peking* (sekarang Beijing) turut mendalangi Peristiwa G.30.S. yang terkutuk itu, tetapi 25 tahun kemudian pada tgl. 9 Agustus 1990, hubungan yang telah terputus selama 25 tahun itu telah dipulihkan kembali tanpa sedikit pun Komunis Peking meminta maaf atas kesalahannya itu; yaitu setelah kaum dagang yang mengutamakan uang merintis jalan sejak lima tahun sebelumnya. Di mana letak harga diri kita sebagai bangsa dan negara? Alangkah pemaafnya bangsa Indonesia dan apakah kita telah yakin betul peristiwa biadab itu tidak akan berulang kembali? Dan ingat, PKI tidak pernah membubarkan dirinya seperti Masyumi, dan yang membubarkannya adalah Pemerintah, dan PKI belum pernah mengaku bubar. Karena yang membubarkan diri itu adalah Kongres dan itu belum pernah terjadi. Apakah tidak mungkin bahwa mereka menyelam di bawah tanah? Dari itu lebih baik kita meningkatkan kewaspadaan kita setiap waktu! Dan di atas puing-puing Nasakom yang Orla itulah Orde Baru berdiri pada 11 Maret 1966 di bawah Jenderal Soeharto setelah ABRI dan Angkatan 66 berhasil menumpas G.30.S/PKI dengan gemilang. Ya, baik PRRI maupun Nasakom dan G.30.S./PKI, adalah *noda hitam* bagi sejarah RI.

Lenyapnya Partai Islam

Pada tgl. 5 Januari 1973 terjadilah Fusi Partai-partai Islam yang terdiri dari SI, NU, MI dan PERTI ke dalam apa yang dinamakan *Partai Persatuan Pembangunan (PPP),* suatu nama yang dihembuskan dari luar, bukan sebagai hasil Kongres Umat Islam.

Dari nama saja sudah tampak tanda arah kepada *Deislamisasi,* karena tidak ada sedikit pun rasa Keislaman di dalam-

nya. Jelaslah dia direkayasa oleh pihak luar dari kaum Islam Phobi dan Deislamisasi. Itulah taktik-strategi pihak luar untuk melemahkan dan melumpuhkan Islam. Tetapi sayangnya tokoh-tokoh Islam tertentu yang duduk dalam Partai baru itu tidak berfirasat, tidak arif-bijaksana dan tidak berpandangan jauh ke depan. Bahkan mereka jadi Soehartois, pendukung Soeharto dengan fanatik.

Buat sementara memang mereka dibiarkan memakai Islam sebagai asas ciri yang membedakannya dengan partai yang lain. Dalam pada itu PPP diinfiltrasi oleh pihak luar dengan memasukkan seorang yang tidak pernah dikenal sebagai kader Islam, tetapi tiba-tiba tanpa melalui Kongres dia duduk dalam posisi yang menentukan dalam pucuk pimpinan Partai. Dengan begitu partai menjadi hancur berantakan dari dalam. Dan umat Islam menjadi tertipu dan terperangkap.

Pada waktu sidang MPR tanggal 11 Maret 1983 menerima Asas tunggal Pancasila, maka dengan mudah PPP menanggalkan asas Islam dari tubuhnya dan demikian juga dengan Ormas-ormas Islam yang lain. Sejak itu tamatlah riwayatnya Partai Islam di Indonesia setelah partai-partai itu berhasil dahulunya mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan. Dan orang yang paling gembira menyambut putusan sidang MPR itu adalah seorang Politikus Nasrani yang berteriak kegirangan; bahwa mulai hari ini berakhirlah riwayatnya Partai Islam di Indonesia.

Selanjutnya dalam Pemilihan Umum tahun 1987 PPP kehilangan daya tariknya karena asas Islam telah tiada, dan tanda gambar Ka'bah diganti dengan gambar Bintang, maka dengan demikian PPP kalah telak dengan kehilangan jutaan suara pemilihnya yang selama ini memilihnya setiap pemilu. Itulah titik terendah (beku) bagi PPP. Tetapi setelah menderita kekalahan yang parah itu, seribu aneh, oleh seorang tokoh di luar PPP, ke baju sang Pemimpin Partai disematkan tanda gambar Golkar. Apakah karena infiltrasi memperlihatkan hasilnya? Tahukah mereka bahwa tanda gambar Bintang itu dulu dipakai

oleh partai kecil dalam Pemilu 1955 yang beroleh suara tidak lebih dari 5 kursi?

Itulah kesalahan tokoh-tokoh Islam tertentu, mereka membiarkan asas Islam dicoret dari Parpol dan Ormas Islam, tanpa ada seorang anggota MPR pun yang membela Islam dalam lembaga tertinggi negara itu. Dalam sidang MPR yang akan datang nanti apakah juga Islam tidak mempunyai pembelanya? Apakah sejarah duka akan berulang lagi?

Dan adalah kewajiban generasi penerus untuk memulihkan kembali *asas Islam* itu kepada posisinya semula!

Situasi kini memang aneh, suatu negeri yang penduduknya hampir 90% umat Islam yang umatnya tidak kurang dari 180.000.000 orang, tidak ada sebuah partai Islam pun yang akan membawakan aspirasi umatnya. Padahal di negeri-negeri kafir dan sekuler seperti Inggris dan Soviet Rusia masih terdapat Partai Islam yang menyampaikan aspirasi umatnya. Dan ini justru, setelah Indonesia merdeka dan bebas dari penjajah kolonial Belanda. Dan itu tidaklah adil! (Baca: Ditelan Ular Phiton).

Karena PPP bukan merupakan Partai Islam lagi, karena tidak berasaskan Islam, maka tuntutan akan adanya Partai Islam itu harus dikumandangkan dalam forum DPR/MPR yang akan datang (Sidang MPR November 1998 telah mengakhiri hal itu, pen.). Dan yang paling mudah, sesuai dengan hak sejarah *(Historisch Recht)* mungkin *Syarikat Islam* lebih tepat dijadikan Partai Islam, karena dialah yang lebih dahulu dari semua partai Islam yang ada di Indonesia ini.

Kaum Munafik

Beberapa waktu yang lalu, seorang Pengarang ibukota yang cukup terkenal menceritakan pengalamannya shalat di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru. Setelah shalat dia melihat ke kiri dan ke kanan, dia melihat dan memperhatikan orang-orang yang melakukan shalat demikian khusyuknya. Kemudian dia bertanya kepada orang yang duduk di sebelahnya: Demikian khusyuknya mereka shalat, tetapi mengapa umat Islam kalah

dalam pemilu? Yang langsung dijawab: "Orang Islam banyak yang munafik!" Jawaban itu tidak jauh dari kebenaran.

Termasuk orang munafik ialah orang Islam yang mengatakan bahwa Islam tidak mempunyai konsep kenegaraan. Dan ini sudah merupakan suatu penghinaan kepada Islam dan juga kepada Allah. Tuduhan ini telah dibantah Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 54.

Disamping itu ada pula orang yang mengaku Islam berkata secara gamblang tentang sikapnya: *"Islam adalah musuh kita bersama!"* Na'udzubillah min dzalik! Ini adalah munafik agung!

Saya berpesan kepada generasi penerus dan pelurus agar mereka senantiasa menjauhkan diri dari kultus individu, karena Pemimpin yang dikultuskan sering bermain di luar aturan yang berlaku. Ingatlah, orang penjilat tidak pernah akan menjadi orang besar, sebab jiwanya kecil. Dan Rasulullah menegaskan: *"Apabila kamu melihat kaum penjilat, maka lemparkanlah tanah ke muka mereka!"* (Hadits, Riwayat Muslim). Hendaklah mereka bersikap *kritis, korektif, konstruktif, dinamis dan progresif.* Ya, supaya mereka melepaskan belenggu *taqlid* dari jiwa-raga mereka!

Dosa-dosa *politik yang tidak efektif* yang dilakukan oleh para pendahulu kita, juga dosa-dosa kaum munafik yang merupakan musuh dalam selimut, itulah yang menyebabkan Islam terpojok dan tidak berperan dalam masyarakat dan lembaga-lembaga negara. Dan dosa-dosa itulah yang dikatakan orang sebagai *dosa warisan.*

Dan kalau direnung lebih mendalam, dosa-dosa politik itu pada hakekatnya adalah dosa-dosa kita bersama juga, terutama yang berbuat. Karena hal itu sedikit atau banyak tidak terlepas dari pengaruh hukum sebab dan akibat.

Moga-moga generasi penerus dan pelurus yang akan memimpin masyarakat dan negara yang akan datang tidak melakukan kesalahan yang sama sehingga dosa-dosa politik itu tidak berulang lagi untuk selama-lamanya, demi kejayaan Islam dan

kaum Muslimin! Dan akhirnya marilah kita tutup pembahasan ini dengan doa yang berbunyi:

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ. ﴿الحشر: ١٠﴾

"Rabb kami! Ampunilah dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang sudah terlebih dahulu beriman daripada kami. Janganlah Engkau tanamkan dendam kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Rabb kami! Engkau sungguh Maha Penyantun, Maha Penyayang." (Surat Al-Hasyr: 10).

ULAMA DAN PEMILU

Pemilihan Umum yang diadakan di Indonesia sekali dalam masa lima tahun ini adalah merupakan pesta Demokrasi yang oleh Presiden Soeharto diharap dapat dimanfaatkan oleh rakyat untuk bisa mempergunakan haknya sebaik-baiknya.

Ada dua buah tujuan Pemerintah untuk melaksanakan Pemilu yang mempergunakan anggaran belanja yang sangat besar itu, lebih seratus tiga puluh milyar buat Pemilu yang keempat ini. Tujuan itu ialah: *Pertama,* agar rakyat Indonesia mempunyai wakil-wakil yang *representatif* dan bertanggung-jawab serta dapat menyampaikan aspirasi rakyat kepada Pemerintah, di samping mengontrol jalannya pemerintahan negara dengan seksama. *Kedua,* agar rakyat Indonesia memiliki apa yang sering disebut dengan: PEMERINTAHAN YANG BERSIH *(The clean government).* Bila tujuan-tujuan itu tidak bisa tercapai, maka Pemilu itu dapat dikatakan *gagal*, dan segala dana dan daya yang telah dicurahkan untuk itu akan terbuang percuma dengan sia-sia.

Untuk mencapai Pemerintahan yang bersih, maka Pemilu harus pula bersih; karena Pemilu yang kotor dan curang tidak akan melahirkan wakil-wakil yang representatif, dan tidak pula *PEMERINTAHAN YANG BERSIH. Bersih Undang-undangnya, bersih calon dan cara pencalonannya, dan bersih pula cara pelaksanaannya.* Dengan begitu Insya Allah tujuan akan tercapai.

Sejak Pemilu yang pertama (1955) yang dilaksanakan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap sampai kini, para Alim-Ulama tidak kalah peranannya daripada yang lain-lain, kecuali Ulama tertentu yang sudah masuk kantong, yang tidak bercita-cita lagi memenangkan golongan Islam demi *'Izzul Islam wal Muslimin*; atau Ulama yang telah berbalik arah berpihak kepada golongan non-Islam yang tidak bercita-cita untuk kejayaan Is-

lam dan Muslimin di tanah air kita ini. Padahal Nabi SAW telah bersabda: "*Man Lam Jahtamma bi Amril Muslimin fa Laisa Minhum (barangsiapa yang tidak mementingkan urusan kaum Muslimin, maka ia bukanlah termasuk golongan mereka itu).*" (Al-Hadits).

Untuk menghadapi Pemilu 1955 dulu, para Alim-Ulama mengadakan Kongres di Medan. Mereka mengeluarkan fatwa yang antara lain berbunyi: *WAJIB HUKUMNYA BAGI UMAT ISLAM MEMILIH PARTAI ISLAM.* Putusan Kongres Ulama Seluruh Indonesia yang diadakan di Medan pada tahun 1953 itu, Alhamdulillah dipatuhi oleh kaum Muslimin dan hasilnya pun tidak mengecewakan. Tetapi kini Majelis Ulama Indonesia yang telah menelan biaya dari uang negara yang berasal dari keringat rakyat alias pajak umat itu, *tidak berani mengeluarkan fatwa* atau anjuran seperti apa yang pernah difatwakan para Alim-Ulama pada tahun 1953 itu. Dengan demikian MUI tidak berperan untuk memenangkan golongan Islam dalam Pemilu ini. Kalau sekedar menganjurkan supaya rakyat mempergunakan hak pilihnya saja, itu sudah biasa dan basi; bunyi suara yang begitu sudah sering didengar rakyat dari para pejabat Pemerintah.

Yang diperlukan umat adalah *keberanian dan ketegasan,* bukan hanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang merupakan duplikat dari kata-kata pejabat yang sama sekali tidak relevan bagi *kemenangan* Partai Islam yang menjadi salah satu kontestan dalam bertarung pada Pemilu ini. Jongkok-jongkok dan pernyataan kebulatan tekad yang dipamerkan Musyawarah MUI menjelang saat-saat Pemilu ini adalah merupakan hal percuma dan tidak layak dilakukan oleh MUI karena itu bersifat *kekanak-kanakan* yang bisa dimengerti *kalau hal semacam itu dilakukan oleh: anak-anak muda (Ghulama, dengan titik di atas A 'IN)* yang masih hampa, seperti KNPI dan AMPI umpamanya; bukan oleh para ulama yang mestinya menjadi *Mercu Suar, panutan dan teladan* bagi masyarakat; *ikutan* dan bukan ikut-ikutan, terutama dalam menghadapi saat-saat yang maha penting dan menentukan ini. Dengan demikian jelaslah, bahwa apa yang dipertontonkan MUI sebagai Ulama resmi dan profe-

sional yang tidak mau membela kepentingan umat Islam dalam politik, tegasnya tidak mau memihak PPP dalam Pemilu 1982 ini, adalah *sikap yang menyedihkan serta tidak terpuji.* Tetapi lebih menyedihkan lagi ialah apa yang dilontarkan oleh Ketua MUI sendiri K.H. Syukri Al-Ghozali dalam keterangannya di sebuah Majalah yang terbit di Jakarta, bahwa Kampanye Pemilu tidak usah memakai ayat suci Al-Qur'an. Masya Allah! Alangkah nekadnya kiyai kita ini!

Seorang penulis memberikan tanggapannya terhadap pernyataan Kiyai Sukri Al-Ghozali itu seperti ini: *"Ketua MUI K.H. Syukri Ghozali dalam Panji Masyarakat Nomor 343 memberikan semacam garis tegas, bahwa Pemilu sekarang ini adalah urusan bangsa dan negara, karena itu tidak sepantasnya memakai ayat-ayat Al-Qur'an untuk mendapatkan dukungan massa dalam Pemilu nanti."* (Mahsun Suyuti, Pan. Mas. No. 352).

Ya, kalau begitu Al-Qur'an mau dipisahkan dari bangsa dan negara; padahal, bangsa dan negara itulah yang akan dituntun dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Pemisahan Al-Qur'an dari negara dan masyarakat itu benarlah yang merupakan *garis Prof. Snouck Hurgronye* dan *Van Der Plas*, Nasrani Kolonial yang dikutuk oleh umat Islam selama ini. Sadar atau tidak, para pengikut paham mereka itu ternyata masih ada sisa-sisanya walau Indonesia telah merdeka *lebih setengah abad silam.* Yakni mereka yang tidak senang Al-Qur'an dibawa dalam Dakwah Politik; dan bukankah kampanye Pemilu itu bagi kaum Muslimin termasuk Dakwah dalam bidang politik, atau Dakwah yang mengandung unsur politik? Dan Dakwah yang demikian coraknya adalah termasuk Ibadah kepada Allah, sedang Al-Qur'an dan Hadits yang disampaikan untuk mendukung kebenaran Dakwah itu adalah suatu yang sudah semestinya demikian. Yang terlarang ialah, menyalahgunakannya, yakni bila dia dipakai oleh orang-orang yang *bukan* berasal dari Partai Islam, atau golongan yang non-Islam yang anggaran dasar dan tujuannya bukan untuk menegakkan Islam.

Kini memang banyak orang yang turut-turutan latah yang bicara asal bunyi saja. Padahal Rasulullah SAW telah berpesan

keras dengan sabda beliau: *"Sampaikan oleh kamu dari aku walaupun satu ayat!"* (Al-Hadits). *"Dan Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan itu akan dapat memberi ingat kepada kamu dan kepada siapa saja yang Al-Qur'an itu sampai kepadanya."* (Al-Qur'an, Al-An'am: 19).

Demikianlah Al-Qur'an itu harus disampaikan untuk menjadi pedoman dalam segala sektor kehidupan kita, baik ibadah maupun mu'amalah, sosial-politik ataupun ekonomi dan kebudayaan dan sebagainya. Dan kalau ada orang yang mogok, mundur dan berkapitulasi, itu terserah kepada pribadi yang bersangkutan, tetapi jangan mencemarkan dan jangan bicara semuanya tentang wahyu Ilahi itu.

Mari Terus Berdakwah!

Biar anjing menggonggong, kafilah berlalu terus. Dakwah atau kampanye dengan memakai dalil Al-Qur'an dan Hadits harus berjalan seperti sediakala, karena itu merupakan Ibadah yang ikhlas karena Allah. Apalagi akhir-akhir ini banyak orang yang bingung, mau memilih apa dan mau berpihak ke mana. Maka untuk menghilangkan kebingungan itu marilah kita kemukakan beberapa ayat Al-Qur'an yang sangat berguna menghadapi perkembangan situasi di masa-masa mendatang ini. Allah SWT befirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 51, 52 dan 53 yang artinya berbunyi seperti di bawah ini:

> *"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu ambil orang-orang Yahudi dan Kristen menjadi pemimpin, sebagian mereka menjadi pemimpin bagi yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim (melanggar aturan)."* (Al-Maidah: 51).
>
> *"Maka engkau akan melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, segera berpihak kepada mereka sambil berkata: Kami takut kena risiko (bahaya). Tetapi semoga Allah akan mendatangkan kemenangan atau keputusan dari sisi-Nya, lalu mereka menyesal atas apa yang*

mereka sembunyikan dalam hatinya itu." (Al-Mai-dah: 52).

"Dan orang-orang yang beriman akan berkata: 'Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan Allah, bahwa mereka sebenar-benarnya bersama kamu?' Telah gugurlah pahala amal-amal mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang merugi." (Al-Maidah: 53).

Dan akan lebih mantap dan meresap kalau kita lanjutkan sampai dengan ayat Al-Maidah 57.

Keterangan

Ayat ini termasuk ayat-ayat Hukum, karenanya Allah SWT bicara dengan tegas tanpa kompromi, demi menjaga imannya kaum Muslimin agar jangan bercampur dengan racun Nifaq.

1. Ayat Al-Maidah 51 berisi *larangan dan peringatan Allah* kepada orang-orang yang beriman agar *jangan sekali-kali mengangkat* kelompok di mana ada Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin bagi kaum Muslimin. Larangan ini diiringi dengan *sanksi*, bahwa barangsiapa mengangkat atau memilih kelompok non-Muslim itu sebagai pemimpinnya, maka orang itu *termasuk* ke dalam kelompok Nasrani atau Yahudi itu. Dijelaskan dengan gamblang dengan kalimat "FA INNAHU MINHUM" *(dia telah termasuk golongan mereka)*. Dengan arti lain, bahwa pada hakekatnya ia telah menjadi Yahudi atau Nasrani walaupun ia masih mengaku Islam dan masih shalat dalam masjidnya kaum Muslimin. Tetapi Allah telah menghukum dan menetapkannya telah pindah dari Islam, disebabkan ia telah berpihak dan memilih kelompok Yahudi dan Nasrani itu menjadi pemimpin atau wakilnya dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Karena itu peringatan keras dan larangan Allah ini patutlah kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, demi menjaga Iman kita.
2. Ayat Al-Maidah 52 menjelaskan gambaran orang Munafik yang di dalam hatinya ada penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit mental berupa keragu-raguan dan ketakutan. Di mana Allah melukiskan alasan mereka berpihak kepada golongan

non-Islam itu ialah: *takut dapat risiko atau bahaya.* Ya, takut ekonominya akan terganggu, takut akan tergeser dan dicopot bila kaum non-Islam di mana ada bercampur Yahudi dan Nasraninya itu kelak menang dalam perjuangan. Tetapi Allah menghibur orang-orang beriman dengan kata-kata: *"Semoga Allah memberikan kemenangan dari sisi-Nya"*, sehingga orang-orang munafik itu menyesal kelaknya.

Ayat ini menyindir orang-orang yang lemah imannya, bahwa karena sesuatu intimidasi dan persuasi, mereka telah jadi ketakutan, dan kemudian *buru-buru* dengan segera berpihak kepada golongan yang tidak patut jadi ikutan mereka. Allah melukiskannya dengan kata-kata: *Yusari'una Fihim (segera berpihak kepada mereka itu).* Inilah yang banyak diderita oleh kaum pegawai negeri ataupun pengusaha-pengusaha yang menggantungkan nasibnya kepada para pejabat negara. Tetapi bagi para pegawai dan pengusaha-pengusaha yang beriman kuat, hal itu tidak menjadi problema. Bukankah Pemilu itu LUBER?

3. Dalam ayat Al-Maidah 53 ini Allah SWT memperingatkan keras atas kesalahan mereka dengan Nifaqnya itu, bahwa *seluruh pahala amal mereka berguguran, tak ada satu pun yang tinggal pada diri mereka.* Mungkin mereka dengan *Nifaq* (Hypokrit)nya banyak beroleh keuntungan materi, tetapi itu semua tak ada artinya sama sekali, bila ia telah *Nifaq* dan *seluruh amalnya telah musnah dan imannya telah habis terjual dan tergadai. Na'udzubillahi min dzalik!*

   Allah SWT melukiskan sanksi ancamannya itu dengan firman-Nya: *"Habithat A'maluhum fa Ashbahu Khasiriin" (Hapus Musnah Pahala Seluruh Amal Mereka Sehingga Mereka Merugi).* Apakah kita tidak ngeri hal itu? Dan ada satu yang harus diingat, bahwa bila di dunia Anda sudah bersama golongan mereka, di akhirat kelak tidak mustahil Anda bersama mereka pula. Anda dapat memperkirakan di mana Allah SWT akan menempatkan mereka seperti apa yang telah dijelaskannya berkali-kali dalam Kitab Suci-Nya Al-Qur'an.

Demikianlah kita telah menyampaikan 3 potong ayat Al-Qur'an yang bisa dibawakan dalam Dakwah kita kepada umat Islam untuk menghadapi situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi bersama ini. Saya tutup uraian ini dengan sebuah senandung yang berbunyi seperti ini:

Salah angkat pangkal melarat
salah pilih pangkal sedih
salah pihak pangkal nifak
selamatkan IMAN dunia-akhirat!

Begitulah hendaknya Dakwah Ulama dalam menghadapi Pemilu! *Renungkanlah dan camkanlah!* Dan semoga Pemilu benar-benar merupakan pesta Demokrasi, bukan *Sandiwara* Demokrasi!

Sebuah Catatan Tentang Pemilu di Indonesia

Sebagai sarana demokrasi, Pemilu adalah salah satu jalan yang harus ditempuh. Sebagai negara demokrasi, Indonesia telah menyelenggarakan tujuh kali Pemilihan Umum. Yang paling sukses adalah Pemilu yang pertama yang diadakan di zaman Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) pada tahun 1955.

Pemilu waktu itu berjalan lancar dan tak seorang pun korban yang meninggal dunia. Dalam Pemilu pertama itu tak seorang pun yang diangkat menjadi anggota DPR/MPR. Kalau ada yang diangkat, itu bukan Pemilu! Semua anggota betul-betul sebagai hasil pilihan rakyat dan bersuara vokal demi untuk kepentingan rakyat. DPR waktu itu disegani bahkan ditakuti Pemerintah, kalau kurang hati-hati melangkah, DPR bisa mengajukan *mosi tidak percaya* kepada Pemerintah. Dan kalau suara oposisi menang dalam pemungutan suara, Pemerintah bisa terguling tanpa ampun. Salah satu Kabinet yang terguling karena mosi tidak percaya adalah Kabinet Natsir. Waktu itu yang berlaku adalah UUD 1950 yang demokratis.

Tetapi dalam Pemilu yang kedua pada tahun 1971 yang berlaku adalah UUD 1945 yang tidak demokratis, dan DPR hasil pemilunya juga lumpuh, tak berkutik terhadap pemerintah. Dan

sejak Pemilu 1971 sampai Pemilu 1997 para anggota DPR tidak berfungsi sebagai wakil rakyat. Mereka tidak lebih sebagai robot dan boneka pemerintah belaka. Ya, di zaman Orde Baru DPR lumpuh total, tak satu pun Undang-undang yang lahir atas gagasan dan prakarsa DPR; semuanya dibuat oleh Pemerintah, sedang DPR hanya disuruh sebagai tukang stempel untuk mengesahkannya saja.

Pemilu yang paling kacau dan yang banyak memakan korban adalah Pemilu 1997. Di Kalimantan Selatan saja lebih dari 120 orang yang hangus terbakar seperti arang yang tidak dapat diketahui identitasnya lagi. Walaupun Pemilu waktu itu diawali dengan doanya Ketua MUI, tetapi rupanya doa ulama tidak didengar dan dikabulkan Allah lagi. Terbukti yang parah dan paling kacau justru daerahnya ketua MUI sendiri, Kalimantan Selatan. Dan Ketua MUI yang Golkar itu datang ke sana untuk berkampanye nyaris terbakar oleh api dan terkepung 4 jam lamanya. Alhamdulillah, beliau selamat. Dan hasil Pemilu 1997 itu sungguh mengecewakan, karena mereka tak lebih dari boneka-boneka Soeharto belaka. Waktu anggota Komisi VI DPR hasil Pemilu 1997 melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit UKI, mereka diusir oleh para mahasiswa UKI, karena mereka memandang anggota DPR hasil Pemilu 1997 itu tak lebih dari robot-robot pemerintah Orde Baru belaka.

Kini kita menghadapi Pemilu 1999 sebagai Pemilu yang kedelapan. Dalam pra kampanye Golkar di Purbalingga Jawa Tengah, telah terjadi peristiwa yang memalukan, di mana kader wanita Golkar diteror secara kasar dan biadab oleh partai berbaju merah berlambang kepala Banteng. Para wanita itu dilecehkan dengan melucuti pakaian mereka sehingga yang tinggal hanya BH-nya saja. Belum lagi berkuasa, mereka telah memperlihatkan watak mereka yang brutal; apalagi setelah berkuasa kelak. Dari itu kita harus waspadai *Nasakom gaya baru* ini di mana berkumpul lawan-lawan Islam, terbukti salah seorang Ketuanya Theo Syafei telah menyerang Islam dalam pidato kasetnya selama 45 menit yang tersebar luas, dan dia menghujat Presiden RI.

Apalagi partai baju merah ini menampilkan perempuan yang memiliki dua wajah sebagai calon Presiden. Satu wajahnya menghadapkan kiblatnya ke Ka'bah di Makkah, dan mukanya yang satu lagi menghadap ke Pure-pure Hindu di Bali. Setengah Islam dan setengah Hindu, karena neneknya memang orang Hindu Bali. Kalau nanti mereka berhasil, ini bisa menimbulkan gejolak-gejolak revolusi sosial yang luas dan tak henti-hentinya di dalam masyarakat, karena larangan agama telah dilanggar terang-terangan! Harap diketahui bahwa, atas *Ijmak* (Konsensus) Ulama Mujtahid, **haram** hukumnya mengangkat perempuan menjadi **Imam** (Kepala Negara)[1]. Dan itu merupakan malapetaka bagi negara! Harus diingat bekas anggota Parlemen dari CC PKI, Siswoyo yang baru keluar dari penjara menganjurkan kepada kawan-kawannya anggota PKI, supaya memilih PDI Perjuangan. (Tekad, No. 25, 19-4-1999). Kaum Muslimin tidak boleh tinggal diam! Kalau tidak, Indonesia bisa merah kembali!

Dekrit Presiden Kembali kepada UUD 1950

Selama Pemilu masih berdasar kepada UUD'45, maka kita belum akan beroleh Dewan Perwakilan Rakyat yang sejati. Dan yang muncul adalah DPP (Dewan Perwakilan Pemerintah), para boneka yang *yes men* seperti yang muncul selama Orde Baru; ya, kaum kultus individu belaka.

Dan kalau kita tidak ingin patung-patung bisu 5D (Datang, Duduk, Dengar, Diam dan Duit), maka kita harus kembali *segera* kepada UUD 1950 yang jauh lebih demokratis. UUD'45 menguntungkan pemerintah dan melahirkan beo-beo, sedang-

---

[1] Patut diketahui bahwa Megawati telah melanggar Konsensus Keluarga Bung Karno yang telah disepakati pada tahun 1982, yaitu *tidak akan berpartisipasi aktif dalam salah satu organisasi sosial politik* (Sospol) peserta Pemilu. Konsensus keluarga tersebut disepakati oleh: Guntur, Megawati, Guruh, Sukmawati, Rahmawati, Bayu, dan Taufan di rumah Guruh Jalan Sriwijaya, Jakarta. (FORUM, No. 7, 15 Juli 1996).

kan UUD 1950 menguntungkan rakyat dan melahirkan pejuang-pejuang demokrasi yang bersuara vokal. DPR hidup berfungsi sebagai wakil rakyat yang sejati.

Harus diingat bahwa UUD'45 itu di zaman revolusi hanya lakunya tidak lebih dari *tiga bulan* saja, yaitu sampai 13 November 1945 di mana terbentuk Kabinet St. Sjahrir yang pertama. Maka mulai tanggal 14 November, sehari kemudian Sjahrir mengucapkan selamat tinggal kepada UUD'45 itu. Kabinet beralih dari Presidentil Kabinet kepada Parlementer Kabinet.

Kalau dulu Bung Karno yang haus kekuasaan itu kembali kepada UUD'45 dengan sebuah Dekrit Presiden, maka Presiden B.J. Habibie juga bisa kembali kepada UUD'50 yang lebih demokratis dengan sebuah Dekrit Presiden pula! Kalau tidak demikian, apakah kita akan memilih robot-robot lagi?

Semoga Pemilu yang kedelapan ini berjalan sukses terjauh dari segala marabahaya! Amien!

TAKLUKNYA SEBUAH BENTENG

Di waktu MASYUMI dibubarkan oleh rezim Soekarno (kemudian turut pula membubarkan dirinya sendiri) pada tahun 1960 di mana NU turut memerintah, maka sejak itulah NU tampil sebagai partai Islam terbesar yang turut memainkan peranannya dalam percaturan politik di tanah air kita Indonesia. NU menjadi *satelit* Soekarno yang menurut dan mengekor ke arah mana politik Soekarno berputar dan mengarah; ya, NU telah sehidup semati dengan Bung Karno bagaikan orang hidup suami-istri layaknya. Dan di kala Soekarno membentuk Kabinet NASAKOM bersama PKI, maka NU tidak ketinggalan bersama musuh Islam dan musuh Negara itu duduk dalam Kabinet kaki-tiga yang bergandengan bahu *semeja* dan *semimbar* dengan kaum komunis itu memerintah Republik ini. Dengan begitu NU turut bertanggung-jawab dalam peristiwa-peristiwa sejarah baik yang positif maupun yang negatif yang terjadi di arena sosial-politik di persada Indonesia Raya yang tercinta ini. Dan di kala meletusnya pemberontakan PKI (G.30.S) pada tahun 1965, maka wajah NU menjadi pucat-pasi, malu setengah mati entah ke mana mukanya mau disembunyikan, karena patner-politiknya membuat noda besar dalam Negara. Sejak itulah citra NU menjadi buruk dan namanya menjadi luntur di mata masyarakat dan negara: NU sukar dipercaya lagi!

Jatuh-Bangunnya NU

Walaupun wajah NU telah bernoda dengan noda *Nasakom* yang penuh *korengan,* namun NU bertekad untuk bangkit

kembali untuk menghapus citra buruk yang melekat pada dirinya selama ini. Dengan melalui Pemilu 1971 dan dengan terbentuknya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tgl. 5 Januari 1973, maka hal itu suatu peluang dan *momentum* yang baik sekali bagi NU untuk bangun kembali memperbaiki citra dirinya di mata masyarakat luas. NU ternyata mendapat posisi yang baik di dalam lembaga DPR dan PPP, bahkan NU merasa dirinya dominan dalam dua instansi tersebut. NU bersuara lantang kembali mengecam tindakan-tindakan pemerintah yang dirasakan merugikan masyarakat, dan NU bersuara jantan dalam DPR. Pada dekade tahun 70-an itulah suara NU didengar dan diperhatikan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri. NU berusaha menjalankan politik amar-makruf dan nahi-munkar sesuai dengan aspirasi umat Islam terutama kaum *Nahdhiyyin*. Ya, NU bangkit kembali.

Walk-Out di MPR

Dalam sidang MPR 1978 (hasil Pemilu 1977), di kala membicarakan *penghayatan Pancasila,* maka Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) keluar meninggalkan sidang (Walk-Out), kecuali unsur SI yang dipandang memisahkan diri dari persatuan *(Al-Mufariqu lil jama'ah)*. Sikap NU yang mengomandokan *Walk-Out* dari sidang MPR dalam membicarakan hal yang amat prinsip itu, mendapat kecaman dari lawan-lawan Islam, tetapi mendapat pujian tinggi dari kaum Muslimin. Dengan sikap jantan seperti itu citra NU pulih kembali dan masyarakat seolah-olah melupakan tindak-tanduk NU di masa lampau. Sikap itu telah membuat NU menjadi "pahlawan" di mata masyarakat Islam. Mengapa sikap yang demikian itu bisa terjadi? Karena di kala itu NU mempunyai seorang *Imam* yang ditaati dan disegani, yaitu K.H. Bisri, Jombang, yang merupakan singa tua yang masih mempunyai taring dan gigi perjuangan yang utuh. Dialah yang memegang komando di kala itu dalam Fraksi PPP di sidang MPR 1978 yang bersejarah itu.

Nama NU memang harum di kalangan masyarakat di kala itu, sehingga orang menganggap bahwa NU-lah yang mewarisi kepemimpinan Umat Islam Indonesia menggantikan *MASYUMI* yang telah tiada. Juga menarik perhatian kalangan luar negeri. Seorang sarjana Jepang, Dr. Mitsuo Nakamura yang mengadakan studi tentang NU dalam bukunya, *Agama dan Perubahan Politik,* alih bahasa *Al-Ghazie Usman,* mengatakan antara lain, bahwa pada tahun 1970-an tersebut NU telah muncul sebagai pengeritik pemerintah Orde Baru yang paling berani dan menantang. Bahkan telah mengembangkan kritik yang luas atas strategi pembangunan rezim yang berkuasa dewasa ini. Kemudian muncullah sejumlah intelektual muda NU yang mencari model pembangunan alternatif yang diilhami oleh etika Islam. Dan dengan penampilan NU yang ditandai oleh perubahan orientasi politik tersebut, maka *kesan buruk* tentang NU *"sebagai organisasi gerontokratis dari Ulama kampungan yang sederhana dan oportunis" tampak menjadi tidak tepat lagi.* Kendatipun secara agama tradisionalisme NU tampak tetap utuh (hal. 4). Demikian *Dr. Mitsuo.* Itulah penilaian situasi NU pada tahun 70-an.

Tetapi kini situasi itu telah berubah lagi, karena pemimpinnya telah berganti pula. K.H. Bisri, singa tua yang berwibawa itu telah tiada, ia telah berpulang pada tahun 1980 yang lalu, digantikan oleh K.H. Ali Maksum, Yogyakarta, yang kepemimpinannya tampil dengan corak lain, tidak seperti orang yang digantikannya; karenanya *citra* NU berubah lagi, grafiknya menurun kembali.

KEMELUT DALAM KUBU NU

1. Kongres NU di Semarang

Kongres NU di Semarang pada th. 1979 berlangsung dengan meriah sekali. Terdengar suara burung bahwa NU akan mempunyai Ketua Umumnya yang baru, berganti rasa dan selera; sebab Idham Chalid telah cukup lama memegang kendali NU, lebih seperempat abad. Untuk itu konon Idham telah mem-

buat sebuah janji tertulis yang disaksikan oleh Kiyai Masykur bahwa beliau bersedia menyerahkan pimpinan itu kelak ke tangan Ahmad Syaichu, seorang tokoh NU yang cukup terkenal. Tetapi karena Muktamar berjalan sedemikian rupa di mana Idham merasa dirinya cukup banyak mempunyai pendukung dan juga karena pertimbangan politik, maka Idham pun mengubah janjinya; dan akhirnya beliau terpilih kembali menjadi Ketua Umum PB. NU yang baru. Tentang Syaichu, karena amat kecewanya dia dikalahkan Idham Chalid, kecewa apa yang dijanjikan tidak berbukti, maka ia pun keluar meninggalkan sidang Muktamar yang sedang berlangsung, dan tidak mau diserahi satu jabatan pun dalam kepemimpinan PB. NU sampai kini. Begitulah awal gejala kemelut dan petaka dalam kubu NU.

2. Munas NU Kaliurang

Munas (Musyawarah Nasional) NU di Kaliurang yang berlangsung dari tgl. 31 Agustus sampai 2 September 1981 menghasilkan antara lain terpilihnya K.H. Ali Maksum, Krapyak Yogyakarta sebagai *Rais 'Am* Syuriah NU yang baru, menggantikan K.H. Bisri yang wafat pada th. 1980. Terlepas pilihan itu tepat atau tidak, NU memang gudangnya Alim-Ulama. Tetapi lain rupanya Bisri dan lain pula Ali Maksum. Bisri orangnya *tawadhu'* agak pendiam; kambing di luar tetapi singa di dalam. Ali agak *'ujub,* agak banyak bicara; singa di luar tetapi kambing di dalam, dan ini nanti akan terbukti.

Baru beberapa bulan beliau menjabat Rais 'Am, beliau telah menepuk dada, apa yang tidak pernah kita dengar selama ini dari K.H. Bisri. Dengarlah ia berkata dalam sebuah wawancara dengan harian "MERDEKA" tentang kehebatan NU seperti ini:

"Pada kesempatan itu ia mengungkapkan pula hasil penelitian ahli-ahli Jerman Barat bahwa *kekuatan Islam di Indonesia sesungguhnya adalah NU.*

"Walaupun demikian, bukan disebabkan oleh karena NU kuat organisasinya, administrasi, apalagi keuangan. Tapi pada

dasarnya *dalam tubuh NU ada ciri tersendiri, yakni tradisi ada Khaul, Tahlil, Talkin dan Barzanji."* (Merdeka, 26 Mei 1982).

Tetapi justru apa yang dikatakan Ali Maksum sebagai ciri yang merupakan *kekuatan* itu adalah titik sentral *kelemahan* NU yang sejati. Karena perbuatan yang disebutkan beliau itu, tidak lain dari *bid'ah* semata yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW dan tidak pernah menjadi ajaran dari Imam-imam Madzhab yang empat. Makanya K.H. Bisri tidak pernah menyinggung apalagi menonjolkan kelemahan NU itu. Dan semua orang tahu di mana tempatnya kaum *bid'ah* itu menurut hadits Nabi yang shahih. Bid'ah adalah perbuatan sesat yang mengada-ada yang membahayakan ajaran Islam. Tetapi apa boleh buat, seribu sayang, jama'ah umat NU yang begitu besar telah ketularan penyakit *kanker rohani* itu karena kesalahan fatwa para Ulamanya sendiri. *Na'udzubillah mindzalik!* Dan siapa gerangan para Ulama angkatan muda yang bisa mengoreksi kesalahan itu dan mengembalikan umat kepada Sunnah Nabi Muhammad SAW yang murni? Apakah mau bid'ah sampai hari Kiamat? Bukankah NU sarang dan gudangnya Ulama Ahlus Sunnah?

3. Idham Chalid serahkan mandat

Gara-gara daftar calon DPR dari PPP dalam Pemilu 1982 yang tersusun secara "tidak sah" dan sangat merugikan NU, timbullah keresahan dalam kubu NU. NU memprotes susunan daftar calon yang dirasakan NU sangat tidak adil itu. Walaupun biang keladinya yang sebenarnya adalah J. Naro, tetapi yang disalahkan NU pertama kali adalah Idham Chalid. NU menganggap bahwa itu juga kesalahan Idham kerena Idham dipandang menyerah dan bertekuk lutut saja kepada Naro, Ketua Umum PPP itu. Susunan daftar calon itu jelas atas kemauan Naro belaka tanpa musyawarah dan diserahkan bukan di kantor Lembaga Pemilu, tetapi cukup diantarkan Naro ke rumahnya Amir Mahmud, Menteri Dalam Negeri di kala itu. Hal inilah yang menyebabkan seluruh aparatur NU sejak dari Syuriah/PB. NU sampai kepada Wilayah dan Cabang-cabang NU seluruh

Indonesia, mengutuk Naro dan mencela sikap Idham yang mau ditipu Naro itu. Perang dingin yang menghangat terjadi antara yang pro dan anti-Idham, baik angkatan tua maupun angkatan muda NU. Akhirnya tokoh-tokoh Ulama terkemuka NU termasuk sesepuh, turun tangan guna mencari penyelesaian yang sebaik-baiknya. Mereka berkunjung ke rumahnya Idham Chalid di Jakarta, dan di hadapan Rais 'Am, K.H. Ali Maksum dan para Rais yang lain, K.H. As'ad Syamsul Arifin, K.H. Machrus Ali dan K.H. Masykur, *K.H. Idham Chalid menyerahkan mandatnya secara tertulis dari jabatannya sebagai Ketua Umum PB. NU dengan alasan kesehatan.* Peristiwa itu terjadi pada tgl. 2 Mei 1982, dua hari sebelum Pemilu, 4 Mei 1982. Tetapi dianggap mulai berlakunya pada tgl. 6 Mei 1982.

Tetapi apa lacur, baru delapan hari mandat itu diserahkan kepada Rais 'Am, maka masyarakat terkejut luar biasa apalagi kalangan *intern* NU, bagaikan mendengar petir menyambar di siang bolong: *Idham Chalid mencabut kembali penyerahan mandatnya itu pada tgl. 14 Mei 1982 dan menyatakan bahwa ia tetap sebagai Ketua Umum PB. NU seperti biasa.* Ini suatu keajaiban alam dalam dunia pergerakan di bumi kita ini, yang sebelumnya belum pernah terjadi dalam sejarah organisasi. Mengapa bisa terjadi demikian?

Sebabnya tak lain tak bukan, karena pengaruh orang-orang tertentu yang mengelilingi Idham karena kepentingan pribadi. Idham sendiri secara pribadi adalah orang baik dan ia hormat kepada para Ulama. Pengunduran diri itu sungguh menguntungkan kepada dirinya karena selama 26 tahun dia dibebani tugas memimpin NU dengan kesehatannya yang begitu menyedihkan, belum lagi tugas kenegaraan yang dipikulnya pula selama berpuluh tahun. Dengan begitu dia bisa merawat dirinya dengan baik dan menyerahkan pimpinan NU kepada tenaga lain yang lebih segar, demi kepentingan umat yang besar. Tetapi ia lemah terhadap oknum-oknum yang mendempet kepadanya, dan inilah yang sebenarnya menghasut dan "mencelakakan"nya untuk menarik kembali mandat yang telah dilepaskannya dengan

tulus-ikhlas itu. *Akibatnya kubu NU yang besar itu berantakan hebat di dalam sampai kini, dan entah kapan akan pulihnya kembali. Wallahu A'lam!*

4. Rais 'Am menyerah ke Istana

Dalam pada itu pembicaraan asas tunggal bagi Parpol menghangat. Selama ini masih ada kesempatan bagi Parpol mencantumkan asas Islam sebagai cirinya bagi suatu Parpol Islam. Dan itu adalah wajar dan seharusnya demikian. Tanpa adanya asas ciri itu, Parpol itu menjadi mengambang *(float)*. Masyarakat yang mengambang seperti kiambang itu pada hakekatnya bukanlah suatu masyarakat yang utama; ibarat sawah tidak ada pematangnya, campur-aduk satu dengan yang lain, antara Islam dan yang non-Islami bisa saling masuk-memasuki. *Floatingmass* (massa mengambang) itulah yang dicita-citakan oleh kaum non-Islami untuk melemahkan Islam agar mudah *diinfiltrasi* ke dalamnya.

Sedang selama ini masing-masing Parpol secara tradisional sejak berpuluh-puluh tahun mencantumkan asas ciri dalam anggaran dasarnya. Asas Islam sudah melembaga sejak masa sebelum Indonesia merdeka sampai kini. Tetapi hal ini mulai digugat orang yang tidak senang kepada Islam berperan dalam masyarakat dan negara. Asas ciri Islam itu harus hapus menurut keinginan selera mereka yang *Islam Phobi.*

Sebagaimana diketahui, bahwa asas Islam itu adalah rohnya organisasi Islam. Tanpa asas Islam itu organisasi atau Partai Islam itu tidak ada artinya sama sekali, *bagai jasad yang tidak bernyawa lagi.* Jadi menghilangkan asas Islam itu dari suatu organisasi Islam sama dengan membunuh organisasi atau Partai itu secara halus. Dan ini adalah *inkonstitusional,* tidak sesuai dengan UUD 1945 sendiri dan tidak sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam Piagam PBB.

"Dulu untuk memperjuangkan asas ciri Islam itu dalam Undang-undang Kepartaian sehingga bisa asas Islam masuk

sebagai asas ciri bagi PPP, maka K.H. Bisri Syamsuri, Rais 'Am NU menongkrongi dan menghadiri terus rapat-rapat itu 6 bulan sampai berhasil, agar jangan ada yang menyerah kepada kemauan lawan yang Islam Phobi." Demikian seorang anggota PB. NU kepada penulis. Tetapi sekarang, beda dengan K.H. Bisri, K.H. Ali Maksum menyerah ke Istana, menerima asas tunggal bagi Parpol, sehingga dengan sendirinya Islam sebagai asas ciri bagi Parpol Islam, tidak diizinkan lagi. Dengan begitu tamatlah riwayat Parpol Islam di Indonesia, yang selama ini dipertahankan mati-matian. Yang hanya boleh ada, Parpol yang berasaskan Pancasila saja.

Untuk menyerah dan mengibarkan bendera putih sebelum berjuang di gelanggang MPR itulah, Rais 'Am NU, K.H. Ali Maksum datang menghadap Presiden di Istana Cendana pada tgl. 28 September (Selasa) 1982 yang lalu bersama K.H. Masykur, K.H. As'ad Syamsul Arifin dan K.H. Machrus Ali dari Jawa Timur. (*Kompas*, 30-9-1982). Timbul pertanyaan: Mengapa mereka menyerah, padahal itu *baru gagasan, bukan Instruksi Presiden?* Mengapa tidak berjuang dulu di arena MPR? Karena, selain menandingi *mudahanahnya* Idham Chalid dengan Presiden, benteng NU telah *hancur berantakan dari dalam.* Karena itu lebih baik pagi-pagi angkat tangan dan mengibarkan bendera putih setinggi-tingginya.

Demikianlah kisah takluknya sebuah benteng raksasa. Dan bukankah Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa mundur dari perjuangan, *dosa besar!*

Dan kini (saat itu, red.) NU memiliki tiga wajah yang berlain-lainan. Satu wajah menghadap kepada PPP, satu wajah menghadap ke PDI dan satu wajah lagi menghadap ke GOLKAR, sedang Ketua Umumnya sendiri menjadi anggota lembaga tertinggi Negara, MPR dalam fraksi Golkar.

Benarlah Jenderal A.H. Nasution yang berkata: *"NU lazimnya tidak berprakarsa, tetapi lebih bersikap menyesuaikan diri."* (Memenuhi Panggilan Tugas, jilid 4, hal. 8).

5. Kembali kepada Khittah 1926

NU kini telah besar dengan berbagai cara dan kemudian ia kembali kepada khittah 1926 yang terkenal itu. Untuk mengetahui latar belakang Sejarah dan identitas NU, maka sebagai ilustrasi demi kebenaran sejarah itu sendiri, baiklah kita membaca laporan resmi pemerintah kolonial Belanda yang melukiskan situasi dan kondisi NU pada tahap awalnya itu sehingga kita dapat mengenal watak kepribadian serta sikap NU sejak ia mulai berdiri. Di bawah ini adalah suara gemuruh yang berkumandang dalam Kongres ke-1 NU pada tahun 1927 yang diadakan duapuluh satu bulan setelah lahirnya di Surabaya.

"Arsip kolonial dengan kode 261/X/28. Isi arsip melaporkan kongres NU di Surabaya 13 Oktober 1927 yang penuh dengan pidato-pidato yang *menjunjung* pemerintah Belanda sebagai pemerintah yang *adil, cocok* dengan *Islam,* dan patut *dijunjung* sepuluh jari. Sementara itu tokoh Islam yang menantang Belanda, (jelas yang dimaksud tokoh Syarikat Islam, Pen.) menurut laporan itu, dicaci-maki dan pantas dibuang ke Digul." (Tempo, 26 Desember hal. 23, Jakarta, 1987).

Dengan membaca laporan ini pengetahuan kita akan bertambah tentang NU dan fitrahnya. Bibit dan benih apa yang telah tumbuh atau ditanam orang pada tahun 1926 itu di bumi persada Indonesia Raya yang kita cintai ini sebagai reaksi atas kehebatan dan keberaniannya Syarikat Islam menantang pemerintah Belanda serta kemajuan Muhammadiyah yang sedang berkembang? Dengan demikian kita bisa menilai NU secara objektif berdasar data dan fakta sejarah yang nyata serta otentik. (Baca: Mr. A.K. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, hal. 92).

Semoga Allah SWT memberi hidayah dan taufiq kepada kita semua khususnya kepada generasi Penerus NU yang besar itu! Mudah-mudahan dia tidak takluk untuk selama-lamanya! Amien!

Tetapi setelah NU beralih ke bawah pimpinan Gus Dur, keadaan NU bertambah parah lagi. NU menjadi terpecah-pecah berkeping-keping. Ada NU PKB, ada NU PKU, NU PNU, dan ada pula NU Partai Suni. Dan sebelumnya ada NU yang masuk PPP, ada NU yang masuk Golkar, dan konon ada pula yang masuk PDI. Begitulah akibatnya kalau suatu partai tidak memiliki disiplin organisasi, orang bisa berbuat semau-maunya!

Dalam peristiwa Dungus, Jepara, Jum'at, 30 April 1999 yang memalukan itu, perpecahan itu telah meningkat menjadi bentrokan fisik di mana sesama warga NU telah saling membunuh satu sama lain sehingga 4 orang mati jadi korban sia-sia. Yaitu perkelahian antara kaum Nahdhiyyin PPP dan PKB. Dalam hal ini Ketua PB NU, Gus Dur tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab sebagai Pimpinan NU. Benarlah Rasulullah SAW. dalam sabdanya yang terkenal: *"Bila urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat kehancurannya."* (Al-Hadits).

Begitulah kalau umat Islam telah menyimpang dari pedoman perjuangannya, Al-Qur'an dan Sunnah, semua menjadi berantakan dan amburadul!

Na'udzubillah min dzalik!

MUHAMMADIYAH DAN 'AISYIYAH
Tempat Umat Menggantungkan Harapan

"Islam tak mungkin lenyap dari seluruh dunia, tetapi tidak mustahil Islam hapus dari bumi Indonesia. Siapakah yang bertanggung jawab?" (K.H. Ahmad Dahlan)

Muhammadiyah dilahirkan pada tgl. 18 November 1912 di Yogyakarta oleh K.H. Ahmad Dahlan, seorang tokoh yang waktu itu belum begitu dikenal namanya dalam kepemimpinan Syarikat Islam. Bahkan dalam urutan nama-nama tokoh Pimpinan Syarikat Islam itu namanya jauh di belakang Haji Umar Said Cokroaminoto. Di kalangan Syarikat Islam ia baru disebut sebagai guru agama Islam di Yogyakarta sebagai profesinya. Tetapi setelah ia mendirikan Muhammadiyah setelah adanya saling pengertian dengan HOS Cokroaminoto, maka barulah namanya mencuat ke atas dan makin lama makin harum semerbak ke seluruh Nusantara hampir menyamai keharuman namanya HOS Cokroaminoto sendiri.

Begitulah Muhammadiyah pada mulanya merupakan sayap moderatnya Syarikat Islam yang menitik-beratkan perjuangannya di lapangan sosial dan pendidikan agama, sedang Syarikat Islam menumpahkan perhatiannya dalam kegiatan politik melawan penjajahan kolonial Belanda. Begitulah keadaan berlangsung selama hayatnya K.H. Ahmad Dahlan; Muhammadiyah saling bekerja sama bahu-membahu menuju kejayaan Islam dan kaum Muslimin dengan Syarikat Islam, dan kedua

anggota teras organisasi tersebut pun saling berintegrasi baur-membaur sehingga sukar membedakannya.

Disiplin Organisasi

Tetapi setelah Syarikat Islam makin meningkatkan perjuangannya dan berubah menjadi Partai Politik Islam yang radikal dan progresif melawan penjajahan Belanda, maka SI memperketat disiplin organisasinya. Kalau dulu disiplin organisasi itu hanya dikenakan kepada Syarikat Rakyat dan PKI, maka kini ia memperluas disiplin itu kepada Muhammadiyah sendiri disebabkan Muhammadiyah dalam pandangan HOS Cokroaminoto dan Haji Agus Salim tidak sejalan dan tidak sehaluan lagi dengan SI, terutama setelah Muhammadiyah menerima subsidi dari pemerintah Belanda untuk kelangsungan hidup sekolah-sekolahnya yang banyak itu. Demikianlah pada tahun 1927, empat tahun setelah K.H. Ahmad Dahlan meninggal dunia (wafat 23 Februari 1923), sesuai dengan disiplin organisasi yang dikeluarkan Syarikat Islam dan sesuai dengan putusan Kongres Pekalongan (1927), maka para anggota SI dan Muhammadiyah disuruh memilih alternatif; apakah ia akan memegang kartu SI atau Muhammadiyah, sejak dari Pusat sampai ke Daerah-daerah. Dan disiplin SI tetap berjalan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetapi setelah kemerdekaan, tampaknya disiplin itu tidak dihiraukan orang lagi dan keadaan telah kembali seperti sediakala, para anggota SI dan Muhammadiyah telah rujuk dengan sendirinya, karena biduk lalu kiambang pun bertaut. Dengan demikian anggota-anggota SI dan Muhammadiyah banyak yang berbaur kembali dengan keanggotaan rangkap.

Makna Muhammadiyah dan 'Aisyiyah

Waktu Kiyai Haji Ahmad Dahlan dulu mengemukakan kepada kawan-kawannya bahwa beliau akan mendirikan suatu organisasi dengan nama "Muhammadiyah" ada yang terheran-heran, mengapa mengambil nama yang mirip dengan nama wani-

ta? Beliau menjelaskan bahwa itu bukan nama wanita tetapi artinya: pengikut Nabi Muhammadiyah SAW. Dan lima tahun kemudian, tepatnya tgl. 22 April 1917 berdiri pulalah *'Aisyiyah* di samping Muhammadiyah sebagai otonom dalam lingkungan Muhammadiyah selaku pendamping.

Sungguh tepat almarhum K.H. Ahmad Dahlan memberi nama organisasinya dengan nama "Muhammadiyah" walaupun ada *taknis* tetapi ada "ya" *nisbah*-nya. Artinya ialah, orang yang menjadi pengikut dan penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW dengan secara konsekuen dan konsisten. Jadi semua orang Islam yang menjadi pengikut agama Muhammad dan berjuang dalam jalur yang pernah digariskannya dalam Sunnah beliau, maka mereka itu berhak disebut orang-orang Muhammadiyah atau Muhammadiyyien. Dan di sini, terutama yang dimaksud adalah organisasi yang didirikan pada tgl. 18 November 1912 itu.

Tentu saja di waktu beliau mengambil nama Nabi besar itu menjadi sandaran nama organisasi, tidak lain yang dicita-citakan oleh beliau adalah munculnya di Indonesia ini manusia-manusia Muslim yang jiwanya diisi dan dihayati oleh semangat Islam yang dirisalahkan oleh Nabi Muhammad SAW itu untuk seluruh umat manusia yang beriman. Disamping itu agar wajah dan peta Indonesia disinari dengan cahaya Iman dan Islam sehingga kelak umatnya menjadi umat yang jaya dan mulia di sisi Allah dan di mata pergaulan internasional. Beliau mencita-citakan Indonesia Baru terlepas dari belenggu zaman jahiliah yang menyesatkan dan terbitnya fajar Islam yang sejati yang membawa bangsa Indonesia ke pintu gapura zaman Islam yang penuh dengan kebahagiaan lahiriah dan bathiniah di bawah lindungan Allah yang Maha Murah! Demikianlah K.H. Ahmad Dahlan telah bertekad memperjuangkan dan menyebar-luaskan Islam di Indonesia ini dengan merekam nama Nabi Allah Muhammad SAW sebagai *taruhannya* yang besar bagi MUHAMMADIYAH.

Dengan mengemban nama Nabi Muhammad sebagai organisasi, maka itu akan merupakan beban dan panggilan moril dan moral yang besar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh memperjuangkan dan membela Islam di bumi Indonesia ini yang terpikul di atas pundaknya kaum Muhammadiyyien sehingga cita-cita Islam berhasil dengan gilang-gemilang di tanah air yang kita cintai ini. Dan dengan *menisbatkan* dirinya kepada Muhammad SAW maka dengan sendirinya orang-orang Muhammadiyah harus mencontoh dan menyesuaikan dirinya dengan sifat-sifat mulia dan karakter yang kuat serta keberanian berjihad yang dimiliki Nabi Muhammad SAW itu tanpa kenal menyerah dan putus asa sampai Islam menang dan berjaya di muka bumi ini. Begitulah kiranya ide dan harapan pendiri dan Ketua Umum Muhammadiyah itu memilih nama Nabi yang agung menjadi nama organisasi tempat ia menabur bakti dan berjihad *lii'lai kalimatillahi hiyal 'ulya,* untuk keagungan citra kalimat Allah yang tinggi!

Sedang bagian wanitanya memilih nama 'AISYIYAH dengan menisbahkan diri kepada *Siti 'Aisyah* istri pendamping Rasulullah dalam berjuang. Pilihan ini juga tepat sekali, karena di antara para istri Nabi SAW yang dikawini beliau setelah istri pertama beliau wafat *Khadijah,* maka 'Aisyahlah istri beliau yang paling terampil dan yang paling alim di antara yang lain serta yang paling cantik. Siti 'Aisyah juga mempunyai rasa malu yang besar seperti yang dikehendaki agama terhadap seorang wanita dan kesetiaannya amat menonjol. 'Aisyah juga berani tampil ke medan laga untuk membela Islam dari serangan musuh-musuhnya. Karena itu dia dijuluki dengan: Ummul Mukminin wal Mukminat.

Di antara kebesaran moral dan sifat malunya yang menonjol marilah kita simak di bawah ini apa yang diceritakannya sendiri tentang soal kerapian beliau dalam berpakaian:

"Pada suatu ketika aku memasuki rumahku di mana Rasulullah dan ayahku sendiri dimakamkan; padahal aku melepas pakaianku. (Sebagaimana diketahui kedua orang beliau itu

dimakamkan berdampingan di rumah Siti Aisyah, Pen.). Dan aku berkata terhadap diriku sendiri: "Dia itu kan suamiku sendiri atau ayah kandungku." Tetapi tatkala Umar dikuburkan pula di situ bersama mereka, maka demi Allah, aku tidak pernah masuk lagi ke tempat itu kecuali aku berpakaian rapi karena malu rasanya kepada Umar." (Hadits riwayat Ahmad). (Baca: Mustafa Abu Yusuf Al-Hamamy, *Ghautsul 'Ibad bibayanir Rasyad, hal. 11).*

Perhatikanlah bagaimana rasa malunya demikian besar, walaupun di rumahnya sendiri yang biasanya wanita berpakaian kurang rapi, karena hawa panas umpamanya. Tetapi isteri Rasulullah yang shalihah itu tetap berpakaian serapi mungkin bila dia ziarah ke makam orang-orang suci Islam itu tidak lain karena di dalam rumahnya itu telah terdapat orang luar, walaupun ia sudah berada di dalam kubur sebagai orang ketiga yang tidak pantas melihat badannya yang dipandang 'aurat oleh orang lain. Umar bin Khaththab adalah orang ketiga yang dianggap "orang lain" dari segi agama oleh Siti 'Aisyah sehingga ia harus berpakaian rapi bila berada di kamarnya sendiri yang dipilih sebagai makam bagi orang-orang besar Islam yang amat besar jasanya itu.

Agaknya Nyai Dahlan (istri K.H. Ahmad Dahlan, wafat 1946) pendiri 'AISYIYAH itu berharap agar wanita-wanita muslimat yang tergabung dalam organisasi 'AISYIYAH akan meniru dan menjadikan sifat-sifat junjungan kaum Muslimin dan Muslimat itu sebagai panutan dan teladan kehidupan mereka sehari-hari: *tinggi dalam ilmu (agama dan umum) dan rapi dalam berpakaian seperti halnya dengan Siti 'Aisyah ra.!*

Begitulah keagungan dan keanggunan serta kehebatan Siti 'Aisyah, dan sebagai penghormatan kaum Muslimin kepadanya, maka tiga orang terbesar Islam itu (Muhammad Rasulullah SAW, Abubakar dan Umar bin Khaththab) dimakamkan oleh para shahabat di rumah ibu segenap kaum Muslimin dan Muslimat itu secara berderet dan berdampingan satu sama lain. Ya, berdampingan dalam perjuangan selagi hidupnya dan

berdampingan setelah wafat dalam makamnya. Tetapi setelah rumah suci itu dipugar demi perluasan Masjid Madinah, maka jadilah ketiga makam Rasulullah dan dua pendampingnya terletak di dalam Masjid Madinah Al-Munawwarah yang besar dan berseri-seri serta mengagumkan itu.

Asas dan Tujuan

Asas dan Tujuan adalah sesuatu yang amat vital dan prinsipal dalam sesuatu organisasi. Dalam asas dan tujuan itu terbayanglah wujud dan corak serta mutu organisasi tersebut. Dengan melihat asas dan tujuan itu orang dapat melihat sifat dan wataknya apakah ia bercorak sekuler duniawiah ataukah bercorak agama yang mengutamakan nilai-nilai rohani yang mulia.

Demikianlah Muhammadiyah dan 'Aisyiyah telah memilih dasar atau asas dan tujuan organisasinya dengan tepat sekali sesuai dengan aspirasi Umat Islam Indonesia: *ISLAM dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.* (Anggaran Dasar Pasal 2 dan Pasal 3).

"ASAS" berasal dari bahasa Arab dan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan: *Dasar, Prinsip* dan *Fondamen* atau *Pondasi.* Makin kukuh dan kuat asas pondasi sebuah bangunan semakin kukuhlah gedung itu berdiri di permukaan bumi. Dan semakin besar dan gagah suatu bangunan raksasa haruslah asasnya makin dalam terhunjam *ke bumi* agar jangan cepat rubuh dilanggar gempa yang dahsyat. Pada fondamen itu terletak kekuatan dan kelestarian sesuatu bangunan tersebut. Demikian juga dengan organisasi. Asas adalah merupakan roh atau jiwanya sesuatu organisasi dan dari sinilah bersumber gerak dan sepak-terjang sesuatu organisasi untuk mencapai tujuannya yang mulia itu. Asas dan tujuan itu harus sejalan dan paralel pula, dan tujuan tidak boleh menyimpang dari Asas yang paling prinsip dari sesuatu organisasi. Dari itu asas tidak boleh diganti; mengganti asas berarti merombak organisasi itu secara keseluruhan. Mengganti Asas berarti mengganti organisasi

dengan organisasi yang baru dengan asas yang baru pula. Ya, mengganti asas yang lama dengan asas yang baru, sama dengan mengganti nilai yang lama yang telah menyemarakkan organisasi, dengan nilai yang datang kemudian yang jauh lebih rendah daripada nilainya yang lama, yaitu Islam.

Bila ada pikiran-pikiran ke arah yang negatif itu, maka itu bukan merupakan suatu kemajuan, tetapi malah menjadi mundur jauh ke belakang, kembali kepada abad-abad yang silam, zaman Majapahit di mana nenek moyang kita masih dininabobokkan oleh zaman jahiliyahnya yang gelap-gulita. Na'udzubillah min dzalik!

Mungkin ada orang yang mengatakan, bahwa mengganti Asas Islam dengan asas yang baru yang sekuler itu hanyalah sekedar *taktik* belaka. Tetapi orang jangan lupa bahwa dalam ilmu berjuang sudah ada kaidah, bahwa sesuatu yang *amat prinsip* tidak boleh dikalahkan oleh taktik atau strategi apa pun dan dalam keadaan bagaimanapun dan dengan dalih apa pun jua. Dan sikap yang seperti itu dalam ilmu taktik dan strategi diberi julukan dengan "harakiri" yang hina-dina dan amat tercela dalam pandangan agama kita. Itu adalah sikap orang yang telah putus-asa yang telah menaikkan bendera putih sebelum berjuang sebagai pertanda suatu *kapitulasi*. Akibat sampingnya sukar dipertanggungjawabkan dalam sejarah.

Jangan hendaknya kita terpengaruh dengan perumusan baru dari MUI yang mengaburkan pengertian, bahwa MUI berasas Pancasila dan beraqidah Islam seperti apa yang telah diputuskan oleh Muker mereka baru-baru ini. Ini sesungguhnya adalah suatu perumusan yang aneh sekali. Bagaimana mungkin orang bisa memisahkan akidah dengan asas? Tidak mungkin, bila orang bicara dari pandangan Islam yang murni. Karena dalam pandangan Islam, bahwa aqidah itu adalah suatu keyakinan dan asas Islam pun suatu keyakinan yang tidak bisa dipisah-pisahkan bagai tubuh dengan nyawa. Jadi kalau dia orang Islam yang hakiki, bukan Islam rupa (Shurah), maka bila dia beraqidah Islam mestilah dia juga berasas Islam, tidak boleh lain. Begitu

pula sebaliknya. Jadi adalah aneh bin ajaib bila orang mengatakan bahwa ia beraqidah Islam tetapi berasaskan Pancasila seperti MUI itu. Karena bagaimana mungkin orang menganut dan menyimpan dua keyakinan yang berbeda dalam satu kalbu atau dadanya. Itu adalah perumusan yang *mudzabdzab* alias nifak. Allah SWT sendiri telah memperingatkan dengan tegas dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya: "*Ma Ja'alallahu Lirajulin min Qalbaini fi Jaufihi*". *(Allah tidak menjadikan dua buah hati (keyakinan, asas) dalam rongga dada seseorang!).* (Al-Qur'an, Al-Ahzab ayat 4).

Jadi bila Muhammadiyah/'Aisyiyah menukar asasnya dengan yang baru, maka ia bukan lagi merupakan Muhammadiyah yang asli lagi seperti yang diwariskan dan dititipkan oleh pendirinya sendiri, K.H. Ahmad Dahlan. Ia tidak merupakan organisasi agama lagi, tetapi suatu organisasi sekuler yang berasaskan sekuler pula. Dan barangkali juga siapa tahu, almarhum sang pendiri, memprotes dari balik batu-nisannya sebagai perbuatan yang tidak diridhai Allah karena tidak bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Dan juga tidak pantas dan relevan lagi menyandarkan diri kepada nama suci Nabi Muhammad Rasulullah dan istri beliau Siti 'Aisyah, karena ia telah menjadi Muhammadiyah yang imitasi, tidak murni dan asli lagi. (Kita berdoa semoga hal ini tidak terjadi!). Ya kita tidak mau disebut kaum *renegat!*

Tetapi sayang, ternyata Muhammadiyah mengikuti langkah NU, menegakkan bendera putih dengan menghapus Islam sebagai Asas dari Bab II Anggaran Dasarnya. Dengan begitu benteng Muhammadiyah telah takluk pula. Suatu tragedi yang menyedihkan. Begitulah putusan Muktamar ke-41 di Solo itu. Tetapi apakah itu tidak berdosa? Nabi Muhammad memperingatkan umatnya, bahwa mundur dari perjuangan membela Islam adalah dosa besar. Dan apakah mereka tidak merasa *malu* menamakan dirinya Muhammadiyah alias pengikut Nabi Muhammad? Padahal agama Muhammad (Islam) telah mereka coret sebagai Asas organisasinya!

22 JUNI YANG "KERAMAT"

"Jangan lupakan sejarah, agar tak jadi bangsa kerdil!"
(Presiden Soeharto)

Tiap-tiap negeri mempunyai tanggal atau hari yang keramat yang tidak bisa dilewatkan begitu saja bagi rakyatnya. Demikianlah Indonesia mempunyai dua tanggal yang sama keramatnya untuk diperingati karena amat pentingnya dari segi sejarah perjuangan bangsa itu sendiri dalam mencapai cita-citanya. Pertama, 22 Juni hari jadinya Jakarta; dan kedua, 22 Juni hari lahirnya Piagam Jakarta yang menjadi sumber dari segala sumber kemerdekaan Indonesia.

Sebab Bernama Jakarta

Perubahan dari nama lama Sunda Kelapa kepada nama baru: Jakarta, adalah mempunyai sejarah yang mengasyikkan sekali yang kurang diungkapkan orang ketika rakyat Jakarta memperingati hari jadi kotanya itu.

Syahdan, di waktu Kerajaan Malaka ditaklukkan oleh penjajah Portugis pada tahun 1511, sebelas tahun kemudian tentara Portugis itu menuju Aceh untuk menghancurkan Kerajaan Aceh, *Pasai.* Pada tahun 1522 Pasai ditaklukkannya pula. Tetapi seorang pemuda yang alim yang kemudian terkenal dengan nama *Fatahillah* dengan rasa sedih melihat negerinya yang sudah porak-poranda, segera berangkat ke tanah suci Makkah, untuk menunaikan Ibadah Haji dan kemudian menuntut ilmu agama di sana.

Setelah pengetahuannya bertambah dalam, dia kembali ke Indonesia dengan singgah sebentar di Sumatera Utara dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke Jawa, karena di sana ada Kerajaan Islam Demak yang sedang berjaya menggantikan Kerajaan Majapahit yang runtuh pada tahun 1478. Ia mendarat di Jepara yang waktu itu merupakan pelabuhan bagi Demak.

Untung baik, pemuda alim yang baru datang dari tanah suci itu diambil menantu oleh Sultan Demak dan dinikahkan dengan adiknya Sultan Trenggono.

Rupanya pemuda Aceh itu bukan saja ahli Dakwah Islam, tetapi juga seorang Mujahid (pejuang). Demikianlah dia mengingat di mana beradanya musuh Islam bebuyutan, Portugis, yang pernah menghancurkan negerinya dulu, kini dia ingin membalas kekalahan itu.

Dia bergerak menuju Sunda Kelapa melalui Banten dengan mempergunakan kekuatan gabungan tentara Islam Demak dan Banten untuk bersama-sama menghancurkan kafir Portugis yang zalim itu. Disamping itu niatnya yang lebih suci ialah untuk mengembangkan Dakwah Islam di bagian bumi Jawa sebelah Barat yang waktu itu diperintah oleh Raja Pajajaran.

Demikianlah pada tahun 1527 Fatahillah sampai di Sunda Kelapa dan kemudian terjadilah pertempuran yang seru antara dua tentara yang berlainan agama. Tentara Demak-Banten di bawah Panglimanya Fatahillah yang mengibarkan bendera Islam melawan tentara kafir Portugis yang ingin menjajah Indonesia yang makmur itu. Akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh tentara Islam sedang tentara kafir Portugis dapat dipukul ke laut dan kembali ke negerinya. Itulah kemenangan Fatahillah yang pertama.

Misinya yang kedua ialah memenangkan Islam dalam bidang Dakwah, yakni ingin mengislamkan pejabat-pejabat di Sunda Kelapa dan terutama Rajanya sendiri. Al-Hamdulillah, dengan segala kebijaksanaan beliau menyampaikan dakwahnya akhirnya beliau pun berhasil mengislamkan penduduk Sunda Kelapa dengan berbondong-bondong menganut agama Islam.

Dan kemenangan dalam dua medan itulah (medan *jihad* menghalau Portugis dan medan *Dakwah* mengislamkan penduduk Sunda Kelapa), maka dinamakannyalah kota itu kemudian dengan *"Fathan Mubina"* (Kemenangan yang gilang-gemilang). Atau dalam bahasa Sansekertanya "Jayakarta" dan kemudian dipersingkat menjadi *"Jakarta"*. Peristiwa itu terjadi pada tgl. 22 Juni 1527 dan sejak itu kota Jakarta ini menjadi basis Islam yang tangguh di Jawa bagian Barat ini sampai kini.

Dan setelah keberhasilan itu, beliau pindah berdakwah ke Cirebon dan berjuang di sana sampai akhir hayatnya. Beliau termasuk salah seorang Wali Songo, yang terkenal dengan nama *Sunan Gunung Jati.*

Piagam Jakarta

Tak usah diragukan lagi bahwa Jakarta adalah kota sejarah yang berjasa dan banyak menyimpan peristiwa-peristiwa penting yang patut dikenang oleh bangsa Indonesia. Antara lain lahirnya *PIAGAM JAKARTA.*

Beberapa bulan sebelum bom atom Amerika meledak di Hiroshima dan Nagasaki pada tgl. 6 dan 9 Agustus 1945 yang memusnahkan ratusan ribu manusia Jepang, maka di Jakarta para pemimpin Indonesia telah bersiap-siap untuk menyongsong kemerdekaan dengan membentuk *Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)* yang berangota 62 orang yang dilantik pada tgl. 28 Mei 1945 yang diketuai oleh Dr. Radjiman Wediodiningrat. Dalam suatu pidato pembukaannya yang ringkas dalam sidang tgl. 29 Mei 1945, Dr. Radjiman bertanya kepada para anggota: negara yang akan kita bentuk itu *apa dasarnya?*

Dalam kenyataannya dalam sidang BPUPKI terdapat dua kubu yang berbeda tajam. Kubu Islam semuanya menghendaki *negara Islam* dan kubu Nasionalis menghendaki *negara yang bebas dari pengaruh agama.* Sidang yang berlangsung sampai 1 Juni itu belum berhasil mencapai kompromi. Setelah Bung Karno berpidato hampir satu jam, Dr. Radjiman membentuk

Panitia kecil yang terdiri dari semua aliran; dan kemudian Panitia kecil itu menunjuk sembilan orang yang akan merumuskan isi pidato Soekarno itu sebagai kompromi. Rumusan kompromi itu mereka namakan dengan "PIAGAM JAKARTA" yang ditanda-tangani oleh sembilan orang yang mencerminkan aliran Islam, Nasionalis dan Kristen pada tgl. 22 Juni 1945. Itu pun setelah Bung Karno merayu-rayu dengan kata-kata antara lain berbunyi: *"Saya minta dengan rasa menangis, rasa menangis, supaya sukalah Saudara-saudara menjalankan offer (pengorbanan- Red.) ini kepada tanah air dan bangsa kita, pengorbanan untuk keinginan kita, supaya kita bisa lekas menyelesaikan, supaya Indonesia merdeka lekas damai."*

Yang menyebabkan kubu Islam mengendurkan tuntutannya atas negara Islam adalah kalimat-kalimat penting dalam alinea empat yang berbunyi *"...dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya;"...*

Inilah kalimat-kalimat yang "keramat" dan sakral itu!

Tetapi menurut Prof. Hazairin, umat Islam bila mau menegakkan negara Islam tidak perlu kepada Piagam Jakarta dan UUD 1945. *"Cukup dengan Qur'an saja untuk mendirikan Negara Islam."* (Prof. Dr. Hazairin S.H., Demokrasi Pancasila, halaman 60, Tintamas, Jakarta 1970). Namun tak dapat disangkal bahwa Piagam Jakarta itulah bentuk kompromi maksimum yang dapat dicapai oleh kedua kubu yang bertarung sengit itu.

Prof. Dr. Supomo mengatakan bahwa Piagam Jakarta itu merupakan "Perjanjian Luhur", sedang Dr. Sukiman menyebutnya dengan *"Gentlemen Agreement"*; Mr. Muhammad Yamin menamakannya dengan *"Jakarta Charter"*, dan Prof. Dr. Drs. Notonagoro S.H. menjuluki Piagam Jakarta sebagai *"suatu perjanjian moril yang sangat luhur."* Pendeknya suatu perjanjian bersama yang sangat agung yang diwujudkan di saat-saat yang genting dan menentukan bagi nasib bangsa Indonesia. (Baca: Prof. Dr. Drs. Notonagoro S.H., Pancasila Secara Ilmiah Populer, hal. 69 Cetakan Ketiga, Pancuran Tujuh, Jakarta, 1975).

Demikianlah mulianya Piagam Jakarta di mata para ahli Hukum Indonesia dan Intelektual kita yang jujur.

Gertak-tipu atau Ultimatum?

Tetapi sayang beribu sayang, perjanjian moril yang sangat luhur itu hanya berumur 56 hari saja, karena satu hari setelah Proklamasi, Piagam itu telah dicoret oleh mereka yang kurang menghayati isi dan makna Piagam itu. Timbul pertanyaan: di mana terletak moral dan etika politik yang tinggi?

Tanggal 17 Agustus 1945 sore hari belum sampai duabelas jam Proklamasi dikumandangkan ke seluruh dunia, datang telepon dari seorang Jepang pembantu Laksamana Maeda, bahwa sebentar lagi akan datang menemui Bung Hatta seorang opsir angkatan laut Jepang. Hatta lupa nama opsir Jepang itu. Sang opsir menyampaikan pesan seorang tokoh Nasrani dari Indonesia Timur, bahwa tokoh Nasrani itu keberatan dengan delapan kata yang jelas tercantum dalam Piagam Jakarta, yakni "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Kalau itu masih tercantum, kaum Nasrani di bagian Timur Indonesia akan keluar dari Republik Indonesia. Bung Hatta yang terkenal jujur itu tidak sempat berpikir panjang. Mengapa setelah rumah sudah jadi tokok masih berbunyi lagi? Padahal besok harinya tgl. 18 Agustus akan ada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta mensahkan Undang-undang Dasar yang rampung disusun oleh BPUPKI.

Pagi-pagi sebelum sidang PPKI dimulai Bung Hatta mengumpulkan tokoh-tokoh Islam, Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Hasan. Tampaknya yang paling penting mereka garap adalah Ki Bagus Hadikusumo yang tertua di antara mereka itu. Yang ditugaskan meyakinkan Ki Bagus adalah Mr. Teuku Hasan dari Aceh. Tetapi menurut sumber lain, sebelum T. Hasan menemui Bagus, juga lebih dulu dipertemukan dengan Bung Karno dalam kamar terpisah. Nah Teuku Hasanlah yang turut berperan untuk

meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo supaya beliau itu rela untuk menghapus tujuh kata (menurut ejaan Bahasa Indonesia yag baru delapan kata, karena pemeluk-pemeluknya sudah dihitung dua kata, Pen.), seperti yang dikehendaki tokoh Nasrani tertentu itu.

Maka akhirnya dalam sidang kecil yang berlangsung kurang dari 15 menit itu berakhirlah riwayatnya delapan kata yang sakral itu lenyap dari halaman Piagam Jakarta. (Baca: Mohammad Hatta, Memoir, hal. 460).

Timbul pertanyaan, mengapa dengan mudah mencoret suatu Piagam yang dihasilkan oleh sidang-sidang yang berkali-kali dengan mengeluarkan tenaga dan konon air mata? Mengapa mereka mau terperangkap oleh siasat *gertak-tipu* seorang tokoh Nasrani yang bermain di belakang layar yang berbentuk *Ultimatum* akan memisahkan diri dari Republik Indonesia? Dicoret atau tidaknya delapan kata yang amat sakral itu, mereka pasti akan mendirikan negara lain dari Republik, yang ternyata kemudian tegaknya Negara Indonesia Timur *(NIT)* yang dibentuk dalam Konperensi Denpasar (7-8 Desember 1946) oleh bos mereka, *Van Mook.* Yang penting bagi mereka tujuannya telah tercapai, yaitu *Deislamisasi* yang secara implisit terselip dalam siasat pencoretan delapan kata yang suci itu. Tetapi apa mau dikata, nasi telah menjadi bubur. Maka waktu Bung Hatta mengumumkan dicoretnya delapan kata yang amat vital itu dalam sidang PPKI yang hanya berlangsung satu kali itu, ada anggota yang bertepuk riuh dan ada anggota yang diam membisu. Mengapa tidak protes?

Kaum Nasionalis memuja-muja tokoh Islam yang toleran itu. Tetapi apa benar itu toleransi atau *kapitulasi?* Saya berpendapat, hal itu adalah toleransi yang semu dan yang jelas itu adalah suatu *kapitulasi* yang memalukan. Yang lihai adalah pemain di belakang layar yang membuat ultimatum kepada Hatta dengan mempergunakan tangan ketiga, seorang opsir Jepang yang sudah tidak berkuku lagi karena Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Liciknya ialah, justru di saat-saat sidang Panitia Persiap-

an Kemerdekaan beberapa saat lagi akan memulai sidangnya di Pejambon; sedang tokoh-tokoh Islam menganggap dan merasa bahwa persoalan tentang Piagam telah lama selesai dan tokoh Nasrani, A.A. Maramis, turut dengan tulus menandatangani perjanjian bersama itu. Mestinya sebagai pejuang, tokoh-tokoh Islam yang duduk dalam PPKI itu protes keras, bukan berdiam diri seribu bahasa.

Tak ada suatu buku di Indonesia yang menjelaskan siapa gerangan yang memberi ultimatum supaya delapan kata yang keramat itu dicoret, dan dalam buku Bung Hatta sendiri pun tidak ada. Sampai tahun 1984 tokoh itu masih misterius bagi sejarawan maupun politisi. Barulah setelah Cornell University di Amerika Serikat menerbitkan sebuah buku tentang Indonesia, barulah kita mendapat informasi, bahwa tokoh itu bernama Dr. Sam Ratulangi yang disebut sebagai *an astute Christian politician from Manado, North Sulawesi."* hal. 7. Artinya, seorang politisi Kristen yang licik dari Manado, Sulawesi Utara. Dan selaku orang yang dekat dengan perwira Jepang, maka ia demikian pandainya mempergunakan kesempatan itu dengan "baik" untuk kepentingan politiknya.

Mengapa KI BAGUS?

Mengapa yang digarap oleh kaum nasionalis (Soekarno-Hatta-T. Hasan) adalah Ki Bagus Hadikusumo, bukan para penandatangan Piagam Jakarta seperti H. Agus Salim, Abikusno, Abdul Kahar Muzakir dan Mr. Muh. Yamin? Dan mengapa ketua kelompok Islam dalam BPUPKI sendiri, K.H. Masykur tidak diajak berunding? Jawabnya mudah, mungkin mereka menganggap bahwa tokoh-tokoh yang tersebut belakangan ini adalah tokoh-tokoh berat, konsekuen dan konsisten, tidak gampang mengubah pendiriannya dalam tempo hanya 15 menit. Sedang Ki Bagus dari Muhammadiyah dianggap moderat, tidak seberat tokoh-tokoh tersebut di atas; apalagi beliau diyakinkan dari luar (T. Hasan) dan dari dalam sendiri (Mr. Kasman

Singodimedjo) sehingga beliau yang jujur itu mudah menyerah. Tetapi yang mengherankan adalah Mr. Kasman, beliau itu adalah seorang perwira bahkan Komandan PETA pada waktu itu; mengapa beliau turut menyerah dan mengajak Ki Bagus supaya menerima saja bujukan kaum Nasionalis Sekuler untuk mencoret delapan kata yang terpenting itu? Sebagai seorang ahli strategi dan taktik, dia seharusnya paham siasat lawan yang ingin melangkah kepada *Deislamisasi.* Dia terbuai oleh pidato Soekarno pada tgl. 1 Juni yang menggambarkan kemenangan Islam dalam Pemilu sehingga Dewan Perwakilan Rakyat beramai-ramai diduduki oleh wakil-wakil Islam. Rupanya beliau salah hitung!

Tentang K.H. Wahid Hasyim, beliau terlalu muda waktu itu, karena umurnya pada tahun 1945 itu baru sekitar 32 tahun, belum matang dalam politik. Karena itu kesalahannya tidak terlalu berat. Wahid Hasyim (1913-1953).

Yang patut dipuji adalah Mr. Muh. Yamin, walaupun dia termasuk kubu kaum Nasionalis, namun dia menganggap masalah Piagam Jakarta sudah final, tidak boleh diganggu-gugat lagi, terbukti beliau mencantumkan *seutuhnya* isi seluruh kalimat Piagam itu dalam bukunya *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia* dalam halaman 17 yang terbit enam tahun setelah Proklamasi kemerdekaan. (Djambatan, 1951-1952).

Dan di antara penandatangan Piagam Jakarta adalah Prof. Abdul Kahar Muzakir. Beliau pernah menyatakan kekecewaannya kepada Penulis, karena ia samasekali tidak diajak berunding, tiba-tiba ia mendengar Piagam suci itu telah dicoret orang. Padahal beliau turut memeras keringat dan tenaga siang dan malam untuk dapat mewujudkan Piagam Jakarta itu. Pencoretan Piagam itu sudah *tidak* merupakan pendidikan politik yang baik bagi rakyat, terutama bagi generasi penerus. Dalam pidato beliau dalam sidang Konstituante di Bandung dia melepaskan kekesalan hatinya dengan kata-kata antara lain: *"Apa lacur 18 Agustus 1945"*; maksud beliau adalah pencoretan delapan kata

yang paling bernilai kompromis itu yang dilakukan dan disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal tersebut.

Korban Toleransi

Toleransi atau kapitulasi tokoh-tokoh Islam dalam pencoretan Piagam Jakarta itu mempunyai dampak yang luas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari Pusat sampai ke daerah, rakyat ternyata tidak puas karena merasa dikhianati dan negara menjurus kepada sekularisme dan Deislamisasi.

Di daerah-daerah timbul pemberontakan-pemberontakan yang sahut bersahut dari satu daerah ke lain daerah. Dimulai dari Darul Islam Jawa Barat yang meletus 7 Agustus 1949. Sulawesi Selatan (Kahar Muzakkar) 1952, Kalimantan Selatan (Ibnu Hajar) 1953, Aceh (Tengku Daud) 1953 dan PRRI/PERMESTA (Syafruddin/Samual) 1958. Pemberontakan-pemberontakan itu selain sebagai bentuk ketidakpercayaan rakyat kepada Pemerintah juga merupakan peringatan dari Allah SWT sendiri. Mengapa suatu Piagam Jakarta yang menyebut-nyebut nama Allah mudah saja dihapus dan dikhianati? Itu berarti ingkar janji. Dan Allah tidak senang kepada orang yang mengkhianati dan mengingkari janjinya. Allah berfirman:

> "*Penuhilah janjimu, karena sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabnya kelak.*" (Al-Qur'an Al-Isra': 34).

Toleransi menurut *Sunnah* Rasul hanyalah setelah Islam menang. *Barangsiapa yang menganiaya Dzimmi sama menganiaya diriku.*" kata Nabi.

Banyaknya korban yang jatuh dalam perang di kedua belah pihak sudah menjadi rahasia umum. Dan khususnya kepada kaum Muslimin korban toleransi dari segi ideologi, politik dan kebudayaan masih terasa berlanjut sampai kini. Rupanya sekali mereka dikasih hati untuk mencoret Islam, mereka belum puas sebelum sampai ke akar-akarnya. "*Kaum Yahudi dan Nasrani itu tidak pernah akan senang kepadamu sebelum kamu*

mengikuti agama (sikap hidup) mereka." (Al-Qur'an, Al-Baqarah: 120).

Sejak sidang MPR 1983 yang menerima asas tunggal, tamatlah riwayatnya Partai Islam sampai kini. Bahkan semua Parpol dan Ormas Islam harus mencoret Islam dari Anggaran Dasar organisasi mereka. Dan kini tidak ada lagi sebuah surat kabar Islam yang terbit di Indonesia walaupun pembacanya sebagian besar umat Islam. Sedang surat kabar yang dipimpin oleh orang-orang Katholik dan Protestan mempunyai oplag paling besar dan tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Jadi sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah dua kali kaum Nasionalis mencoret Islam. Pertama pada Piagam Jakarta dan kedua, pada Parpol dan Ormas Islam itu sendiri. Terkenanglah saya kepada peringatan almarhum K.H. Ahmad Dahlan Ketua Umum PB. Muhammadiyah: *"Islam itu mustahil lenyap di dunia, tetapi tidak mustahil dari bumi Indonesia."* Dan kini Islam itu telah lenyap dari Bab II Anggaran Dasar Muhammadiyah sendiri, demi toleransi atau kapitulasi. Kemudian diganti dengan asas yang *sekuler* (Pancasila). Apa itu tidak berdosa?

Di antara korbannya toleransi adalah banyaknya umat Islam yang masuk Kristen baik di Jawa maupun Sumatera. Seorang pejabat tinggi menceritakan nasib umat Islam di Jawa Tengah di sebuah desa dekat Klaten. Beliau mengatakan seluruh penduduk desa yang mulanya Muslimin, murtad berbondong-bondong masuk Nasrani kecuali *Lebai* di desa itu. Demikian juga halnya di desa *Rehobot* di daerah Cirebon hampir seluruh penduduk desanya masuk Kristen pula.

Di Kabupaten *Pasaman* dan *Sitiung* telah berkembang biak pula agama Kristen. Padahal Sumatera Barat dahulunya terkenal ke mana-mana sebagai benteng Islam, gudangnya ulama dan guru-guru agama Islam. Sekarang benteng itu telah tembus demi toleransi. Karena itu masih adakah juga orang yang berani mengatakan bahwa umat Islam di Indonesia 90% dari jumlah penduduknya? Padahal dulu di Sumbar *susah* mencari seorang Nasrani di desa.

Kalau benar kita mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad *(Muhammaddiyien)* yang sejati dan beriman tangguh, dalam menghadapi perjuangan *to be or not to be*-nya Islam di bumi Indonesia tercinta ini, mestinya para tokoh Islam tak gampang terjebak oleh perangkap "Toleransi" yang sengaja dihembus-hembuskan oleh pihak luar. Mereka harus cepat berpegang dan ingat kepada firman Allah yang berbunyi:

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. ﴿الفتح: ٢٩﴾

"Muhammad itu Rasul Allah dan para pengikutnya bersikap keras terhadap kaum kafir dan ramah-tamah antara sesama mereka." (Al-Fath: 29).

Dan perlu dihafal dan dihayati serta diamalkan surat At-Taubat dan At-Tahriem ayat-ayat 73 dan 9 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ. ﴿التحريم: ٩﴾

"Wahai Nabi, berjihadlah menghadapi kaum kafir dan munafik itu dan bersikap keraslah terhadap mereka! Tempat mereka adalah di neraka dan neraka seburuk-buruk tempat kembali."

Karena pentingnya ayat ini, Allah SWT mengulanginya dua kali persis dengan lafal dan bunyi yang sama.

Di zaman revolusi dan setelah revolusi selesai, cukup banyak tokoh-tokoh Islam dari berbagai Partai Islam yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan, tetapi mereka mengangkat kader-kader yang bukan dari Partai Islam menduduki pos-pos penting dalam Kementerian-kementerian, baik civil maupun militer. Itu semua demi toleransi. Tetapi setelah mereka turun dari kursinya barulah terasa penyesalan karena banyak "korban" yang ditimbulkannya. Banyak yang heran

tentang kebijaksanaan yang demikian itu, di antaranya adalah wakil Presiden Adam Malik (almarhum) dalam bukunya *"Mengabdi Republik"*. Kalau mereka mengangkat kader-kader Islam tentu sejarah akan berjalan lain dari apa yang kita lihat sekarang ini.

Awal toleransi besar yang tidak pada tempatnya itu adalah pencoretan delapan kata yang suci itu dalam PIAGAM JAKARTA yang ternyata kemudian merupakan *tragedi nasional*, terutama bagi kaum Muslimin.

Dalam hal ini yang harus disayangkan dan dikasihani adalah Bung Hatta dan Ki Bagus Hadikusumo yang telah menjadi korban kejujurannya sendiri karena terjebak oleh siasat musuh dalam selimut yang berselubung dalam kubu nasionalis dalam *Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).* Ya, seorang yang dapat dipandang sebagai *"troublemaker"*, karena permainannya jelas *tidak fair*, amoral. Adapun korban dalam *perkawinan* amat menyedihkan, sejak dari anak Raja, anak pejabat tinggi dan anak orang awam.

5 Juli Dekrit Presiden

Sidang Konstituante 1959 di Bandung mencapai kegagalannya untuk menentukan Dasar Negara RI, di samping itu penderitaan rakyat terutama di daerah-daerah dan desa-desa bertambah parah. Untuk mencari jalan keluar, pemerintah menganjurkan kepada DPR dan Konstituante supaya kembali kepada UUD 1945 pada 21 Februari 1959.

Waktu angin Dekrit sudah mulai terasa berhembus sepoi-sepoi, saya sengaja menyempatkan diri datang menemui Sdr. K.H. Idham Chalid di kantor Wakil Perdana Menteri di Pejambon. Saya katakan kepada Sdr. Idham bahwa naga-naganya akan keluar Dekrit Presiden untuk menembus jalan buntunya Konstituante. Benteng pertahanan kita umat Islam hanya tinggal satu, PIAGAM JAKARTA. Haraplah Sdr. berjuang agar Piagam itu termasuk dalam Dekrit Presiden nanti! Itulah antara lain usul saya kepada Sdr. Wakil Perdana Menteri tersebut. Dan

alhamdulillah usul itu mendapat perhatian dari beliau dan beliau tampaknya berjuang sekuat tenaga untuk itu sehingga berhasil. Terbukti waktu Perdana Menteri Djuanda berpidato sebelum keluarnya Dekrit Presiden, Djuanda menekankan bagaimana pentingnya Piagam Jakarta itu sebagai pengemban amanat penderitaan rakyat. Perdana Menteri berkata antara lain seperti ini:

"Amanat penderitaan rakyat itulah yang menjiwai Piagam Jakarta, yang pada tgl. 22 Juni 1945 ditandatangani oleh 9 orang.

"Piagam Jakarta ini memuat lengkap amanat penderitaan rakyat yang saya sebutkan tadi, yaitu: satu masyarakat yang adil dan makmur, satu negara kesatuan yang berbentuk Republik, satu badan permusyawaratan perwakilan rakyat.

"Piagam Jakarta adalah suatu "dokumen historis" yang memelopori dan *mempengaruhi* pembentukan Undang-undang Dasar 1945."

"Jika kita memandangnya sebagai "dokumen historis", maka kita harus mempertahankan Undang-undang Dasar itu dalam *keseluruhannya,* yaitu dengan lengkap Pembukaannya..."

(Menurut Mr. Muhammad Yamin "Piagam Jakarta itulah yang menjadi Mukaddimah (preamble) Konstitusi Republik Indonesia serta Undang-Undang Dasar 1945, disusun menurut filosofi-politik yang ditentukan di dalam piagam persetujuan itu"). (Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, hal. 20, Cetakan Kedua, Jakarta 1952).

Seterusnya Perdana Menteri mengakui terus-terang pentingnya mendekati umat Islam dengan kata-kata antara lain berbunyi: *"Untuk mendekati hasrat golongan-golongan Islam, berhubung dengan penyelesaian dan pemeliharaan keamanan, diakui adanya 'PIAGAM JAKARTA' tertanggal 22 Juni 1945..."*

"Hal ini dapatlah tercapai, Insya Allah, dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dan menurut hemat saya, jalan

itu dapat disetujui oleh umat Islam dengan diakuinya secara *ikhlas* akan adanya Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945, yang mendahului Undang-undang Proklamasi 17 Agustus 1945.

"Pengakuan itu jelas tidak bersifat *insidentil.*" Pidato Perdana Menteri Djuanda itu diucapkan di muka forum Konstituante Bandung pada awal Maret 1959 sebagai pokok pikiran dan isyarat akan lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Isi Dekrit

Dekrit Presiden yang diumumkan di Jakarta tanggal 5 Juli 1959 itu diawali dengan kalimat "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa... seterusnya menyatakan dengan khidmat...." Dekrit ini terdiri dari delapan alinea dan yang terpenting alinea kelima yang berbunyi seperti ini:

"Bahwa kami berkeyakinan bahwa *Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkain kesatuan dengan konstitusi tersebut.*"

Bila kita teliti Dekrit itu memang ada unsur positif dan negatifnya. Negatifnya ia membawa Presiden menjadi seorang diktator dalam demokrasi terpimpin. Dan positifnya ialah pulihnya kembali seutuh-utuhnya dan semurni-murninya Piagam Jakarta seperti semula tanpa coretan-coretan lagi. Dalam Dekrit jelas tanpa diragukan lagi bahwa Piagam Jakarta itulah yang memberikan roh dan menjiwai UUD 1945. Tanpa adanya Piagam Jakarta sebagai roh dan jiwa UUD 1945, maka UUD 1945 itu akan merupakan mayat tak berjiwa. Yakni UUD 1945 itu tidak bisa bergerak dan diterapkan menurut semestinya.

Oleh sebab itu kalau betul kita ikhlas seperti apa yang dikatakan Perdana Menteri Djuanda, kita harus mencantumkan Piagam Jakarta itu semurni-murninya tanpa ada yang dicoret-coret lagi dalam Mukaddimah UUD 1945 itu. Itu baru namanya kembali kepada UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kapan itu akan tercapai? Kalau belum demikian, kembali kepada UUD

1945 baru merupakan semboyan dan pernyataan tetapi tidak dalam kenyataan dan perbuatan. Dan itu sama dengan manipulasi. Bilakah masanya lagi politisi dan ahli hukum kita akan mendidik rakyat dengan pendidikan politik yang jujur dan adil sebagai warisan berharga bagi generasi penerus? Ya, politisi dan juris idola bangsa!

Kita harus mengembalikan *hak sejarahnya* Piagam Jakarta dengan mencantumkannya secara penuh seperti aslinya sebagai *Mukaddimah UUD 1945* secara murni dan konsekuen. Ya, sesat di ujung jalan kembali surut ke pangkal jalan, kata nasehat orang tua-tua kita. Demikian agungnya Piagam Jakarta itu yang oleh ahli hukum kita yang terkemuka dikatakan dengan tegas seperti ini: *"Piagam Jakarta itulah yang melahirkan Proklamasi dan Konstitusi."* (Mr. Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, hal. 20). Jadi tanpa Piagam Jakarta tak ada Proklamasi dan tanpa Proklamasi tak ada kemerdekaan Indonesia. Sungguh Piagam Jakarta suatu hal yang mulia yang harus dijunjung tinggi oleh kita bersama.

Dampak Dekrit Bagi Keamanan Negara

Tak dapat disangkal bahwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu mempunyai dampak dan pesona yang besar bagi keamanan negara, terbukti tak begitu lama daerah-daerah yang bergolak dengan pemberontakan kemudian menjadi aman. Tokoh-tokoh pemberotak kembali turun ke kota dari hutan setelah bertahun-tahun memberontak.

Yang paling dulu turun adalah Ketua Dewan Banteng, Ahmad Husein, yang melantik Menteri-menteri PRRI tgl. 15 Februari 1958, menyerah di kota Solok pada tgl. 29 Mei 1961, setelah bergerilya lebih sedikit tiga tahun di Sumatera Barat. DI Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan menyerah pada tahun 1961 setelah bergerilya 8 tahun. Tengku Daud Beureuch menyerah di Lhokseumawe pada tgl. 9 Mei 1962 setelah memberontak sembilan tahun (21 September 1953 - 9 Mei 1962) dan terakhir DI

Kartosuwiryo menyerah setelah memberontak tiga belas tahun (7 Agustus 1949 - 4 Juli 1962). Dan dengan berakhirnya pemberontakan demi pemberontakan itu maka negara Republik Indonesia relatif aman kembali. Itulah di antara hikmah dan pesona Dekrit 5 Juli 1959 yang mencantumkan kembali Piagam Jakarta sebagai kesatuan yang tidak dipisah-pisahkan dengan UUD 1945 dengan jaminan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Inilah magnit yang menyebabkan tokoh-tokoh pemberontak yang kuat agamanya itu kembali ke haribaan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini, di samping pengaruh amnesti dan abolisi.

Kini mari kita simak pengakuan tokoh ahli Hukum Universitas Gajah Mada, Prof. Dr. Notonagoro S.H. tentang pengaruh Dekrit 5 Juli 1959 seperti dituliskannya dengan kalimat-kalimat seperti di bawah ini:

"Belum pernah sesudah proklamasi kemerdekaan sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kita memiliki syarat yang begitu keramat, suci bagi pertalian kesatuan kebangsaan seperti pemulihan fungsi dari isi Piagam Jakarta bagi proklamasi kemerdekaan sebagai perjanjian yang sangat luhur itu". (Prof. Dr. Drs. Notonagoro S.H., Pancasila Secara Ilmiah Populer, hal. 70, Cetakan ketiga, Pancuran Tujuh, Jakarta, 1975).

Kemudian beliau menganjurkan untuk kebahagiaan negara, nusa dan bangsa agar kita menjelmakan kembali, selekas mungkin, jiwa besar kita bersama seperti yang kita jelmakan pada proklamasi kemerdekaan. Demikian Prof. Notonagoro S.H. Ya, kita tinggalkan segi Dekrit yang negatif dan kita ambil yang positifnya.

Kesimpulan dan Saran

Dengan uraian di atas jelaslah dua kali peristiwa sejarah yang terjadi pada tanggal yang sama pada kota yang sama adalah merupakan suatu hal yang langka dan unik. Kedua peristiwa sejarah itu harus diperingati untuk menghidupkan semangat dan

gairah Islam serta membendung arus sekularisme dan Deislamisasi di Indonesia.

Peristiwa sejarah hari jadinya Jakarta 22 Juni 1527 telah diperingati setiap tahun oleh penduduk Jakarta, tetapi sayang hanya ditekankan pada perayaan-perayaan dan hura-hura belaka. Karena itu perlu ditingkatkan dengan membaca dan mengulangi sejarah perjuangan Islamnya, agar jelas mengapa ibukota ini bernama Jakarta. Ini khas untuk penduduk kota Jakarta.

Yang belum diperingati setiap tahun adalah ulang tahun Piagam Jakarta. Padahal ini adalah sumber semangat yang mencetuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau hari Proklamasi 17 Agustus 1945 diperingati setiap tahun mengapa sumber penggerak dan pencetus proklamasi itu sendiri tidak diperingati, yaitu Piagam Jakarta, 22 Juni 1945? Tanpa Piagam Jakarta pasti tidak ada proklamasi kemerdekaan.

Dulu pada tahun 1963 pernah diperingati ulang tahun Piagam Jakarta 22 Juni 1945 itu di mana Jenderal A.H. Nasution turut berpidato. Di dalam pidatonya beliau mengungkapkan, pada waktu itu, di *Jawa Hokokai* ada 52.000 pucuk surat dari ulama dan tokoh Islam seluruh Indonesia yang isinya berupa saran tentang dasar-dasar negara yang mesti diperjuangkan. Isinya sudah dapat diduga tidak lain dari berisi tuntutan akan adanya Negara Islam!

Agar semangat Piagam Jakarta itu tetap hidup di dalam jiwa kaum Muslimin maka sudah sepatutnya peringatan Piagam Jakarta itu diadakan setiap tahun. Apalagi kini ada usaha kaum *Deislamisasi* untuk melupakan Piagam yang amat bersejarah itu dan menjadikannya hanya sebagai dokumen historis belaka, tanpa menghayati semangat dan rohnya. Dan untuk itu perlu perjuangan bersama yang dinamik. Karena, yang *batil beraksi di kala yang hak tertidur.*

Akhirnya marilah kita kenang pesan pujangga Mesir yang termasyhur, Ahmad Syauqy Bey, yang sering dikutip di negeri-negeri Islam yang berbunyi:

قِفْ، دُوْنَ رَأْيِكَ فِي الْحَيَاةِ مُجَـاهِدًا إِنَّ الْحَيَـاةَ عَقِيْـدَةٌ وَجِهَادٌ.

Bangkitlah engkau,
bela pendirianmu, berjuang!
Sesungguhnya hidup ini
keyakinan dan perjuangan.

94 TAHUN SYARIKAT ISLAM
(16 Oktober 1905 - 16 Oktober 1999)

Syarikat Islam, bukan Budi Utomo

Dentuman meriam Jepang yang bertalu-talu dalam pertempuran dengan angkatan laut Rusia di Selat Thushima yang dahsyat itu, menyebabkan angkatan laut Rusia bertekuk lutut kepada Jepang di Port Arthur pada tahun 1905. Kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang di Port Arthur itu telah membangkitkan semangat dan harga diri bangsa-bangsa Timur bahwa mereka juga mampu melawan penjajahan bangsa Barat dan mengusir mereka dari bumi Timur.

Hal itu merupakan momentum yang baik bagi seorang pemuda Lawean, Solo, asal Klaten untuk mencetuskan ide yang selama ini terkandung dalam jiwanya, yaitu untuk menyusun kekuatan guna mengusir penjajahan Belanda dari bumi Indonesia yang telah menjajah Indonesia lebih dari 300 tahun lamanya. Ide itu lahir kemudian dengan organisasi yang bernama SYARIKAT DAGANG ISLAM (SDI) pada tanggal 16 Oktober 1905 di kota Solo. Beberapa tahun kemudian untuk lebih menonjolkan Islam, maka kata *Dagang* dihilangkan saja. Pemuda itu amat terkenal kemudian sebagai tokoh Perintis Kemerdekaan dengan nama *Haji Samanhudi,* Dialah *heronya* yang sebenarnya bagi pergerakan Indonesia. Dan setelah Tjokroaminoto duduk dalam pimpinan Syarikat Islam (SI), maka kemajuan SI makin hebat dengan semangat yang berkobar-kobar sehingga SI

dipandang rakyat sebagai *"Ratu Adil"* yang akan menyelamatkan mereka serta membebaskannya dari tindasan Belanda.

Reaksi Snouck Hurgronje

Karena kemajuan SI yang pesat itu, maka penasehat Pemeritah kolonial Belanda yang terkenal, Prof. Snouck Hurgronje menulis dalam majalah "Indologen Blad" sebagai berikut:

"Suatu bangsa yang masih muda di negeri ini, sedang sadar dan insyaf, lalu bergerak menempuh masa yang akan menciptanya menjadi akil balig, yang mulai memikirkan hal kehidupannya dan hal kedudukannya sebagai warga negara. Sekarang mereka mencari alat-alat untuk mengeluarkan suaranya, sedang di masa-masa yang lampau, segala sesuatu yang dirasa oleh mereka, tinggal tersekap di dalam kalbunya. Alat-alat yang didapatnya belum cukup. Kadang-kadang sumbang bunyi suara yang dikeluarkannya. *Awaslah kita, jika kita melengahkan arti gerakan itu oleh karena masih muda umurnya dan banyak cacat-celanya atau jika kita alpa dengan memberikan penghargaan kepada gerakan itu."* (D.M.G. Koch, Menuju Kemerdekaan, hal. 33, Yayasan Pembangunan, Jakarta, 1951).

Demikianlah nasehat Prof. Snouck Hurgronje kepada pemerintah kolonial Belanda agar pemerintahnya tetap hati-hati dan waspada atas kebangkitan Syarikat Islam yang menggebu-gebu di kala itu.

Pada mulanya Belanda menolak kehadiran SI, tetapi kemudian diakui juga sebagai Badan Hukum pada tgl. 10 September 1912, namun oleh kaum SI tanggal 16 Oktober 1905 dipandang kelahirannya SI yang sejati. Tanggal inilah yang diperingati kaum SI setiap tahun.

Tetapi setelah jadi Badan Hukum, SI malah bukan jadi mundur, bahkan bertambah maju melompat-lompat ke depan menuntut kemerdekaan Indonesia di bawah pimpinan Cokroaminoto sehingga beliau digelari orang "Raja tanpa Mahkota", maka kaum reaksioner Belanda menjadi saling menyalahkan

satu sama lain. Mereka menyalahkan Gubernur Jenderal Belanda yang mengakui dengan resmi kehadiran SI dalam politik dan SI (Syarikat Islam) mereka beri julukan dengan SI *(Salahnya Indenburg)*, yang memerintah di Hindia Belanda waktu itu.

Budi Utomo

BU yang selama ini dipandang sebagai awal kebangkitan Nasional Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tgl. 20 Mei 1908 atas dorongan prakarsa mahasiswa kedokteran STOVIA, SUTOMO dan kawan-kawan. Tetapi apakah sudah tepat bahwa awal kebangkitan Nasional itu dengan mengambil kelahiran Budi Utomo itu sebagai data sejarah yang benar? Inilah yang akan kita pertanyakan dalam tulisan ini.

Perkumpulan itu dipimpin oleh kaum *Ambtenaar*, yaitu para pegawai negeri yang setia kepada pemerintah kolonial Belanda. Pertama kali BU diketuai oleh *Raden T. Tirtokusumo*, Bupati Karanganyar yang dipercaya Belanda. Ia memimpin BU sejak tahun 1908 sampai dengan tahun 1911. Kemudian dia digantikan oleh Pangeran Arjo Noto Dirojo dari istana Paku Alam, Yogyakarta. Sebagai orang Kraton yang diberi gaji oleh Belanda, maka ketua BU itu sangat patuh kepada induk semangnya.

Dengan dipimpin oleh kaum bangsawan yang *inggih* selalu, tidak mungkin BU akan dapat melangkah maju untuk mengadakan aksi massa, berjuang guna mengubah nasib mereka yang menderita di bawah telapak kaki penjajah Belanda. Dengan sifat kebangsawanan yang pasif dan setia kepada Belanda itu, juga membuat Budi Utomo terjauh dari rakyat. Dan sifat aristokratis yang negatif itu adalah merupakan sifat dan ciri khas BU sampai akhir hayatnya.

Budi Utomo bukan bersifat kebangsaan yang umum bagi seluruh Indonesia, tetapi bersifat *regional*, kedaerahan dan kesukuan yang sempit. Keanggotaannya selalu terbatas bagi kaum

ningrat-aristokrat elite cabang atas, tetapi juga hanya terbatas bagi suku bangsa tertentu, yaitu suku Jawa dan Madura. Dengan itu, BU adalah hanya perkumpulan yang sangat terbatas dan sangat fanatik kesukuan yang picik. Dan karenanya tidak tepat kalau dikatakan BU, gerakan Nasional Indonesia. Sebab, selain orang-orang Jawa dan Madura, tidak boleh memasuki perkumpulan BU tersebut.

Disamping itu BU adalah kebelanda-belandaan yang tidak mencerminkan bahwa mereka adalah bangsa Indonesia yang jauh lebih besar daripada bangsa penjajah itu. Bukan saja dalam bahasa mereka sehari-hari lenyap sifat kebangsaannya, tetapi sampai-sampai kepada Anggaran Dasar Budi Utomo itu sendiri memakai bahasa Belanda kolonial itu. Apakah adil menilai BU sebagai gerakan Nasional teladan, padahal suku bangsa Indonesia yang lain dari suku Jawa dan Madura *haram* jadi anggota BU? Jangankan demikian, orang-orang Jakarta sendiri di mana BU dilahirkan, tidak boleh ikut jadi anggotanya. Dengan begitu, siapakah yang tidak heran, kalau Budi Utomo yang chauvinistis-regional dan lokal itu dan yang anggotanya terdiri dari pegawai Belanda, lagi tidak pernah memperjuangkan Indonesia merdeka sepanjang hayatnya, tiba-tiba dijadikan tonggak sejarah bagi kebangkitan Nasional Indonesia, justru setelah revolusi rakyat mencapai kemenangannya yang gilang-gemilang.

Anti-Agama

BU juga dapat dipandang sebagai perkumpulan kaum intelek ningrat yang meremehkan atau anti-agama, terutama Islam; karena mereka memandang agama itu sebagai alat belaka. Dengarlah *Noto Suroto,* seorang tokoh BU dalam suatu ceramahnya tentang *Gedachten van Kartini alsrichtsnoer voor de Indische Veriniging: "Sudah pasti bahwa soal agama adalah batu karang berbahaya, yang dalam kerjasama tidak mudah dihindari, meski bagaimanapun orang berhati-hati; oleh sebab itu soal agama harus disingkirkan, agar perahu kita jangan karam dalam gelombang kesukaran.* Pepatah Belanda: *"ieder*

meent zijn uil een volk te zijn", sungguh-sungguh benar dalam soal agama." Demikian penegasan Noto Suroto.

Seorang tokoh BU yang lain membuka isi hatinya dengan kata-kata seperti ini:

"Apabila agama mengetuk pintu untuk masuk dalam komplotan ini (BU, Pen.), harus ditolak. Kita sungguh takut akan daya pemisah yang ada padanya..." Selanjutnya ia berkata:

"Apabila Sarekat Islam, perkumpulan kaum muslim sanggup menyiapkan bangsa Jawa untuk hidup berpolitik, kata "Islam" itu harus kita isi pengertian lain, yang tidak pernah ada di dalamnya."

"Pengertian 'tanah air' masih asing bagi kita," demikian *Gunawan Mangunkusumo* dalam tulisannya dalam *Gedenboek Budi Utomo 20 Mei 1918* hal. 109. (Prof. Dr. Slamet Muljana, Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa, hal. 123-124). Demikianlah kaum BU memandang agama sebagai momok, atau "Islam Phobi". Dan akhirnya dengan gamblang Prof. Slamet menambahkan pula pengakuannya sendiri dengan kalimat-kalimat yang berbunyi:

"Seorang pemeluk agama bercita-cita meluaskan agamanya di antara orang-orang sebangsa khususnya, tetapi seorang nasionalis akan memperalat agama untuk mencapai kekuasaan politik. Bagi pemeluk agama perluasan agama adalah tujuan, bagi seorang nasionalis, agama adalah alat untuk memperkuat kekuasaan. Jadi bila agama tidak dapat memberi kesempatan untuk perluasan kekuasaan, agama harus ditinggalkan. Apa yang dikatakan alat bagi yang satu, adalah tujuan bagi yang lain, dan kebalikannya." (Prof. Slametmuljana, ibid, hal. 124-125).

Digul Lebih Utama Daripada Makkah

Lebih jauh dapat dilihat sifat anti-agamanya (Islam) Budi Utomo dalam menyerang keyakinan Umat Islam seperti yang dipublikasikan dalam media-massa yang terkenal. "Suara

Umum" yang terbit di Surabaya di bawah asuhan Dr. Sutomo yang dikutip oleh A. Hassan, Guru Besar Persatuan Islam dalam Majalah "Al-Lisan" yang berkata antara lain: *"Digul Lebih Utama Daripada Makkah." "Buanglah Ka'bah dan Jadikanlah Demak itu kamu punya Kiblat!"* (M.S.) *Al-Lisan* No. 24, 1938.

Demikianlah kaum BU itu tidak malu-malu mempertontonkan kepada umum sifat anti-agamanya dan meremehkan serta memandangnya sebagai angin lalu belaka. Dan dengan penghinaan yang terang-terangan kepada keyakinan umat Islam itu, kaum Budi Utomo menjadi sasaran kemarahan dan kutukan kaum Muslimin yang merasa terhina dan terluka. Akhirnya BU lenyap dari arena pergerakan Indonesia pada bulan Desember 1935 dan misinya dilanjutkan oleh *Parindra.*

Kini timbul pertanyaan: apakah suatu organisasi yang demikian coraknya itu serta sepak-terjangnya yang menyakitkan hati, patutkah dijadikan contoh teladan, yang hari jadinya dijadikan pula sebagai patokan tonggak sejarah bagi kebangkitan Nasional Indonesia yang penduduknya hampir 90% terdiri dari kaum Muslimin? Sungguh suatu penetapan sejarah yang salah kaprah! Tetapi kesalahan ini harus segera dikoreksi kalau kita benar-benar menghormati kebenaran sejarah pergerakan bangsa Indonesia yang sungguh-sungguh sesuai dengan data dan fakta sejarah yang ada dan otentik. Ikutilah argumentasi kita seterusnya di bawah ini!

Syarikat Islam

Syarikat Islam yang dilahirkan di Solo tahun 1905 dengan sifat Nasional dan dasar Islam yang tangguh yang kini berusia 94 tahun, adalah organisasi Islam yang terpanjang dan tertua umurnya dari semua organisasi massa di tanah air kita Indonesia.

Sifat *nasional* itu untuk membedakannya dengan *regional,* lokal kedaerahan seperti yang dianut oleh Budi Utomo. Dengan sifat nasionalnya itu, *Syarikat Islam* itu meliputi seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam yang tersebar di seluruh

kepulauan Indonesia. Ini tercermin dalam wajah para tokoh pemimpin SI. Lihatlah Samanhudi, Cokroaminoto berasal dari Jawa Tengah dan Timur; Agus Salim dan Abdoel Moeis berasal dari Sumatera Barat dan A.M. Sangaji dari Maluku. Dan dengan sifat dan dasar Islam itu, SI bersifat *kerakyatan* yang berlainan dengan Budi Utomo yang bersifat keningratan dan feodal. Dengan begitu SI *merakyat* dan berakar ke dalam lubuk hati rakyat yang berada di seluruh desa-desa Indonesia, sehingga SI digelari dengan partai rakyat desa di mana rakyat berkumpul memperjuangkan cita-citanya.

Setelah berjuang bersama rakyat dalam suka dan duka, sehidup semati, dipenjarakan, ditembak mati oleh serdadu Belanda (KNIL) dan dibuang ke Digul-Irian (Tanah Merah), akhirnya SI berhasil mengantarkan bangsa Indonesia mencapai cita-citanya ke pintu gerbang Indonesia Merdeka. Dengan begitu jelaslah bahwa SI mempunyai andil yang besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa.

Begitu besar jasa SI dalam memperjuangkan Indonesia merdeka sampai berhasil, tetapi seribu aneh dan ajaib, bukan SI yang jadi patokan hari kebangkitan nasional bangsa yang berjuang itu, tetapi Budi Utomo yang sama sekali tidak memperjuangkan Indonesia Merdeka; tidak pernah masuk penjara dan tidak pernah di buang ke Digul. Apakah ini bukan manipulasi sejarah? Apalagi SI lahir tiga tahun mendahului BU.

SI Menyongsong Arus

Sudah menjadi fitrah SI bahwa ia dilahirkan untuk menyongsong arus kebatilan dan ketidak-adilan. Kini terdengar suara yang meremehkan agama yang diucapkan orang di muka kader Islam, yaitu Mahasiswa IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Simaklah kata-kata yang beracun ini: *"Jangan Bawa Bendera Agama dalam Berbangsa dan Bernegara!"* (*Kompas*, 19-9-1990).

Apakah yang berbicara tidak baca sejarah revolusi Indonesia, terutama revolusi kepahlawanan rakyat Surabaya mela-

wan tentara Sekutu pada hari Pahlawan 10 November 1945? Dengan semangat apakah tentara pemenang perang dunia kedua itu kita hadapi, apakah bisa dengan semangat kebangsaan saja? Tidak bisa! Hanya dengan semangat agamalah terutama agama Islam kita dapat menghalau tentara yang bersenjata lengkap itu dari bumi tanah air di seluruh Indonesia. Apakah sang pembicara lupa atau sengaja melupakan, bahwa Radio Pemberontak di Surabaya di mana Bung Tomo berteriak dengan mengumandangkan takbir *Allahu Akbar* bertalu-talu untuk menggerakkan semangat rakyat melawan Sekutu yang bersenjata canggih itu? Apakah itu bukan semangat dan panggilan agama? Apakah sang pembicara lupa, bahwa K.H. Mas Mansur mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah memanggil rakyat dengan kata-kata yang antara lain berbunyi: *Pintu Syahid dan pintu Surga terbuka di Surabaya!* Apakah itu bukan pendekatan keagamaan? Siapa yang berani mati konyol dengan semangat kebangsaan? Rakyat hanya ingin mati syahid, dan ini adanya dalam perjuangan dengan niat membela agama. Hanya dengan semangat Islamlah orang berani menghadang tank dan peluru mortir dan meriam, sebab imbalannya adalah kemenangan dan Surga. Rasulullah menegaskan dalam hadits beliau yang terkenal: *Bukanlah dari golongan kami, orang yang mengajak kepada kebangsaan. Bukanlah dari golongan kami, orang yang berperang atas dasar kebangsaan dan bukan dari golongan kami orang yang mati atas kebangsaan!"* (Hadits Shahih, riwayat Imam Abu Daud). Demikian gamblang dan tegas garis yang dibuat Nabi kita Muhammad SAW. Sedang mantan Presiden Soekarno berulang-ulang menegaskan: *Agama adalah unsur mutlak dalam Nation Building!*

Quo Vadis sang pejabat mengarahkan mahasiswa Islam? Nama pejabat dari Sekneg itu Moerdiono.

Dengan nada bahasa seperti di atas maka SI tetap menyongsong arus sebagaimana dia dilahirkan. Tetapi harus ada *seninya* menyongsong arus. Dalam hal ini kita harus belajar kepada ikan *Salmon* bagaimana dia berhasil menyongsong arus

air terjun *Niagara* di Amerika yang kekuatannya 700 ekor kuda itu. Jangan asal songsong saja, bisa mati tenggelam ditelan arus!

Kembali kepada Konstitusi SI

Dalam ulang tahun ke-94 ini kaum keluarga besar SI harus merenungkan *Bai'atnya* kembali dan bertekad memperjuangkan tujuan SI: *hendak menjalankan Islam seluas-luasnya dan sepenuh-penuhnya dengan dasar: sebersih-bersih Tauhid, setinggi-tinggi ilmu dan sepandai-pandai siasat.* Untuk itu mari kita perkuat barisan kita dengan bersatu-padu berdasar Konstitusi SI yang murni secara konsekuen dan konsisten (Istiqamah). *Billahi fi Sabililhaq. Selamat berulang tahun!*



PENYIMPANGAN SEKITAR PROKLAMASI

Mukaddimah

Perang Asia Timur Raya yang dicetuskan Jepang pada tanggal 8 Desember 1941 berakhir dengan kekalahan Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945 setelah bom atom Amerika meledak di kota-kota Hirosyima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 yang menimbulkan ratusan ribu rakyat Jepang yang menjadi korban. Dan sehari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang mengumumkan kekalahannya secara resmi ke seluruh dunia.

Tetapi sebelum itu para pemimpin Indonesia telah mempersiapkan diri untuk menyongsong kemerdekaan Indonesia dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan inilah yang mempersiapkan Undang-undang Dasar 1945 dan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dengan resmi disahkan pada tanggal 22 Juni 1945.

Setelah para pemuda Indonesia di Jakarta yakin bahwa Jepang telah pasti menyerah-kalah kepada Sekutu, maka mereka mendesak Bung Karno supaya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Agustus itu juga. Tapi Bung Karno menolak desakan para pemuda itu karena beliau belum yakin bahwa Jepang telah menyerah, dan dia khawatir akan bentrok dengan tentara Jepang yang masih bersenjata

lengkap. Karena Bung Karno bersikeras tak mau memperkenankan tuntutan para pemuda itu, maka Bung Karno diculik mereka bersama Bung Hatta, dan dibawa ke Rengasdengklok, di daerah Karawang, Jawa Barat.

Tetapi pada Tanggal 16 Agustus 1945 petang hari, Soekarno-Hatta dijemput oleh Ahmad Subardjo, seorang kepercayaan Jepang. Dan setelah Ahmad Subardjo menjamin dan meyakinkan para pemuda PETA di Rengasdengklok bahwa Proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan besok tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta, barulah para pemuda itu mau melepaskan Bung Karno dan Bung Hatta pulang kembali ke Jakarta. Di Jakarta mereka membicarakan sekitar proklamasi di rumah Laksamana Muda MAEDA di jalan Imam Bonjol No. 1 sampai dini hari, jam 03.00 di pagi buta.

"Masih ingatkah Saudara teks dari Bab Pembukaan Undang-undang Dasar kita?" Soekarno tanya kepada saya, kata Subardjo.

"Ya, saya ingat," saya jawab, "Tetapi tidak lengkap seluruhnya."

"Tidak mengapa," Soekarno bilang, "Kita hanya memerlukan kalimat-kalimat yang menyangkut proklamasi dan bukannya seluruh teksnya."

Soekarno kemudian mengambil secarik kertas dan menulis sesuai dengan apa yang saya ucapkan sebagai berikut:

"Kami rakyat Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan kami."

Disamping itu Subardjo mengakui pula: "Suatu kenyataan ialah bahwa teks dari Proklamasi telah dirumuskan dalam apa yang dinamakan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Rumusan ini hasil dari pertimbangan-pertimbangan mengenai Kata Pembukaan atau Bab Pengantar dari Undang-undang Dasar kita oleh sembilan anggota Komite di mana Soekarno sendiri adalah ketuanya." (Mr. Ahmad Subardjo, Lahirnya Republik Indonesia, hal. 108, PT. Kinta Jakarta, 1972). Subardjo kemudian menjadi Menlu Republik Indonesia yang pertama.

Dalam versi lain Hatta berkomentar seperti ini: "... kalimat itu hanya menyatakan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Sebab itu mesti ada komplemennya yang menyatakan bagaimana caranya menyelenggarakan Revolusi Nasional. lalu saya diktekan kalimat yang berikut: "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." (Mohammad Hatta, Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, hal. 50, Tintamas, Jakarta 1969).

Proklamasi kemerdekaan itu diumumkan di rumah kediaman Bung Karno, Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta, pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jum'at, bulan Ramadhan, pukul 10 pagi.

Kritik terhadap teks Proklamasi:

1. Teks Proklamasi seperti tersebut di atas jelas melanggar konsensus, atau kesepakatan bersama yang telah ditetapkan oleh BPUPKI (Badan Penyeledik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
2. Yang ditetapkan pada tanggal 22 Juni 1945 itu ialah, bahwa *Teks* Piagam Jakarta harus dijadikan sebagai *Teks* Proklamasi atau Deklarasi Kemerdekaan Indonesia.
3. Alasan atau dalih Bung Hatta dalam bukunya *Sekitar Proklamasi* hal. 49 bahwa pada malam tanggal 16 Agustus 1945 dengan kalimat seperti ini: "Tidak seorang di antara kami yang mempunyai teks yang resmi yang dibuat pada tanggal 22 Juni 1945, yang sekarang disebut Piagam Jakarta." tidak dapat diterima, karena telah melanggar kaidah-kaidah sejarah yang harus dijunjung tinggi.

   Mengapa tidak dijemput pulang sebentar ke rumah beliau di jalan Diponegoro yang jaraknya cukup dekat, tidak sampai dua menit perjalanan. Mengapa mereka ke rumah Mayor Jenderal Nisjimura, Penguasa Jepang yang telah menyerah menyempatkan diri untuk bicara yang cukup lama malam itu; tetapi mengapa untuk menjemput teks Proklamasi yang

resmi yang telah siap tidak mau menjemputnya pulang sebentar? Dan sungguh tidak masuk akal bahwa besok pagi mau membacakan Proklamasi, jam 2 malam masih belum ada teksnya. Dan harus dibuat terburu-buru dengan pena pakai tulisan tangan yang pakai coret-coretan, seolah-olah proklamasi yang amat penting bagi sejarah suatu bangsa itu dibuat terburu-buru tanpa persiapan yang matang.

30 TAHUN INDONESIA MERDEKA

Proklamasi.

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal² jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, 17-8-'05
Wakil² bangsa Indonesia

TEKS PROKLAMASI. *Melanggar konsensus BPUPKI*

4. Teks Proklamasi itu bukan hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang tokoh nasional (Soekarno-Hatta), tetapi harus ditandatangani oleh 9 (sembilan) orang tokoh seperti tercantum pada Piagam Jakarta. Keluar dan menyimpang dari ketentuan itu adalah manipulasi dan penyimpangan dari sejarah yang mestinya harus dihindari. Teks itu tidak otentik dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Deklarasi Kemerdekaan Amerika saja ditandatangani oleh lebih dari 5 (lima) orang tokoh.
5. Teks Proklamasi itu terlalu pendek, hanya terdiri dari dua alinea yang sangat ringkas dan hampa, tidak aspiratif. Ya, tidak mencerminkan aspirasi bangsa Indonesia; tidak mencermin-

kan cita-cita yang dianut oleh golongan terbesar bangsa ini, yakni yang menganut agama Islam. Tak heran banyak pemuda yang menolak teks proklamasi yang dipandang gegabah itu. Tak ada di dunia, teks Proklamasi atau deklarasi kemerdekaan yang tidak mencerminkan aspirasi bangsanya.

Dan jelas teks Proklamasi itu memanipulasi dan merupakan distorsi sejarah, karena tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dalam sejarah tak ada kata maaf, dari itu harus diluruskan kembali!

Teks Proklamasi Yang asli

Adapun teks Proklamasi yang otentik yang telah disepakati bersama oleh BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945 itu sesuai dengan teks atau lapal Piagam Jakarta, haruslah berbunyi seperti di bawah ini:

PROKLAMASI

Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan dalam suatu susunan

Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 22 Juni 1945

Ir Soekarno
Drs. Mohammad Hatta
Mr. Ahmad Subardjo

Abikusno Tjokrosujoso	Mr. A.A. Maramis
Abdul Kahar Muzakir	H. Agus Salim
K.H. Wahid Hasjim	Mr. Muh. Yamin

Demikianlah teks Proklamasi asli dan otentik yang harus berkumandang, bergema dan mengudara setiap Proklamasi kemerdekaan diucapkan pada tiap tanggal 17 Agustus, hari keramat bagi bangsa Indonesia. Tetapi hal itu tidak terjadi, karena penyelewengan dan pengkhianatan sejarah. Dan ini adalah dosa! (Pengkhianatan pertama).

PPKI Mencoret Piagam Jakarta

Seharusnya bangsa Indonesia termasuk pemimpinnya bersyukur kepada Allah atas terlepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan yang lebih tiga ratus tahun lamanya itu. Karena kemerdekaan itu didapat hanya sekitar 10% atas keringat perjuangan bangsa Indonesia, dan yang 90% adalah atas pertolongan dan rahmat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Secara logika, mana mungkin tentara sekutu sebagai pemenang perang dunia kedua dapat dilawan dengan senjata bambu runcing! Pantaslah kita bersyukur dan bersujud kepada-Nya! Tetapi apa yang terjadi? Sehari setelah Proklamasi diucapkan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indo-

nesia (PPKI) bersidang dengan berbuat dosa besar kepada Allah, dan bersalah kepada bangsa Indonesia yakni mencoret kalimat Piagam Jakarta yang vital dan sakral di antara isi Piagam itu. Mereka mencoret kalimat yang berbunyi:

"...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." (Pengkhianatan yang kedua).

Tanpa disadari mereka telah memperlihatkan belangnya sebagai nasionalis sekuler dan kolaborator Jepang yang anti Islam yang akan membawa masyarakat dan negara kepada arah yang dimurkai Allah, yaitu *Deislamisasi* (Baca: menjauhkan diri dari Islam). Jelaslah kaum nasionalis sekuler itu tidak tahu arti bersyukur, dan tidak tahu arti syukur nikmat kemerdekaan. PPKI jelas telah menyimpang dari wewenang tugasnya, yaitu mensahkan Undang-undang Dasar yang telah rampung dibuat oleh BPUPKI, kemudian memilih Presiden dan Wakil Presiden; tetapi *bukan* mencoret Piagam Jakarta yang telah ditandatangani 56 hari sebelumnya oleh 9 orang tokoh terkemuka dari bermacam-macam aliran dan golongan. *Pencoretan ini jelas tidak sah dan merupakan pengkhianatan sejarah terbesar sesudah Proklamasi kemerdekaan!* Ya, di mana ada pemimpin ada pula pengkhianat yang munafik!

Untuk mengenang peristiwa yang menyedihkan itu, anggota BPUPKI dan penandatangan No.5 di antara penandangan Piagam Jakarta yang sembilan orang itu, Prof. Abdul Kahar Muzakir, dalam pidatonya pada sidang Konstituante Bandung pada tahun 1957 mengutarakan kekesalan hatinya seperti ini: "Apa lacur 18 Agustus!" Dan selanjutnya beliau berkata antara lain: "Yang mengkhianati Piagam bukan kami, tetapi kaum Nasionalis!"

Dan tampaknya pengkhianatan kaum nasionalis sekuler ini berlanjut terus sampai Sidang MPR tahun 1983 di kala MPR memutuskan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Parpol dan Ormas. Berarti Pancasila lebih utama dari agama (Islam), suatu kepongahan dan kecongkakan yang luar biasa! Dapat

dimengerti kalau azab Allah datang beruntun! (Pengkhianatan yang ketiga).

Maaf, barangkali mereka belum puas sebelum mengkafirkan negara dan bangsa Indonesia, laksana Kemal Attaturk mengkafirkan Turki. Padahal mati berjuang membela Islam adalah syahid, dan mati membela Pancasila adalah konyol!

Perbandingan Dengan Turki

Marilah kita sejenak bertamasya ke negara shahabat kita, yaitu Negara Turki. Sebagaimana diketahui dulu sebelum perang dunia pertama (1914-1918), Turki termasuk super power dunia yang dihormati, terutama di masa jayanya kekhalifahan Usmaniyah. Tetapi setelah Turki kalah dalam perang dunia pertama itu namanya menjadi merosot ke bawah. Dan kemudian muncul di sana seorang tokoh militer berdarah Yahudi yang anti Islam, namanya Kemal Pasya Attaturk atau Bapak Turki.

Dengan cepat dia menduduki jabatan Presiden Turki setelah menggulingkan Khalifah Turki, Sultan Abdul Hamid.

Bangkitnya militer sekuler dari kelompok barisan Turki Baru dan kaum nasionalis Turki ini membuat malapetaka bagi rakyat dan negara Turki.

Kemal Attaturk telah mencoba memurtadkan dan mengkafirkan rakyat Turki yang 99% beragama Islam itu dengan jalan antara lain, mencoret kata "Islam" sebagai dasar negara dalam UUD Turki; menutup dua masjid yang paling terkenal di Turki, Yaitu Masjid Aya Sophia dan Masjid Al-Fatih, yang dijadikannya museum dan depot obat; mengubah lafal adzan dari bahasa Arab menjadi bahasa Turki, dan mengubah pakaian wanita Turki supaya berpakaian seperti wanita Barat yang berpakaian bagaikan setengah telanjang serta menyita Percetakan-percetakan yang mencetak Kitab Suci Al-Qur'an. Demikianlah antara lain sepak terjang Presiden Turki Kemal Attaturk sejak tahun 1923 sampai wafatnya tahun 1938. Kalau Turki mau jaya kembali, tentaranya haruslah diislamkan dulu!

Dan sebagaimana diketahui bahwa beberapa tokoh kaum nasionalis sekuler dalam PPKI adalah pengagum Kemal Attaturk, terbukti dalam tulisan-tulisannya dalam berbagai media cetak yang terbit sebelum kemerdekaan. Dari itu tidak usah heran mengapa PPKI mau mencoret syariat Islam dalam Piagam Jakarta dan juga dalam tubuh UUD'45 yaitu pada pasal 6 mengenai Presiden dan pada Pasal 29 mengenai agama. Mungkin mereka mencontoh Kemal Attaturk di Turki yang memperagakan politik Deislamisasi yang terkutuk!

Dampak Pencoretan Islam Terhadap Negara

Pencoretan Piagam Jakarta itu jelas telah menimbulkan dampak yang buruk bagi negara. Karena mencoret syariat Islam berarti kufur dan tidak mempercayai hukum Allah yang telah ditentukan-Nya untuk para hamba-Nya. Dan itu juga berarti durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya serta menyakiti-Nya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an,

> *"Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah mengutuknya di dunia dan akhirat, dan menyediakan azab yang hina baginya."* (QS. Al-Ahzab: 57)

Kutukan dan azab Allah itu antara lain berupa bermacam-macam bencana yang menimpa negara; dan juga kegoncangan-kegoncangan politik yang tidak pernah stabil berupa huru-hara dan pemberontakan-pemberontakan yang bersahut-sahutan sehingga negara itu tidak pernah aman dan stabil; ekonominya makin lama makin merosot, dan utang luar negerinya makin membengkak serta rakyatnya makin lama makin miskin dan melarat. *Dan sampai kini Republik Indonesia belum pernah merasakan apa yang disebut dengan aman dan makmur itu!*

Ditambah lagi dengan berbagai bencana alam yang datang dengan tiba-tiba silih berganti, tak terelakkan. Walaupun ribuan orang yang mohon istighatsah kepada Allah, tetapi doa kaum Bid'ah itu jelas tidak dikabulkan! Justru berbagai peristiwa berdarah yang memprihatinkan terjadi setelah digelarnya

Istighatsah terbuka di lapangan: Peristiwa Semanggi, Ketapang, Kupang, Banyuwangi dan Ambon. Dan yang banyak menderita korban di Banyuwangi adalah dari kelompok kaum Istighatsah, NU.

Azab Allah kepada RI setelah mencoret Islam dalam Piagam Jakarta dan UUD'45, dalam bidang keamanan atau security dapat dilihat dalam berbagai peristiwa yang menggoncangkan stabilitas Negara RI, antara lain seperti ini:

1. Agresi Belanda yang pertama pada tahun 1947.
2. Pemberontakan PKI di Madiun pada 18 September 1948.
3. Agresi Belanda yang kedua pada 19 Desember 1948.
4. Proklamasi Darul Islam Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949 di Jawa Barat.
5. Gerakan Westerling di Bandung dan Sulawesi Selatan pada tahun 1950.
6. Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) di Ambon pada tanggal 25 April 1950. Presidennya bernama Soumokil.
7. Pemberontakan DI Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan pada tahun 1952.
8. Pemberontakan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan pada tahun 1953.
9. Pemberontakan DI Daud Beureueh di Aceh pada 21 September tahun 1953.
10. Pemberontakan PRRI/Permesta pada 15 Februari 1958 di Sumatera Barat dan Manado.
11. Pemberontakan G.30.S/PKI pada tahun 1965 di Jakarta.
12. Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) pada tahun 1974.
13. Peristiwa Komando Jihad pada tahun 1978.
14. Peristiwa "Pembantaian Tanjung Priok" pada 12 September 1984.
15. Peristiwa Santa Cruz Dili (Tim-Tim) pada 12 November 1991.
16. Tragedi DOM di Aceh 1989-1998.
17. Peristiwa penembakan Mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 dan peristiwa Semanggi berdarah tanggal13 dan

14 November 1998 tepat pada akhir Sidang Istimewa MPR yang cukup ironis. Di luar Sidang para mahasiswa berlumuran darah kena tembak oleh ABRI, dan para keluarga korban berlinang air mata, tetapi di dalam gedung MPR para anggota tertawa-tawa cengengesan dengan riang gembira. Sungguh keadaan yang amat kontras sekali!

18. Tragedi Ketapang berdarah di Jakarta Pusat 22 November 1998 di antaranya 15 orang tewas dan beberapa orang korban antara lain Komandan Kodim Jakarta Pusat yang turut cidera. Banyuwangi berdarah, pembakaran masjid di Kupang, peristiwa Ambon, Sambas dan lain-lain.

Di antara akibat buruk pencoretan syariat Islam itu adalah banyaknya timbul kriminalitas dalam masyarakat. Orang dengan gampang melakukan korupsi, membunuh orang, merampok, dan melakukan perzinaan, karena hukumannya terlalu ringan. Percayalah bahwa hukuman penjara tidak akan bisa membendung dan memberantas kejahatan-kejahatan yang membahayakan masyarakat itu! Hanya hukum syariatlah yang dapat mengatasinya! Tetapi syariat Islam mereka coret! Ya alangkah nekatnya, mereka durhaka kepada Allah!

Sebuah Intermezo

Sebelum kita sampai kepada akhir dari tulisan, maka marilah para pembaca yang budiman saya ajak sejenak untuk menyimak peristiwa yang cukup menarik yang terjadi pada dua orang proklamator yang saling menghujat satu sama lain.

Demikianlah kompaknya mereka waktu menyusun teks proklamasi pada malam 17 Agustus 1945, siapa akan mengira Dwitunggal itu belasan tahun kemudian akan tanggal dan pecah.

Pertama kali Bung Karno menyerang Bung Hatta dengan kalimat-kalimat seperti ini: "Hatta tidak ada," kataku. "Saya tidak mau mengucapkan proklamasi kalau Hatta tidak ada."

Tidak ada orang berteriak, "Kami menghendaki Bung Hatta. "Aku tidak memerlukannya. Sama seperti juga aku tidak memerlukan Sjahrir yang menolak untuk memperlihatkan diri

di saat pembacaan Proklamasi. (Sjahrir tidak mau hadir mungkin dia tahu bahwa teks proklamasi telah dipalsukan dan tidak aspiratif. Tetapi mengapa hanya Sjahrir yang dihujat Soekarno? Padahal Ahmad Subardjo sendiri juga tidak hadir waktu itu, seperti diakuinya sendiri dalam bukunya tersebut di atas. Jelas Bung Karno amat sentimen kepada Sutan Sjahrir yang ternyata kemudian mampu menjadi Perdana Menteri tiga kali berturut-turut, Pen.). Sebenarnya aku dapat melakukannya seorang diri, dan memang aku melakukannya sendirian. Di dalam dua hari yang memecahkan urat syaraf itu maka peranan Hatta dalam sejarah tidak ada.

Peranannya yang tersendiri selama masa perjuangan kami tidak ada. Hanya Soekarnolah yang tetap mendorongnya ke depan. Aku hanya memerlukan orang yang dinamakan "Pemimpin" ini karena satu pertimbangan. Aku memerlukannya karena aku orang Jawa dan dia orang Sumatera. Dia adalah jalan yang paling baik untuk menjamin sokongan dari rakyat pulau yang nomor dua terbesar di Indonesia.

Dalam detik yang gawat dalam sejarah inilah Soekarno dan tanah air Indonesia menunggu kedatangan Hatta." (Cindy Adams, Bung Karno Penyambung lidah Rakyat Indonesia, hal. 332, Gunung Agung, Jakarta, 1966).

Cukup keras dan pedas serta pahit serangan Bung Karno kepada Bung Hatta. Apakah benar di dalam dua hari yang memecahkan urat syaraf itu peranan Hatta tidak ada? Ini mengingkari fakta sejarah. Memang Bung Karno kalau bicara di hadapan wanita cantik sering lepas kontrol, dan dia sering menepuk dada bahwa dialah orang paling berjasa di negeri ini. Ini tanda orang yang kurang sehat jiwanya. Sebagaimana diketahui, Bung Karno mengucapkan kata-katanya itu di depan Cindy Adams, wartawan wanita Amerika yang cantik yang menulis otobiografi Bung Karno dengan judul seperti di atas.

Namun demikian Bung Hatta menjawab dengan tenang dan ringkas, tetapi cukup asin, pahit dan pedas serta mengena. Bung Hatta menangkis seperti ini:

"Inilah ucapan seorang diktator Soekarno, yang mengagungkan dirinya sendiri dan lupa daratan, berlainan dengan Soekarno dahulu, pemimpin rakyat di masa proklamasi dan sebelumnya." (Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Tintamas, Jakarta, 1969).

Demikianlah sebelas tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Desember 1956 Bung Hatta mengucapkan selamat tinggal kepada Bung Karno dengan meninggalkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI karena beliau telah tidak bisa lagi bekerja sama dengan Bung Karno, dan karena Soekarno telah berpihak kepada PKI dalam Nasakom (Nasionalis, agama dan Komunis) yang sangat dicela dan tak dapat diterima oleh Bung Hatta dan akal sehat.

Dan karena Bung Karno menurut Jaksa pemeriksanya, Durmawel SH, terlibat dalam Gerakan 30 September/PKI, maka dia dikenakan tahanan politik untuk diajukan ke Mahkamah Militer. Tetapi sebelum perkaranya disidangkan dia telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1971. Bung Karno berjasa cukup besar, tetapi dosanya juga besar, antara lain membuat teks Proklamasi sendiri dengan tulisan tangannya, menyimpang dari teks resmi yang telah diputuskan bersama.

Inilah dosa sejarah yang tidak bisa dimaafkan, karena dia berakibat vatal bagi perkembangan sejarah Indonesia yang bisa menjurus kepada jalur yang salah dan menyesatkan generasi anak cucu sampai kurun-kurun masa yang panjang. Karenanya, akhir hidupnya cukup memprihatinkan, tidak berakhir dengan indah! *Nauzubillah min dzalik*! Dialah Presiden dan Proklamator yang mati dalam status tahanan politik! Dan tak seorang pun di antara anak dan istrinya yang diizinkan mendekatinya saat rohnya berpisah dari jasadnya!

Revolusi dan Reformasi Total Dalam Sejarah

Kalau kita memang merasa hormat kepada sejarah bangsa kita (*sense of History*), maka tak ada jalan lain kita harus bergerak cepat untuk meluruskan sejarah. Ada pertanyaan: mengapa

di awal revolusi para pendiri Republik ini mentolelir penyimpangan yang dilakukan Bung Karno dan kawan-kawan? Jawabnya singkat: Ialah karena waktu itu adalah zaman darurat, dan para pendahulu kita telah sibuk menghadapi revolusi perjuangan menghadapi musuh yang ingin menjajah Indonesia kembali. Ditambah lagi, banyak anggota BPUPKI yang telah meninggalkan Jakarta pulang ke daerahnya masing-masing untuk terlibat dalam api revolusi yang sudah mulai menyala. Dan zaman darurat itu telah lama berakhir! Tetapi apakah salah kaprah ini akan dibiarkan untuk selama-lamanya? Apakah kita akan mewariskan sejarah yang imitasi atau palsu kepada generasi anak cucu kita? Tidak! Sejarah tidak boleh memutarbalikkan fakta yang ada di lapangan. Sejarah harus jujur apa adanya. Sejarah tidak boleh memperpahit apa yang manis, dan tidak boleh pula mempermanis apa yang sebenarnya pahit. Ya, sejarah harus objektif, kata Presiden B.J. Habibie.

Dari itu reformasi yang dicanangkan oleh kabinet reformasi harus total dan menyeluruh, dan yang harus direformasikan dan diluruskan ada beberapa hal yang penting dan mendesak!

1. Teks Proklamasi dan Piagam Jakarta

Teks Proklamasi Kemerdekaan RI yang dikumandangkan setiap tanggal 17 Agustus 1945, adalah teks yang tidak sah dan tidak otentik. Karena sama sekali tidak sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945. Mengapa proklamasi yang demikian penting dianggap remeh, seolah-olah tanpa persiapan yang matang, dibuat terburu-buru pada malam hari, ditulis dengan tulisan tangan di atas secarik kertas dengan pakai coret-coretan, padahal beberapa jam lagi proklamasi akan diucapkan. Ironisnya, teks proklamasi Bid'ah yang mengada-ada itu dibuat di rumah seorang perwira Jepang, Laksamana muda Maeda.

Mestinya Soekarno, Hatta dan Subardjo di malam itu tidak perlu membicarakan teks proklamasi, teks yang sebenarnya

sudah selesai dipersiapkan oleh BPUPKI dua bulan sebelumnya. Malam itu mereka cukup membicarakan masalah teknis pelaksanaan, tempat, jam beberapa akan diucapkan, siapa yang akan mengucapkan, dan siapa-siapa yang akan diundang. Adapun teks Proklamasi tidak perlu dibicarakan lagi, sudah ada dan sudah final tidak perlu diubah-ubah lagi!

2. Tentang Piagam Jakarta

Pencoretan Piagam Jakarta, yang dilakukan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, adalah terang-terangan mengkhianati sejarah yang luar biasa. Tidak ada haknya PPKI untuk mencoret Piagam Jakarta yang telah ditandatangani oleh 9 orang tokoh nasional, antaranya sang Proklamator Soekarno-Hatta sendiri. Piagam Jakarta adalah janji kepada Allah dan kepada rakyat Indonesia, dan janji ini akan dituntut Allah kelak, mengapa tidak dilaksanakan, bahkan dicoret-coret? Inilah yang mengundang murka Allah sehingga negara kita tidak pernah aman dan makmur sesudah proklamasi diucapkan.

3. Tentang Syarikat Islam dan Budi Utomo

Dosa kaum nasionalis cukup banyak. Mereka tidak segan-segan dan malu-malu untuk memutarbalikkan fakta sejarah. Sudah jelas bahwa Syarikat Islam lahir 16 Oktober 1905 tiga tahun mendahului Budi Utomo yang lahir pada 20 Mei 1908, tetapi yang diperingati oleh kaum nasionalis yang kebetulan sedang berkuasa, memperingati Budi Utomo sebagai tonggak kebangkitan Nasional Indonesia. Padahal, Budi Utomo itu adalah perpanjangan tangan penjajahan Belanda, karena para anggotanya adalah kaum priyayi yang menjadi pegawai kolonial Belanda. Disamping itu mereka tidak pernah berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sedang Syarikat Islam adalah partai politik pertama yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Distorsi sejarah ini haruslah diakhiri dan diluruskan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan! Dan *last but not least*, seperti apa yang ditegaskan oleh almarhum Mr. Hamid Algadri (Ketua Persatuan Perintis Kemerdekaan Indonesia) kepada war-

tawan Republika bahwa pergerakan nasionalis itu anti Islam dan anti Arab. (Republika 23 Agustus 1997).

Dekrit Presiden

Koreksi itu hendaklah berjalan dengan cepat, tidak perlu bertele-tele, cukup dengan sebuah Dekrit Presiden. B.J. Habibie seorang Presiden dan sebagai seorang Muslim yang harus prihatin atas manipulasi sejarah, dan harus empati atas nasib yang diderita umat Islam, dapat menyelamatkan negara dari kehancurannya atas jalannya sejarah yang telah melenceng dari jalur kebenaran itu.

Dengan sebuah Dekrit Presiden, B.J. Habibie bisa tampil sebagai pahlawan reformasi di bidang sejarah. Dengan demikian B.J. Habibie akan tercatat sebagai "Penyelamat" negara dan umat Islam dari murka Allah, dan dari bahaya kehancuran yang lebih dahsyat. Disamping itu B.J. Habibie dapat memberikan jasa dan kontribusinya yang besar serta kenangan yang tak terlupakan untuk semaraknya syiar Islam di Indonesia disamping meluruskan sejarah pada jalurnya yang tepat. Suatu budi luhur dan sepak terjang yang kelak patut dicontoh!

Kepada Generasi Penerus dan Pelurus

Strategi dan lompatan besar dalam revolusi dan reformasi sejarah haruslah dipelopori oleh para pemuda yang revolusioner yang digerakkan oleh semangat iman dan perjuangan yang menyala-nyala. Sudah masanya para pemuda Islam maju ke depan mempelopori perjuangan raksasa ini. Apakah kita mau ditipu dan tertipu terus oleh lawan-lawan Islam? Tanpa adanya perjuangan yang heroik dan patriotik dari generasi penerus dan pelurus, kita akan senantiasa beradaptasi dengan yang batil demikian lamanya sampai kiamat. Ingatlah bahwa nasib Islam di Indonesia tidak akan berubah kecuali oleh umat Islam sendiri. *"Allah tidak akan mengubah nasib suatu umat (kaum) kecuali bila umat itu mau dengan segera mengubah nasibnya sendiri."* (Ar-Ra'd: 11). Apakah kita akan terus "menyerah" (*Mustas-*

limun) kepada fakta yang didiktekan oleh orang sehingga kita menjadi musafir asing di tanah airnya sendiri, tak berperan, dan tak ada ide besar yang diperjuangkan?

Dari itu wahai para pemuda Islam, bangkitlah dan jangan tiarap terus, terompet jihad telah memanggil kalian untuk bangkit dan maju ke depan!

Sadarlah bahwa melalui revolusi dan reformasi sejarah, Islam Insya Allah akan berperan kembali, setelah dia menjadi korban pencoretan Piagam Jakarta dan penyimpangan teks Proklamasi. Ingatlah, dengan syariat Islam kita meraih dan menggapai cita-cita luhur, yaitu *Izzul Islam wal Muslimin*. Marilah kita meneruskan cita-cita pendahulu kita sebagai pendiri Republik Indonesia (kubu Islam) dalam BPUPKI,[1] yaitu Republik Indo-

---

[1] Dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dibentuk 28 Mei 1945 yang anggotanya 62 orang itu terdapat dua kubu yang bersaing tajam. Yaitu kubu Islam dan kubu Nasionalis. Kubu Islam adalah kubu terbesar dengan anggota 35 orang, dan sisanya kubu Nasionalis. Kubu Islam kompak semuanya menuntut negara Islam karena rakyat Indonesia hampir 90% yang memeluk agama Islam. Sedang kubu Nasionalis menuntut negara yang bebas dari agama alias sekuler. Tetapi kubu Nasionalis tidak mau voting dan mereka minta kompromi. Akhirnya disepakati kompromi dengan lahirnya Piagam Jakarta yang terkenal yang ditandatangani oleh 9 orang tokoh terkemuka yang mewakili semua aliran dan golongan. Namun demikian ternyata ada pula pihak yang ingin mengkhianati Piagam yang luhur itu. Mereka mempengaruhi pemerintah Jepang untuk turut berperan supaya mencoret kalimat yang paling sakral dan vital dalam Piagam Jakarta itu, yaitu kalimat yang berbunyi: *"dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya."* Justru kalimat inilah yang menyebabkan kubu Islam mau mengendurkan tuntutannya semula yaitu negara Islam.
Akhirnya pemerintah Jepang yang sebenarnya tidak berkuku lagi karena telah menyerah kepada Sekutu, pada tanggal 14-15 Agustus 1945, dua hari sebelum Proklamasi buru-buru membentuk apa yang disebut dengan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang anggotanya cuma 27 orang. Semula anggotanya 21 orang, kemudian ditambah 6 orang yang mau mencoret Piagam Jakarta. Jelas PPKI adalah rekayasa Jepang untuk memenuhi permintaan seorang tokoh dari Manado, Sulawesi Utara, yang menggertak dan mengultimatum bahwa kalau delapan kata itu tidak dihapus, maka kaum Nasrani bagian Timur akan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Itu tidak lain cuma tipu muslihat belaka. =

nesia berdasar Islam! Islam memerlukan pemuda-pemuda yang berani maju ke depan, bukan hanya menurutkan arus sampai kita dihanyutkan air entah ke mana, dan akhirnya tenggelam. Islam memerlukan pemuda yang berani menyongsong arus untuk menegakkan keadilan dan kebenaran nilai-nilai Islam yang jaya dan agung!

اَلإِسْلاَمُ يَعْلُوْ وَلاَ يُعْلَى عَلَيْهِ. ﴿الحديث﴾

"Islam itu agung, dan tak ada yang dapat mengatasinya", kata Nabi kita Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Tidak diragukan lagi bahwa pencoretan Piagam Jakarta yang suci dan keramat itu oleh kaum nasionalis sekuler dalam PPKI, dan manipulasi teks proklamasi kemerdekaan oleh sang Proklamator sendiri, telah menimbulkan bahaya, malapetaka, dan mengundang azab Allah kepada kita bersama, azab yang datang beruntun tahun demi tahun tanpa henti-hentinya sampai kini.

= Tetapi setelah kaum nasionalis sekuler yang anti Islam yang dominan dalam PPKI yang bersidang 18 Agustus 1945 dengan mencoret Piagam Jakarta yang suci itu untuk memenuhi tuntutan tokoh Nasrani, Sam Ratulangi, dari Manado itu, ternyata mereka tetap juga mendirikan Negara Indonesia Timur (NIT), memisahkan diri dari Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Konperensi Denpasar (7-8 Desember 1946) yang diprakarsai oleh bos mereka, Gubernur Jenderal Belanda, Van Mook.
Sebenarnya PPKI itu tidak ada gunanya, karena akan menimbulkan dualisme dalam Panitia persiapan kemerdekaan yang kemudian menimbulkan petaka bagi negara. Kalau cuma untuk memilih Presiden dan wakil Presiden, BPUPKI juga bisa bersidang untuk itu. Demikianlah siasat licik kaum Nasionalis sekuler dalam PPKI; sedang menurut para anggota BPUPKI, masalah Piagam Jakarta telah final, tidak boleh diganggu gugat lagi!
Buat apa gunanya lagi membentuk Panitia persiapan, padahal dua hari lagi Proklamasi kemerdekaan akan diucapkan? Itu namanya bukan persiapan kemerdekaan, karena BPUPKI sudah bekerja untuk itu sejak lebih dua bulan yang lalu; tetapi Persiapan Pencoretan Piagam Jakarta. Sungguh licik kaum Nasionalis sekuler yang anti Islam itu!

Dan kita khawatir bahwa kapal "Titanic Indonesia" bergerak untuk tenggelam ke dasar lautan. Naudzubillah!

Dari itu harus tampil mujahid-mujahid dakwah untuk meluruskan kembali sejarah yang telah melenceng dari jalurnya yang benar. Tak ada kata kompromi dengan yang batil. Dan tak ada kata akhir dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Perjuangan tidak boleh berhenti di tengah jalan, dan api jihad itu harus tetap menyala sampai akhir hayat! Ya, sampai cita-cita dan kemenangan telah berada dalam genggaman tangan!

Mari kita rombak status quo dan sejarah yang salah kaprah yang telah merusak citra negara dan merugikan umat Islam itu, demi kejayaan Islam dan Negara! Ya, Islam di Indonesia adalah Islam yang sudah dikhianati!

Dan haruslah diingat selalu bahwa tujuan jihad perjuangan kita tidak boleh menyimpang dari menuju Ridha Ilahi!

Dapat dipastikan bahwa apabila laknat dan azab Allah datang menimpa, negeri yang makmur dan kaya raya dapat menjadi negeri yang miskin melarat, dan surga dunia bisa berubah menjadi neraka yang panas menyala-menyala! Naudzubillah! Semoga kita terlindung!

Billahi Fi Sabilil Haq! Ala Inna nashrallahi Qariib!

Dan terakhir mari kita simak firman Allah yang berbunyi:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا وَّأَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. ﴿إبراهيم: ٢٨﴾

"Apakah tidak engkau perhatikan orang-orang yang menukar nikmat Allah (kemerdekaan) dengan kedurhakaan, dan menempatkan bangsanya dalam negara yang sengsara?" (Ibrahim: 28).

Renungkanlah.....!



BAGAI DITELAN ULAR PITHON

يَأْتِي عَلَى نَاسٍ زَمَانٌ يَكُـوْنُ الْمُؤْمِـنُ فِيْـهِ أَذَلَّ مِـنْ شَـاتِهِ.
﴿رواه ابن عساكر عن أنس بن مالك﴾

"Akan datang bagi manusia suatu zaman di mana waktu itu orang Mukmin lebih hina daripada kambingnya sendiri." (Hadits riwayat Ibnu 'Asakir dari Anas bin Malik).

Konon tersebut dalam cerita sejarah, setelah kerajaan Majapahit (1292-1478) jatuh dan digantikan oleh kerajaan Islam Demak, maka seorang penasehat Brawijaya bernama *Sabdo Palon* melarikan diri ke hutan. Tetapi sebelum pergi, ia berkata: *"Kita akan kembali lima ratus tahun yang akan datang."* Maksudnya, 500 tahun kemudian anak-cucu orang-orang Majapahit akan muncul berkuasa kembali di Nusantara Indonesia!

Kita tidak boleh percaya kepada ramalan seseorang. Tetapi kebenaran ucapan *Sabdo Palon* itu mendekati kenyataan, dan kini ada yang mendambakan kembali masa kejayaan Majapahit itu. Mereka memandang zaman leluhur adalah zaman keemasan yang kilau-kemilau yang senantiasa mereka dambakan kedatangannya kembali.

Pertanda ke arah itu tampak nyata dalam bahasa-bahasa yang dipakai sehari-hari banyak memunculkan bahasa *Sansekerta,* yaitu bahasa yang menonjol pada masa kerajaan Hindu-Budha Majapahit itu. Nama-nama gedung yang indah yang besar-besar bernama *Bina Graha, Graha Purna Yuda, Candra Loka, Bina Sejahtera, Barawidiya Sasana* dan sebagainya. Nama kehormatan

dipakai kata *maha putra* atau yang terasa asing lagi bagi telinga kita masa kini seperti kalimat: *Parasamya Purnakarya Nugraha* yang diberikan kepada daerah-daerah yang sukses dalam pembangunan. Dan para mahasiswa yang dilantik jadi Sarjana dipakai kata "*Wisuda*". Begitu pula banyak kamar di gedung DPR/MPR memakai bahasa Sanskerta yang banyak orang sukar membacanya atau mengingatnya. Ya, serba Sanskerta![1] Padahal sejarah mencatat bahwa zaman Majapahit itu adalah zaman feodal bertangan besi seperti yang diperlihatkan oleh Gajah Mada yang dimasanya Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Memang pahit rasanya buah pohon *Maja (Aegle marmelos)* itu!

Zaman Majapahit adalah zaman jahiliah, di mana manusia bukan menyembah Allah Yang Maha Esa sebagai Al-Khalik, tetapi menyembah patung-patung dewa yang dibikin sendiri untuk dituhankan dan disembah. Zaman kesesatan yang tidak boleh berulang kembali; zaman syirik sebagai dosa yang tak berampun. Dan syukur Alhamdulillah, kedatangan Islam di Indonesia telah menyelamatkan bangsa kita dari kesesatan jahiliah itu.

Tetapi mengapa ada yang merindukan kembali zaman leluhur mereka yang gelap itu, dan mengapa orang mau memutar jarum jam sejarah kembali ke zaman lima abad yang telah berlalu, yang banyak bergelimang dosa; padahal ilmu pengetahuan dan teknologi umat manusia telah melambung tinggi? Jawabnya tidak lain, karena: penyakit *Islam Phobi.*

Bukankah mantan Wakil Presiden kita Bung Hatta (almarhum) telah mengecam keras sikap dan pandangan yang amat keliru itu dalam sebuah karangan beliau yang bernama "*Ke Arah Indonesia Merdeka*" dengan kata-kata yang tegas dan jelas yang patut kita simak bersama. Beliau berkata: "*Bukan Indonesia Merdeka di bawah kerajaan Mojopahit yang kita idamkan,*

---

[1] Prof. Sutan Takdir Ali Syahbana, seorang ahli bahasa Indonesia, mengatakan, "Aneh sekali, di kala dunia telah meninggalkan bahasa Sanskerta, kita bangsa Indonesia menghidupkan bahasa yang telah mati itu." Ya, mengapa kita kembali ke bahasa zaman jahiliah Majapahit?

melainkan Indonesia Merdeka sebagai Kerajaan Rakyat Indonesia. Indonesia menurut dasar Kedaulatan Rakyat." (Mohammad Hatta, Ke Arah Indonesia Merdeka, Himpunan Karangan, hal. 65, Jakarta, 1953).

Padahal "semangat nasional Majapahit boleh dikatakan telah padam samasekali pada waktu kerajaan agung itu runtuh, dikalahkan oleh semangat Islam yang sedang berkembang di pulau Jawa." (Prof. Slametmulyana, *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia,* hal. 27). Tetapi sejarah mencatat bahwa Islam dengan Dakwahnya yang bijaksana telah datang di Indonesia dengan cukup tenteram dan damai yang dianut pemeluk-pemeluknya yang baru dengan hati yang rukun dan dengan dada yang terbuka. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Brawijaya sendiri, Raja Majapahit yang terakhir itu akhirnya memeluk Islam juga; karena memang sejak tahun 1448 dakwah Islam telah masuk di kalangan tinggi Majapahit itu. (Baca: Sanusi Pane, Sejarah Indonesia Jilid I hal. 171, Balai Pustaka, Jakarta 1965).

Peranan Islam

Kedatangan Islam di Indonesia, disambut dengan rasa syukur oleh bangsa kita karena dengan itu negeri yang luas ini terlepas dari belenggu kemusyrikan dan perbudakan feodalisme Majapahit yang merendahkan martabat umat manusia. Kemudian bangsa kita diajak dan dituntun agama Islam melalui jalan yang diridhai Ilahi menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dan kemudian setelah Indonesia dijajah Belanda hampir 350 tahun, Islam tetap dengan tidak henti-hentinya berjuang melawan penjajahan itu sampai tercapainya Indonesia Merdeka. Umat Islam senantiasa berdiri di barisan paling depan menghadapi Belanda, Jepang maupun tentara Sekutu yang mencoba kembali menjajah Indonesia setelah kemerdekaan itu didapat.

Segala macam daya-upaya diusahakan untuk menggerakkan rakyat untuk mencapai kemerdekaan itu, baik berupa perjuangan bersenjata seperti yang dilakukan oleh pahlawan-

pahlawan besar Indonesia yang memberontak kepada Belanda, maupun dengan melalui organisasi-organisasi sosial dan politik. Maka terbentuklah Partai-partai Islam dan organisasi-organisasi sosial keagamaan yang tumbuh di mana-mana bagaikan cendawan tumbuh di musim hujan.

Tampillah Syarikat Dagang Islam (SDI) yang lahir pada 16 Oktober 1905 di Solo di bawah pimpinan Haji Samanhudi yang kemudian berubah menjadi "Syarikat Islam" di bawah pimpinan trio politiknya yang terkenal: Cokroaminoto, Agus Salim dan Abdul Muis. SI-lah yang pertama sekali menuntut dan memperjuangkan Indonesia Merdeka! Kemudian menyusul Muhammadiyah pada tahun 1912 yang diketuai oleh K.H. Ahmad Dahlan yang berjuang di lapangan sosial dan pendidikan demi kecerdasan umat. Muncul pula "Persatuan Islam" (PERSIS) pada tahun 1923 di bawah pimpinan K.H. Zamzam dan kemudian diperkuat oleh A. Hassan yang terkenal sebagai Ulama terkemuka yang berwatak tangguh dan berpikiran maju. Persis terutama bergerak dalam pelurusan 'Akidah umat agar jangan dapat dimasuki oleh unsur-unsur bid'ah, tahyul dan khurafat. Lahir pula NU pada tahun 1926 yang dimotori oleh Ulama-ulama yang menamakan dirinya "Ahlus Sunnah wal Jama'ah" (Barangkali lebih tepat: *Ahlul Mazhab*).

Muncul pula PERTI di Bukittinggi pada 20 Mei 1930 yang juga dipelopori Ulama-ulama kuno bermazhab Syafi'i. Bangkit pula *"Persatuan Muslimin Indonesia"* (PERMI) yang bergerak dalam politik pada tahun 1930 yang bersikap non-Kooperator kepada penjajah Belanda, yang kemudian tiga orang tokoh Permi yang terkemuka dibuang Belanda ke Digul, Irian Barat.

Lahir pula "Penyadar" pada tahun 1936 di bawah pimpinan H. Agus Salim, A.M. Sangadji dan Muhammad Roem sebagai pecahan dari SI. Kemudian muncul pula "Partai Islam Indonesia" (PII) pada tahun 1938 di bawah pimpinan Dr. Sukiman dan kawan-kawan setelah beliau keluar dari PSII. Dan sebelumnya pada tahun 1937 lahirlah MIAI (Majelis Islam A'la Indone-

sia) menjelang pecah perang dunia kedua sebagai *Konfederasi* Partai-partai dan organisasi-organisai Islam tersebut di atas, kecuali "Penyadar" yang tidak menjadi anggotanya. Di antara para pemimpin MIAI antara lain terdapat nama Dr. Sukiman, Wondoamiseno dan K.H. Mas Mansur. Dan kemudian MIAI menjadi MASYUMI.

Selain dari itu masih terdapat lagi organisasi-organisasi Islam yang senantiasa memelihara dan *mengobarkan* semangat Islam itu di dalam dadanya kaum Muslimin seperti "Al-Irsyad" di Surabaya, PUI di Jawa Barat, Alwashliyah di Medan, PUSA di Aceh, DDI di Sulawesi Selatan dan lain-lainnya. Semua partai dan ormas Islam tersebut di atas lahir di zaman penjajahan Belanda yang pada umumnya bersikap menantang penjajahan Belanda, kecuali ada satu-dua yang tidak.

Di zaman Jepang, pada tahun 1943 lahirlah MASYUMI (Majelis Syura Muslimin Indonesia) dan kemudian setelah Indonesia merdeka, dilahirkan MASYUMI baru pada tanggal 7 November 1945 sebagai hasil *ikrar* tokoh-tokoh Islam Indonesia.

Pada waktu Jepang menjajah Indonesia selama tiga setengah tahun yang tidak kalah zalimnya daripada penjajahan Belanda yang 350 tahun, terjadi dua pemberontakan-pemberontakan rakyat yang dipimpin oleh para Ulama, seperti pemberontakan terhadap Jepang di *Singaparna* dan di *Aceh*. Demikianlah gigihnya kaum Muslimin Indonesia melawan kaum penjajah guna merebut kemerdekaan yang dicita-citakan bersama yang Alhamdulillah berkat pertolongan dan rahmat Allah dapat diraih dengan baik.

Berapa banyaknya korban untuk itu, jangan tanya! Lihat saja taman-taman pahlawan yang berserakan dari barat sampai ke timur, dari Sabang sampai Merauke (Irian Barat) di mana putra-putra Islam terbaring dipeluk persada ibu pertiwi, Indonesia yang indah permai ini beribu-ribu banyaknya yang dikenal maupun yang tidak dikenal ataupun yang dilupakan, untuk memperjuangkan dan membela Indonesia Merdeka. Belum lagi

yang dijebloskan ke dalam penjara-penjara yang sempit atau yang dibuang ke Tanah Merah (Digul) sebagai politisi dan atau yang dinaikkan ke tiang gantungan. Dan apakah sejarah sanggup melupakan jasa-jasa mereka itu semua, jasa yang patut dilukis dengan tinta mas? Tidak mungkin menurut akal yang sehat! Tetapi ternyata ada juga pihak yang berusaha keras agar sejarah melupakannya. Mereka ingin menutup cahaya matahari kebenaran dengan sebelah telapak tangannya sendiri.

Apakah mungkin sejarah melupakan perjuangan dan jasa pemimpin dan umat Islam di zaman revolusi fisik sedang mengamuk dan musuh menyerbu sampai jauh ke kampung-kampung dan desa-desa di pedalaman; kota-kota telah diduduki termasuk ibukota RI Yogyakarta, sedang Presiden dan para menterinya telah menyerah, ditawan dan diasingkan Belanda ke Sumatera, dan kapal RI ketika itu hampir saja tenggelam dalam keadaan SOS? Tidak mungkin dan amat mustahil! Tetapi apa lacur kaum Islam Phopi tidak mau mengerti akan fakta sejarah, tetap berkeras dengan segala daya-upaya berusaha menutup *untuk menghapus jasa dan jejak langkah Islam dan kaum Muslimin* dalam membela dan memperjuangkan kemerdekaan pada saat-saat yang krisis dan kritis itu. Padahal jasa yang paling tinggi nilainya adalah pada saat-saat berbahaya dan menentukan to be or not to be-nya Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. *A friend in need is a friend indeed!*

Lenyapnya Partai Islam

Berbagai cara dan siasat untuk menghapus dan menghilangkan jasa dan jejak langkah Islam di Indonesia antara lain dengan melenyapkan Partai-partai Islam secara perlahan dari satu langkah kepada langkah yang lain bagaikan taktik Amerika Serikat mengalahkan lawan-lawannya dalam perang dunia kedua yang lalu, dari pulau ke pulau *(from island to island)* sampai menang. Karena Partai-partai Islam itulah yang selama ini yang merupakan basis kekuatan Islam yang menjadi ujung tombak mereka menghadapi lawannya.

Pertama sekali dibubarkan Partai Islam terbesar, Masyumi, pada tahun 1960 di zaman Orde Lama dan kemudian menyusul Partai-partai Islam yang lain pada 5 Januari 1973 melalui penyederhanaan Partai-partai politik. Demikianlah NU, Parmusi (kini ganti nama dengan MI), SI dan Perti digabungkan menjadi satu (fusi) dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi satu-satunya Partai Politik Islam, yang pada hakekatnya tidak lain berarti pembubaran empat buah *partai Islam* yang masih ada sebelumnya. Ini terjadi di zaman Orde Baru dan PPP diizinkan menjadikan Islam sebagai *asas ciri* yang membedakannya dengan yang lain. Rupanya ini hanya untuk sementara! Sedang yang 4 Partai berubah menjadi organisasi sosial dan pendidikan. Di sinilah *terjebaknya* pemimpin-pemimpin Islam tertentu yang bertanggung jawab dalam menandatangani *Fusi* Parpol Islam itu. Mereka terperangkap karena tidak bisa memandang jauh ke depan, tidak bisa membaca siasat lawan, dan karena terlena duduk di atas kursi yang empuk, mereka patuh menerima apa saja yang didiktekan orang kepada mereka. Begitulah kalau orang berjuang tidak berdasar *Ideologi* Islam, tetapi berdasar Kursiologi dan ambisi pribadi; mereka membiarkan dirinya dipermainkan arus dan angin belaka. Dan akhirnya mereka bersikap seperti robot dan perabot dengan menundukkan kepalanya menerima asas tunggal dan menyingkirkan *Asas Islam* yang mulia.

Tetapi pemimpin-pemimpin Islam yang arif bijaksana yang tidak bisa dihanyutkan arus dan tidak kena erosi idealisme, sejak semula telah merasakan permainan itu, karena PPP itu tidak sedikit pun mencerminkan bahwa dia sebuah partai Islam yang akan berjuang membawakan aspirasi umat Islam, karena nama itu muncul bukan atas hasil Muktamar atau Kongres Umat Islam itu sendiri, tetapi atas bisikan dari luar. Juga tokoh-tokohnya tidak berbobot dan tidak memiliki kredibilitas dan integritas seperti apa yang harus dimiliki oleh tokoh-tokoh Islam yang terkemuka.

Umat Islam khawatir bahwa PPP itu akan merupakan *perangkap* yang akan mematikan 4 Partai Islam yang disuruh bergabung di dalamnya, bahkan untuk mematikan *asas* Islam itu sendiri. Namun umat Islam ingin melihat permainan selanjutnya sambil menaruhkan sedikit dan secuil harapan mereka kepada Partai Islam yang baru lahir itu. Karenanya dalam Pemilu 1977 dan 1982 yang lalu masih banyak juga umat Islam memberikan suaranya kepada PPP itu. Tetapi setelah terjadi sidang MPR pada tahun 1983 yang lalu di mana Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas bagi Partai Politik (yang berasas Islam tidak diperbolehkan); dan setelah berlangsungnya Muktamar PPP pada tanggal 20-22 Agustus 1984, yang pertama kali sejak lahirnya sebelas tahun yang lalu (1973) di mana PPP sendiri melakukan *politik harakiri*, melucuti dirinya sendiri dengan mengubah asas Islam menjadi asas Pancasila, maka harapan umat Islam yang sedikit dan tinggal secuil itu menjadi hilang-lenyap sirna sama sekali. PPP telah dipandang oleh kaum Muslimin "bertukar kelamin" secara terang-terangan dengan tidak sedikit pun merasa malu. Ya, PPP telah kehilangan *roh dan semangat Islam* yang sejati dan vital!

Kalau orang Islam menukar agamanya dengan yang lain, maka orang itu dinamakan *Murtad*. Demikian juga halnya kalau Partai Islam menukar asasnya dengan yang lain, maka ia dinamakan *renegat* alias khianat atau munafik yang telah mengkhianati umat Islam yang telah menjadi pendukung dan pemilih mereka selama ini.

Kini PPP di bawah wajah-wajah berselubung pimpinan "kancil-kancil" Machiavelli telah berubah menjadi *"Minhum"* (Golongan mereka), bukan *Minkum"* (Golongan kamu) dan bukan pula *"Minna"* (Golongan kita) lagi! Kiblatnya bukan ke Ka'bah lagi walaupun dipakai juga sebagai lambang sekedar daya tarik dan pemukau umat belaka.[1] PPP bukan lagi Partai

---

[1] Dalam pemilu tahun 1987, lambang Ka'bah telah diganti dengan lambang "Bintang". Akibatnya PPP kalah besar dan memalukan. Mereka tak mengerti =

Islam, dan ia telah berubah menjadi partai sekuler-duniawi semata-mata. Karena sengketa terus, ia dijuluki "Partai *Persate-an* Pembangunan". Tetapi mimbar bebas PDI di jalan Diponegoro pada bulan Juli 1996 memplesetkan PPP dengan "Partai-Partai Perempuan", karena PPP tidak berani melawan kezaliman rezim Soeharto!

PPP tampaknya bukanlah partai kader yang mengutamakan ideologi daripada kursi. Di sana tidak ada ideolog yang berjuang untuk membela ideologi Islam dan memperjuangkan cita-cita Islam. Yang banyak di sana adalah korsiolog yang duduk membela kursinya dan mempertahankannya sampai tua, ya, sampai kakek-kakek dan nenek-nenek yang berkepala tujuh. Kalau perlu dengan menjilat dan memuji-muji Penguasa atau Presiden.

Beberapa waktu yang lalu seorang perempuan tokoh PPP berteriak-teriak di Radio BBC London supaya pemerintah menindak wartawan yang memberitakan Presiden Soeharto sakit. Dia menganjurkan supaya wartawan itu ditindak tegas, karena katanya Presiden Soeharto sehat-sehat saja. Padahal Soeharto memang kurang sehat, terbukti beberapa acaranya ditunda demi kesehatannya. Apakah gara-gara berita yang sepele itu sang wartawan harus ditindak? Tetapi demikianlah gaya jilatisme seorang tokoh perempuan anggota DPR dari PPP kepada Soeharto sebagai seorang Soehartois. Dampaknya cukup berat bagi sang perempuan anggota DPR itu, dia oleh LBHI (Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) dimasukkan kepada golongan musuh Hak Asasi Manusia bersama beberapa orang tokoh Indonesia lainnya.

Partai kader, ialah partai yang mempersiapkan para kadernya untuk berkiprah dalam masyarakat dan negara termasuk

---

= sejarah, bahwa dalam Pemilu 1955, lambang Bintang itu telah dipakai oleh Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang hanya beroleh 5 kursi saja dalam Parlemen. Rupanya PPP mau menjadi partai kecil pula seperti PSI itu. Tanda gambar Ka'bah adalah hasil Shalat *Istikharah* Kiyai H. Bisri, sedang tanda gambar Bintang dirancang oleh kaum *oportunis*.

jadi Menteri dan anggota lembaga tinggi negara seperti DPR dan MPR. Untuk itu ambisi seseorang kader untuk duduk dalam DPR/MPR haruslah dibatasi dalam suatu ketentuan partai yang harus dipatuhi. Bukan seperti sekarang, anggota DPR untuk PPP umpamanya dibatasi sampai malaikat maut datang menjemput nyawanya belaka. Dari itu ada anggota DPR yang telah lengket di kursinya berpuluh tahun sampai umur hampir mencapai kepala tujuh. Dan yang ideal ialah anggota DPR duduk satu kali masa jabatannya, yaitu lima tahun. Atau kalau keadaan benar-benar membutuhkan paling lama dua kali masa jabatan, yaitu sepuluh tahun. Masa yang lama itu cukup bagi seorang anggota untuk berkiprah untuk memperlihatkan sepak terjangnya sebagai pejuang Islam untuk Islamisasi masyarakat dan negara. Setelah itu dipersilahkan kader dari angkatan muda yang lain untuk mempelihatkan pula keahlian dan keterampilannya untuk memperjuangkan ideologi Islam demi *Izzul Islam wal Muslimin!*

PPP terkesan tumpul, kurang tajam, Soehartois, oportunis, tidak berani ofensif, dan tidak konsisten atau istiqamah dalam membela asasnya. Pada mula dia dilahirkan 5 Januari 1973 PPP berasas Islam. Setelah Sidang MPR Maret 1983 PPP mengganti asasnya dengan Pancasila. Dan pada Muktamarnya awal Desember 1998 PPP kembali lagi kepada Asas Islam. Jelas PPP itu angin-anginan sesuai dengan situasi dan kondisi belaka, mudah berubah-ubah. Partai yang demikian sepak tejangnya dan karekternya tidak bisa diandalkan untuk perjuangan Islamisasi Indonesia!

Ya, dengan demikian tamatlah riwayat dan lenyaplah Partai-partai Islam yang telah pernah berjaya dan berjasa mengantarkan Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan, hilang satu demi satu bagai ditelan *Ular Pithon.* Timbul pertanyaan: siapakah yang bertanggung jawab dunia-akhirat atas tersingkirnya *Asas Islam* dan tamatnya riwayat Parpol Islam itu? Para pembaca yang arif lagi budiman tentu bisa menjawabnya dengan mudah. Tetapi, apakah dengan demikian kaum *Islam Phobi* telah

berhasil menghapus dan menghilangkan pengaruh Islam yang telah lama berakar berabad-abad di Indonesia? *Wait and see!*

Namun demikian kita teringat kepada Andalusia pada akhir abad yang yang ke-15 (1492) di mana kaum Nasrani berhasil memurtadkan kaum Muslimin Spanyol secara paksa walaupun Islam telah berkuasa di negeri itu kurang-lebih delapan abad lamanya (711-1492). Kita teringat juga kepada almarhum K.H. Ahmad Dahlan, Pendiri dan Ketua Umum Muhammadiyah ketika beliau berkata: *Tidak mungkin Islam lenyap dari seluruh dunia, tetapi tidak mustahil Islam hapus dari bumi Indonesia. Siapakah yang bertanggung jawab?"* (Solichin Salam, K.H. Ahmad Dahlan Reformer Islam Indonesia, hal. 70, Jakarta, 1963). Dan kita teringat pula kepada pujangga Shabir Khuthi ketika ia merangkum syairnya yang berbunyi:

هَذَا الزَّمَانُ الَّذِيْ كُنَّا نُحَاذِرُهُ

فِي قَوْلِ كَعْبٍ وَفِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُوْدِ

دَهْرٌ فِيْهِ الْحَقُّ مَرْدُوْدٌ بِأَجْمَعِهِ

وَالْجَوْرُ فِيْهِ أَذَاهُ غَيْرُ مَرْدُوْدِ

إِنْ دَامَ هَذَا وَلَمْ يَحْدُثْ لَهُ غَيْرُهُ

لَمْ يُبْكَ مَيِّتٌ وَلَمْ يُفْرَحْ بِمَوْلُوْدِ

Inilah zaman yang kita khawatirkan selama ini
Seperti tertera dalam kata hadits Ka'ab dan Ibnu Mas'ud
Masa di mana kebenaran Islam ditolak total
Dan kebathilan diterima secara menyeluruh
Jika ini terus berlaku tanpa ada yang lain
Tak perlu yang mati ditangisi dan yang lahir dielukan.

Penyair dalam bait syairnya itu melukiskan zaman kelam gelap-gulita yang menakutkan. Apa perlunya yang meninggal-

kan dunia ini ditangisi karena ia terbebas sudah dari penderitaan bathin, istirahat dalam kuburnya yang hening sepi? Apa perlunya pula si Upik atau si Buyung yang baru lahir disambut dengan gembira, karena dia akan datang merasakan kesengsaraan dan kepahitan hidup tak ada taranya dalam zaman pancaroba!

Sang Penyair mengambil Ilham dari hadits-hadits Nabi yang dibawakan oleh Ka'ab dan Ibnu Mas'ud, dua orang shahabat Rasulullah yang terdekat.

Lalu siapakah di antara kita yang mau turut *berkapitulasi* menegakkan bendera putih, tidak mau berjuang lagi sebagai *Mujahid* membela Islam dengan segala nilainya yang agung dan mulia itu? Dia itu termasuk kepada kategori mereka yang ditelan Ular Pithon. Yang pasti kita semua, Anda dan saya terutama para kader penerus kita, Insya Allah akan terus berjuang mengibarkan bendera Islam sampai detik dan detak jantung kita yang terakhir! Amien, ya Allah!

Mukmin sejati tidak akan dapat ditelan Ular Pithon, tidak akan mau hanyut ditenggelamkan arus zaman, dan tidak bisa dijadikan robot dan perabot, tetapi ia akan tetap berjuang laksana sahabat Rasulullah Mus'ab bin Umair yang mengibarkan dan menaikkan panji Islam setinggi mungkin dengan semangat jihad yang pantang mundur, membara walaupun dengan sisa-sisa kedua tangannya yang telah buntung dipancung musuh di medan laga. Dengan semangat itu kita membangun masyarakat kita!

Hanya dengan semangat juang yang dimiliki Rasulullah dan para sahabatnya itulah, kita dapat mencapai kembali kejayaan Islam dan kaum Muslimin. Bukan dengan semangat *kapitulasi dan kursiologi!* Dari itu patut sekali hadits Rasulullah yang kita cantumkan di bawah judul karangan ini kita renungkan dengan baik pada masa kini agar kita jangan ditelan Ular Pithon!

ISLAM DAN NEGARA
Suatu Timbangan Buku

Khazanah Perpustakaan Indonesia diperkaya lagi dengan terbitnya buku "Islam dan Tata Negara" yang diterbitkan UI-Press tahun yang lalu. Pengarangnya cukup berbobot, Dosen IAIN Program S3 Fakultas Pascasarjana di Jakarta, seorang tokoh intelektual dan agama serta diplomat.

Namun demikian buku penting yang nyaris bermutu tinggi ini mengandung kelemahan-kelemahan yang agak sukar dipertanggungjawabkan kalau tidak dikoreksi dengan sempurna, apalagi sebagai buku pegangan para calon doktor Islam.

Tanpa Footnot

Sebagai buku wajib bagi program S3 IAIN dan sebagai buku ilmiah komtemporer tulisan Munawir Syadzaly ini mengandung kelemahan yang cukup berat karena tidak memiliki satu pun catatan kaki sepanjang 240 halaman itu. Dengan tidak adanya footnot itu mudahlah para pembacanya menganggap semua itu adalah bikinan pengarangnya saja yang mengada-ada, walaupun telah dilengkapi oleh sejumlah buku Daftar Pustaka. Tetapi ini saja tidaklah cukup.

Sebagai contoh:

"Imam Muhammad Abduh, seorang tokoh pembaharuan Islam yang hidup pada akhir abad XIX Masehi, menyatakan bahwa kalau terjadi bentrokan antara nash (Al-Qur'an dan Sunnah, Pen.) dan nalar maka hendaknya dimenangkan nalar" (hal. 177).

Ini memerlukan catatan kaki, kalau tidak bisa Pengarang dianggap mengada-ada. Kalau mengingat Syekh Muhammad Abduh sebagai seorang yang saleh dan puritan, agak sukar bagi para pembacanya menerima keterangan itu. Tetapi kalau ada catatan kaki, bisa juga para pembaca merenungkan sejenak. Yang jelas itu adalah pendapat Pengarang sendiri seperti yang sering dikemukakannya dalam berbagai kesempatan.

Begitu juga keterangan Pengarang tentang ucapan Ibnu Taimiyah.

> *"...bahwa kepala negara yang adil meskipun kafir adalah lebih baik daripada kepala negara yang tidak adil meskipun Islam..." (hal. 90/110).*

Ini juga memerlukan catatan kaki. Mengingat bacaan Pengarang tentang Ibnu Taimiyah adalah buku beliau "As-Siyasatus Syar'iah", tetapi dalam buku itu pasti tidak ada kata-kata seperti itu. Saya kebetulan telah menerjemahkan buku itu ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "Pedoman Islam Bernegara" (Bulan Bintang, Cetakan ke-4, 1989).

Yang benar ialah bahwa kata-kata itu telah diucapkan oleh seorang ulama Baghdad, *Ibnu Thaus,* atas nama Majelis Ulama Baghdad di waktu negeri itu diserbu oleh Panglima Tartar, Jenderal Hulako Khan pada tahun 1258 Masehi *(656 Hijriyah).*

Di kala Baghdad ditaklukkan Hulako itu, sang Jenderal penakluk mengumpulkan Ulama Baghdad dalam suatu Majelis. Di dalam Majelis Ulama itulah sang Jenderal mengajukan sebuah pertanyaan yang "aneh" yang harus dijawab dalam tempo yang singkat pada saat itu juga. "Manakah yang lebih baik pemerintah yang kafir tetapi adil daripada pemerintah Islam tetapi zalim?" Maka tampillah Ibnu Thaus menjawab pertanyaan sang Penakluk dengan kata-kata yang berbentuk fatwa "bahwa pemerintah yang kafir tetapi adil lebih baik *daripada* pemerintah Islam tetapi zalim." Yang dimaksud dengan pemerintah yang *'adil'* adalah Hulako Khan dan yang dimaksud *'zalim'* adalah pemerintah Islam yang digulingkannya. Jelaslah fatwa itu dike-

luarkan oleh Ulama yang sudah frustasi yang sudah lenyap semangat jihadnya, sehingga dia hanya menuruti kemauan sang Jenderal Penakluk belaka. Sedang Ulama-ulama yang berkarakter tidak mau mendekat kepada Hulako atau mereka telah dipenjarakan atau dibantai bersama 800.000 sampai 1000.000 penduduk Baghdad dan sekitarnya waktu Hulako memasuki kota seribu satu malam itu, termasuk Sulthan Al-Musta'shim dan keluarga sebagai Khalifah Abbasiah yang terakhir.

Jelaslah fatwa itu dikeluarkan pada saat negara Islam dalam keadaan krisis dan kritis sekali, dan karena itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena itu amat mustahil kalau Ibnu Taimiyah yang oleh Pengarang dikatakan sebagai seorang yang puritan (orang yang hidupnya saleh dan menganggap kemewahan dan kesenangan sebagai dosa, Pen.) akan mengeluarkan fatwa yang rendah mutunya itu. Rasanya sebagai seorang Fundamentalis yang konsisten dan konsekuen mustahil Ibnu Taimiyah akan mengeluarkan fatwa seperti itu. Jelasnya fatwa yang keliru itu dapat dibaca dalam bukunya *Sayid Al-Furati* yang bernama "*Ummul Qura*", Makkah, 1926.

Yang Kurang Tepat

Disamping itu banyak hal kurang tepat yang mengganggu pembaca. Misalnya "...seperti tertera dalam surat Hujurat ayat 49". Mungkin yang dimaksud ayat 13 yang sesuai dengan konteks pembicaraan. Sebab, surat al-Hujurat tidak sampai 49 ayat. Ayatnya cuma 18 ayat (hal. 178).

"Pada tanggal 17 November 1945 berdirinya Masyumi" (hal. 190). *Mestinya 7 November 1945*, sama dengan tanggal kelahirannya Pengarang sendiri.

"...Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu dan juga menantu Nabi, suami Fatimah, *putri tunggal* Nabi". (hal. 211). Ini keliru, karena Fatimah bukanlah putri tunggal Nabi; ada beberapa orang putri Nabi kita. Lengkapnya putra-putri Nabi adalah: Qasim, Zainab, Ruqaiyah, Fatimah, Ummi Kaltsum dan Abdullah. Enam bersaudara itu adalah anak Rasulullah dengan Siti

Khadijah. Seorang lagi anak Nabi bernama Ibrahim dari istrinya Mariah Al-Qibthiah. (Baca: Muhammad Ridha, *Muhammad Rasulullah,* cetakan keempat, hal. 366, Kairo, 1966). "...seperti yang terjadi pada Raja *Saud bin Abdul Aziz.* yang memerintah..." Mestinya Raja *Su'ud bin Abdil Aziz.* Yang menggantikan Raja Ibnu Sa'ud yang wafat tahun 1953, bukanlah *Saud,* tetapi putra sulung beliau yang bernama *Su'ud bin Abdil Aziz.* (Maaf kebetulan saya telah berjabat tangan dengan beliau di Istananya, di Makkah pada musim Haji tahun 1954). Dan masih terdapat kesalahan lain yang perlu dibetulkan guna menuju ke arah kesempurnaan.

Dapat dijelaskan bahwa yang *Saud* adalah Menteri Luar Negeri Saudi Arabia sekarang ini yang nama lengkapnya Saud bin Faisal bin Abdil Aziz.

Taat Kepada Pemimpin

Pengarang bicara tentang masalah taat kepada Pemimpin dengan menyitir ayat Al-Qur'an, Nisa': 59, yang artinya:

> *"Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara kalian..."*

Ayat ini berkali-kali disitir pada hal. 4, 47 dan hal. 82. Dalam mengomentari pendapat Ibnu Abi Rabi' dikatakan bahwa dasar otoritas dan kekuasaan Raja adalah mandat dari Tuhan (hal. 48). Demikian mulia martabat pemimpin sehingga harus ditaati. Dan seingat saya, Pengarang juga membawakan pidato di hadapan Presiden waktu memperingati hari besar Maulid Nabi di Jakarta beberapa waktu yang lalu dengan menampilkan surat an-Nisa' ayat 59 ini.

Tetapi sayangnya Pengarang kurang mendalami makna pengertian ayat ini, dan beliau membacanya seperti biasa saja. Kalau beliau mau menukik dan mengkaji makna ayat ini lebih mendalam, maka akan terbukalah pengertian yang sebenarnya.

Coba perhatikan bahwa di dalam ayat itu Allah SWT menghadapkan seruannya kepada orang-orang yang beriman,

bukan sembarang warga negara saja. Kemudian Allah menyuruh taat kepada diri-Nya dan taat kepada Rasul-Nya, tetapi terhadap Ulil Amri (pemimpin, raja, presiden) tidak terdapat kata *"Thaat"* lagi. Cuma Allah memakai lafal *waw (dan)*. Mengapa demikian? Karena taat kepada Allah sifatnya mutlak dan begitu juga taat kepada Rasul. Sedangkan taat kepada Pemimpin, sifatnya tidak mutlak, tetapi dengan *bersyarat*. Yaitu bila sang Pemimpin taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul-Nya, barulah wajib menaati sang Pemimpin. Dan jika dia fasik serta durhaka kepada Allah dan Rasul, maka tak ada hak untuk taat kepadanya.

Disamping itu, dalam ayat itu jelas Allah menyebut *Ulil Amri Minkum (di antara golongan kamu)*, yakni kaum Mukminin, bukan golongan yang lain dari itu. Ya, bukan *Minhum* (dari gologan mereka). (Baca: Islam dan Perundang-undangan, Abdul Kadir Audah, Bulan Bintang, Cetakan ke-6, Jakarta 1984).

Selanjutnya ayat itu berkata:

"Maka jika kamu bersengketa tentang suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, sekiranya kamu beriman kepada Allah dan hari yang Akhir. Demikian itulah yang terbaik dan sebaik-baik jalan."

Dalam ayat ini jelas sekali, bila timbul pertikaian atau perbedaan pendapat di antara orang-orang yang beriman itu, Allah memerintahkan supaya bertahkim kepada Allah dan Rasul. Menurut beberapa kitab Tafsir, Allah dan Rasul itu maksudnya tidak lain dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Bukan kepada Undang-undang sekuler ciptaan manusia, bukan pula kepada keputusan Raja atau kepala negara atau putusan pejabat tertentu. Jadi sebenarnya kalau orang mau membina tatanegara Islam itu, sudah ada pedoman yang sangat terjamin kebenarannya. (Baca: Tafsir Al-Jamal jilid I, hal. 395 dan Ibnu Katsier jilid I, hal. 517). Benarlah Prof. Dr. Hazairin dari Universitas Indonesia dalam bukunya "Demokrasi Pancasila", bahwa bila orang Islam Indo-

nesia mau menegakkan negara Islam tidak perlu kepada yang lain, cukup dengan berpedoman kepada Al-Qur'an.

Tanpa Memberikan Petunjuk?

Dari itu kelirulah Pengarang ketika beliau berkata:

"Nabi wafat tanpa memberikan petunjuk tentang bagaimana seharusnya umat Islam menentukan siapa pemimpin atau kepala negara mereka..." (hal. 233).

Petunjuk untuk itu telah diberikan Allah kepada Nabi melalui firman-Nya antara lain dalam surat-surat Al-Maidah ayat 51, 55, dan 57; Ali Imran ayat 118 dan 159; An-Nisa' ayat 139, 144 dan Asy-Syura ayat 38. Semua itu telah dibacakan Nabi kepada para sahabat beliau bagaimana caranya memilih pemimpin dan siapa yang harus dipilih dan siapa yang dilarang. Cuma umat Islam masa kini tidak mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan yang tertera dalam ayat itu, bahkan ada yang meragukan petunjuk Al-Qur'an.

Negara Pancasila

Telah 14 abad negara Islam berdiri di dunia ini sejak dari zaman Nabi sampai kini baik berbentuk tradisional maupun modern telah dibahas Pengarang dengan analisis yang cukup padat. Namun tidak ada satu pun yang menarik selera Pengarang. Tidak tertarik kepada zaman Khulafaur Rasyidin di mana Islam telah melebarkan sayapnya sampai ke Persia dan Romawi; tidak tertarik kepada Islam di zaman Khalifah Umar bin Abdil Aziz yang terkenal dengan zaman keemasan Islam yang tidak ada bandingannya sampai sekarang, demikian makmurnya sampai tidak ada orang yang mau menerima zakat dan demikian amannya sehingga bukan manusia saja yang hidup rukun tetapi juga antara serigala dan kambing. Fakta ini seolah-olah tidak masuk akal. Tetapi begitulah sejarah berkata. Tetapi yang sangat menggelitik hati Pengarang adalah Negara Pancasila Indonesia. Inilah idola Pengarang dan yang dipesankan beliau pada bagian penutup bukunya setebal 240 halaman itu.

"Kita bangsa Indonesia khususnya umat Islam, patut bersyukur kepada Allah SWT bahwa para pendahulu kita, para pendiri Republik Indonesia telah merumuskan Pancasila untuk dijadikan ideologi negara."

Dan seterusnya beliau berkata:

"...hendaknya kita umat Islam Indonesia menerima negara Republik Indonesia ini sebagai sasaran akhir dari aspirasi politik kita, dan bukan sekedar sasaran antara atau batu loncatan ke arah sasaran-sasaran yang lain." (hal. 236).

Natsir tentang Pancasila

Sebelum beliau sampai kepada pesan-pesannya itu, terlebih dahulu Pengarang memeperkuat argumentasinya degan mengemukakan pendapat-pendapat tokoh Islam yang terkenal seperti M. Natsir dan lain-lain. Pengarang mengutip pidato Natsir pada tanggal 2 April 1952 yang diucapkan di Karachi di muka Pakistan Institute of Internasional Affairs, yang antara lain berbunyi:

"Indonesia menempatkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila yang dianut sebagai landasan rohani, moral dan etika bagi negara dan bangsa." (hal. 195)

Disamping itu pengarang mengutip lagi Mingguan *Hikmah* tanggal 9 Mei 1954 yang memuat tulisan Natsir dengan judul *Bertentangankah Pancasila dengan Al-Qur'an?"* yang antara lain berbunyi seperti ini:

"...mana mungkin Al-Qur'an yang memancarkan tauhid dapat apriori bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa? Mana mungkin Al-Qur'an yang ajarannya penuh dengan kewajiban menegakkan 'adalah ijtima'iyah dapat bertentangan dengan sila Keadilan Sosial?; mana mungkin Al-Qur'an yang justru memberantas sistem feodalisme dan pemerintah istibdad (diktator) sewenang-wenang, serta meletakkan dasar musyawarah

dalam susunan pemerintah, dapat bertentangan dengan apa yang dinamakan Kedaulatan Rakyat?; mana mungkin Al-Qur'an yang menegakkan istilah ishlah bainannas (damai antara manusia) dapat apriori bertentangan dengan apa yang disebut Peri Kemanusiaan?; mana mungkin Al-Qur'an yang mengakui adanya bangsa-bangsa dan meletakkan dasar yang sehat bagi kebangsaan, dapat apriori bertentangan dengan kebangsaan." (ibid, hal. 195)

Di sini Natsir lebih bersemangat membela Pancasila daripada pidatonya di Karachi 2 tahun sebelumnya. Dan Pengarang amat bangga mengulanginya.

Tetapi 3 tahun kemudian, Natsir mengubah sikapnya dengan *menentang* Pancasila dalam pidato yang diucapkannya pada sidang Konstituante Bandung pada tahun 1957, seolah-olah dia lupa apa-apa yang diucapkannya sebelumnya. Memang pidato Konstituante itu bertentangan diametral 180 derajat dengan pidato Karachi dan Majalah *Hikmah,* yang dapat dibaca dalam *Risalah Konstituante* 1957 di halaman 356 sampai dengan 387. Pidato ini disambut gembira oleh kaum Muslimin karena menasikhkan (menghapuskan) apa-apa yang diucapkan Natsir di Karachi dan Majalah *Hikmah* itu. Begitulah pandangan masyarakat. Apalagi seluruh fraksi partai-partai Islam di Konstituante kompak dalam satu front menentang Pancasila. Tetapi sebaliknya dengan Pengarang yang menampakkan kekecewaannya dengan mengatakan, Natsir bergeser dalam pendiriannya. Dan demi pendidikan politik umat Islam, seorang pemimpin haruslah *konsisten.*

Memang harus diakui secara jujur, bahwa tentang Pancasila, Natsir memang kurang konsisten dalam pendiriannya, walaupun akhirnya ia berpihak kepada yang benar dan positif. Pidatonya di Karachi telah dipergunakan oleh lawan politiknya, Soekarno, dalam sebuah pidato di Jakarta untuk membela Pancasila dan menyerang ideologi Islam. Dan kini Munawir Sjadzali telah berbuat yang sama demi untuk kepentingan

politiknya pula. Bedanya cuma, Soekarno seorang *Sekularis* dan Munawir seorang Muslim yang *Rasionalis.*

Yang patut dicontoh adalah sikap konsistensinya almarhum *A. Hassan,* gurunya Natsir dalam membela pendiriannya, bila dia telah berfatwa. Sebagaimana diketahui bahwa A. Hassan berpendapat sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, *haram* hukumnya berjabatan-tangan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. (Pembela Islam, Bandung 1932). Kemudian pada tahun 1956, Majelis Tarjieh Muhammadiyah menetapkan pula dalam sidangnya yang kebetulan sesuai dengan fatwanya A. Hassan. Tetapi putusan Tarjieh itu dibantah oleh Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy, Dosen IAIN Yogyakarta dalam harian *Suara Umat,* Yogyakarta tanggal 22 Juni 1956, karena beliau menghalalkan berjabat-tangan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram.

A. Hassan merasa tersinggung oleh bantahan Hasbi Ash-Shiddieqy itu karena ia merasa juga ditujukan kepada dirinya sendiri yang sependirian dengan Muhammadiyah dalam masalah itu. Kemudian beliau berkirim surat ke Yogyakarta supaya bermunazharah dengan Hasbi secara berhadapan dalam satu Majelis. Tetapi Ustadz Hasbi menolaknya karena keberatan. Akhirnya untuk membela putusan Tarjieh Muhammadiyah itu dan juga membela pendiriannya sendiri beliau muat tulisan dalam Majalah yang beliau pimpin, *Pembela Islam* No. 7, Desember 1956, Bangil. Nomor ini khusus untuk melayani Hasbi Ash-Shiddieqy sejak halaman pertama sampai terakhir. Begitulah A. Hassan membela pendiriannya.

Beliau juga berpendirian *haramnya* bermadzhab yang beliau tulis dalam sebuah brosur bernama *Al-Madzhab.* Tetapi beliau ditantang oleh Ustadz H. Husain Al-Habsyi dari Surabaya dengan tangkisan yang dimuat dalam *Pembela Islam* No. 8, Desember 1957 sebagai nomor khusus pula. Demikianlah beliau konsisten dalam membela pendiriannya sampai wafatnya tahun 1958 di Bangil. Semoga Allah menerima amal salehnya! Amien! Demikianlah sekedar ilustrasi.

Ketuhanan Yang Maha Esa itu Tauhid?

Pengarang mengatakan, "Ketuhanan Yang Maha Esa itu, yang bagi umat Islam berarti *Tauhid* yang sesuai sudah dengan ajaran Islam" (hal. 237). Benarkah demikian? Mari kita bicara sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. *Ketuhanan* adalah kata imbuhan dengan awalan *ke* dan akhiran *an.* Kata yang seperti itu ada dua arti. Pertama, berarti menderita. Seperti *kedinginan,* menderita dingin; *kepanasan,* menderita panas. *Kehausan,* menderita haus, dan sebagainya. Kedua, berarti *banyak. Ketumbuhan,* banyak yang tumbuh, seperti penyakit campak atau cacar yang tumbuh di badan seseorang. *Kepulauan,* banyak pulau; *Ketuhanan,* berarti *banyak Tuhan.*

Jadi kata Ketuhanan Yang Maha Esa adalah *Contradictio in Terminis* (Pertentangan dalam tubuh kata-kata itu sendiri). Mana mungkin banyak Tuhan disebut yang maha esa. Dalam bahasa Arab, itu disebut "Tanaqudh" (pertentangan awal dan akhir). Logika ini jelas tidak sehat, bertentangan dengan kaidah ilmu bahasa. Jelaslah, kata *Ketuhanan* itu syirik. Dan kalau yang dituju itu memang *Tauhid*, maka rumusannya yang tepat adalah *Pengabdian kepada Tuhan Allah Yang Maha Esa.* Padahal Presiden Soeharto sendiri menegaskan: *"Jangan masukkan nilai dari paham lain (Islam, Pen.) ke dalam Pancasila" (Kompas,* 21 Mei 1991).

Pancasila dan Al-Qur'an

Untuk sampai kepada pesan terakhirnya, yaitu agar umat Islam menerima Pancasila sebagai sasaran akhir, maka pengarang dengan agak 'nekat' menyamakan Pancasila dengan Kitab Suci Al-Qur'an. "Kita juga melihat adanya persamaan termasuk juga semangatnya" (hal. 236). Mana mungkin bisa sama, yang satu ciptaan manusia biasa dan yang lain wahyu suci yang datang dari Allah SWT Yang Mahasuci dan memiliki segala sifat kesempurnaan. Yang satu ciptaan manusia yang sudah hancur di dalam kuburnya, dan yang satu firman Allah yang kekal abadi. Yang satu mempunyai kelemahan-kelemahan dan

yang lain telah sempurna lengkap takkan berubah sampai akhir zaman. Disamping itu membaca Al-Qur'an berpahala, membaca yang lain (Pancasila) tidak!

Dengan kata-kata yang *'berani'* itu, seorang Penulis dalam sebuah Majalah Islam di Jawa Timur telah mengkonfrontasikan Pengarang dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 142 dan 143 yang diawali dengan kalimat seperti ini:

> *"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka."*

Dan diakhiri dengan kalimat:

> *"Barangsiapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk) baginya." (Baca: Al-Muslimun, Nomor 254, Bangil, Mei 1991).*

Saya bertanya dalam hati sendiri, kalau hal itu ditujukan kepada Munawir, apakah tidak terlalu keras? Saya informasikan, walau bagaimanapun Munawir itu dulu orang GPII dan bahkan malah Ketua Panitia Kongres GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia) di Semarang pada tahun 1950. Saya kira dia masih bisa diajak bicara tentang nasib Islam dan umatnya. Yang jelas dia kini membawa misi atau pesan *Status Quo tentang Pancasila adalah final.* Dan itu adalah haknya sebagai politisi dan sebagai Menteri. Kita pun mempunyai hak dan kewajiban pula sebagai ideolog untuk memperjuangkan Islam sesuai dengan keyakinan kita bahwa Islam itu adalah nilai tertinggi yang jauh lebih tinggi dan lebih mulia daripada Pancasila. Dan adalah hak kita pula untuk berkata yang kita tujukan kepada Pengarang seperti apa yang pernah diucapkan Voltaire, Filosof Prancis yang terkenal: *"I don't agree with what you say bat I will defend to the death your right to say it".* Ya, *perbedaan pendapat umatku adalah rahmat,* kata Nabi.

Akhirnya saya terkenang kepada almarhum Adam Malik yang waktu itu Wakil Presiden yang berpidato pada Ulang Tahun *Syarikat Islam* yang ke-77 pada tahun 1982 di Balai Sidang

Senayan Jakarta yang juga dihadiri oleh Menteri Agama Alamsyah Ratuperwiranegara yang antara lain berbunyi demikian:

> *"Bagi kita orang Islam, tidak ada yang lebih baik sebagai pegangan yang melebihi Islam. Karena agama Islam mengurus urusan dunia dan akhirat sedang Pancasila hanya mengurus urusan dunia saja."*

Penutup

Walaupun bagaimana kita turut mengacungkan jempol kepada Pengarang yang dalam segala kesibukannya sebagai Menteri Agama masih sempat meluangkan waktunya untuk mengarang dan mengajar pada mahasiswa Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam buku setebal 240 halaman itu tidak bisa ditimpakan kepada pundak Pengarang sendiri. Dua orang doktor yang diserahi membuat kata sambutan juga harus memikul tanggung jawab. Mengapa mereka tidak mengoreksi dulu sebelum mereka membuat kata sambutan untuk itu. Kata sambutan bukanlah sekedar memuji-muji saja, tetapi juga lebih dahulu meluruskan kesalahan yang terdapat di dalam buku.

Buku ini termasuk buku yang laris yang konon dalam masa yang singkat telah mengalami cetakan ketiga kali. Dan sebagai buku pegangan untuk Pascasarjana sebaiknya untuk cetakan selanjutnya supaya *direvisi* kembali, agar bisa dipertanggungjawabkan kebenaran isinya.

Dan akhirnya mari kita simak cendekiawan Muslim yang berkata: *"Temanmu yang sejati ialah orang yang mengatakan kebenaran kepadamu, bukan orang yang hanya membenar-benarkanmu."*

JAKARTA BENTENG ISLAM

Dikala Arnold J. Toynbee, ahli sejarah Inggris yang terkenal dengan bukunya *A study of History* berkunjung ke Indonesia dan mengadakan ceramah di Universitas Indonesia sekitar tahun 1970-an yang lalu, ia mendengar adzan yang berkumandang dari masjid-masjid dan langgar-langgar di seluruh pelosok kota Jakarta dan ia berkomentar: *Jakarta adalah benteng Islam.* Dan komentar Toynbee ini tidaklah jauh dari kebenaran.

Latar Belakang Jakarta

Bicara tentang Jakarta tidak bisa dilepaskan dengan nama Ulama besar abad ke-16, Sunan Gunung Jati, salah seorang di antara Wali Songo yang sangat terkenal. Beliau sering disebut *Syarif Hidayatullah.*

Setelah tugasnya selesai mengislamkan rakyat Sunda Kelapa termasuk Rajanya yang beragama Hindu, maka Fatahillah pun pindah berdakwah ke daerah lain di bagian bumi Jawa sebelah Barat.

Tugas Islamisasi

Dalam kenyataan Sejarah Islam bahwa para Wali Songo dalam tugas Islamisasi tanah Jawa membagi tugas di antara mereka. Malik Ibrahim (Maulana Magribi), Sunan Giri (Raden Paku), Sunan Ngampel (Raden Rahmat), dan Sunan Bonang (Makdum Ibrahim), semua bertugas mengislamkan Jawa bagian Timur. Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Dradjat dan Sunan Kalijaga bertugas mengislamkan Jawa bagian Tengah. Dan Sunan Gunung Jati atau yang sering dikenal sebagai Syarif Hidayatullah bertugas mengislamkan bumi Jawa Barat yang lebih

makmur. Alhamdulillah semua para Wali itu sukses dengan gilang-gemilang menjalankan misinya, yaitu Islamisasi pulau Jawa dan karena suksesnya Islamisasi pulau Jawa itulah, beberapa puluh tahun kemudian, setelah para Wali itu berpulang ke rahmatullah, maka salah seorang Raja Jawa (Mataram) diberi gelar dengan Sultan Agung Mataram pada tahun 1641; titel yang datang dari Makkah, di kala tanah suci itu dikuasai oleh kekhalifahan Turki yang jaya. Sebagaimana diketahui nama Sultan Mataram sebelumnya adalah Panembahan Ingalogo yang artinya: Panglima yang termasyhur.

Bicara lebih lanjut tentang Fatahillah alias Sunan Gunung Djati yakni setelah beliau berhasil mengislamkan Jakarta dan sekitarnya, maka beliau pindah bergerak ke Cirebon, setelah terlebih dahulu menyerahkan Islamisasi Banten kepada putra beliau, Sultan Hasanuddin.

Di Cirebon Fatahillah juga tak kalah suksesnya dari tempat-tempat lain. Beliau tidak henti-hentinya berdakwah sampai tua hingga akhir hayatnya demi Islamisasi untuk menegakkan cita dan citra Islam, kejayaan Islam dan kaum Muslimin. Beliau wafat sekitar tahun 1570-an dan dimakamkan di Gunung Djati; dan sejak itu beliau terkenal dengan gelar Sunan Gunung Djati sampai kini. Tetapi konon sebelum wafatnya beliau telah menunjuk cucunya, Panembahan Ratu, untuk meneruskan perjuangan Islamisasi untuk daerah Cirebon dan sekitarnya. Demikianlah selayang pandang tentang suksesnya perjuangan para Wali Songo untuk mengislamkan tanah Jawa. Bahkan Diponegoro (1785-1855) memberontak kepada pemerintah kolonial Belanda karena hendak menjadi Khalifah Muslimin di tanah Jawa.

Menjaga Kemurnian Islam

Wali Songo terkenal dengan hikmah kebijaksanaan dan keahliannya dalam berdakwah. Tetapi demi menjaga kemurnian ajaran Islam, dalam satu hal mereka tak kenal kompromi, yaitu dalam bidang akidah Tauhid.

Pada abad ke-16 itu ada seorang guru Mistik (Kebatinan) yang mengajarkan ajaran *manunggal dengan Gusti Allah (Wihdatul Wujud, Pantheisme)*, sehingga dia mengaku dirinya Tuhan. Nama guru itu mirip dengan nama wanita, *Syeikh Siti Jenar*.

Karena ajaran ini berbahaya, merusak kemurnian akidah Tauhid, maka para Wali Songo bersidang dan Syeikh Siti Jenar pun dihadapkan ke hadapan Mahkamah Wali Songo yang dipimpin oleh Sunan Giri.

Mari kita ikuti sejenak sebagian dialog tanya-jawab dalam sidang itu seperti ini:

- Sunan Giri bertanya, "Mengapa ia (Siti Jenar, Pen.) tidak memenuhi kewajiban hari Jum'at, dalam rangka melaksanakan hukum dari Nabi yakni menjadikan masjid sebagai pusat dari kegiatan (melakukan shalat Jum'at, Pen.)?"

- Siti Jenar menjawab, "Tidak ada hari Jum'at dan juga tidak ada Masjid, hanyalah Tuhan yang ada. Semua yang lainnya tak mempunyai wujud kecuali Ia."

Sunan Giri memberikan tanda kepada Sunan Kalijaga yang kemudian berbicara sambil menghunus pedangnya dan berkata, "Kalau begitu apakah ini?" Siti Jenar menjawab, "Tuhan adalah yang terwujud padanya (Allah ingkang katon niki)."

Segera lehernya dipancung, kepalanya jatuh, dan tubuhnya terhempas di tanah. Arus darah merah mengalir dari tubuhnya. Sunan Kalijaga mencemoohkannya: *"Jadi Tuhan mempunyai darah merah dan badannya terhampar seperti batang pohon pisang."* (Baca: Dr. Taufik Abdullah dan kawan-kawan, Islam di Indonesia, hal. 136, Tintamas, Jakarta, 1974).[1]

---

[1] Dalam sejarah, ada dua buah Masjid yang dibangun oleh Wali Songo. Yaitu Masjid Demak di Jawa Tengah dan Masjid *Sang Cipta Rasa (Masjid Kasepuhan)* di Cirebon Jawa Barat. Di Masjid Kasepuhan inilah dilangsungkan Sidang Pengadilan yang mengadili Syaikh Siti Jenar (Syaikh Lemah Abang) yang telah menyimpang dari ajaran Islam di mana Wali Songo menghukumnya dengan hukuman mati. (Agus Mulyadi, *Kompas*, 13-11-1991).

Demikian rapinya para Wali Songo itu menjaga dan membela kemurnian Islam, pantas dan patutlah mereka berhasil dalam menjalankan misi Islamisasi di Pulau Jawa.

400 Tahun Kemudian

Begitu suksesnya Islam di pulau Jawa pada abad yang ke-16 itu, maka 400 tahun kemudian datanglah bahaya yang mengancam pertumbuhan Islam itu dengan munculnya bermacam-macam tantangan yang berasal dari Barat. Beriringan dengan datangnya penjajahan, maka datang pulalah paham *Nasionalisme, Sekularisme*, dan *Pluralisme*.

Paham Nasionalisme adalah berasal dari Ilmuan Prancis yang terkenal *Ernest Renan* (1823-1892). Kemudian paham ini tersebar di Eropa, Jerman, Italia dan di Asia: Jepang dan Indonesia. Di Jerman dia muncul dengan bentuk Nazi (Nasional Sosialisme) pada tahun 1933 dengan semboyannya yang terkenal *"Deutschland Uber Alles in der Welt"*. (Jerman di atas segala-galanya di muka bumi). Pemimpinnya Hitler, membuat neraka perang dunia ke dua yang mengerikan itu.

Di Italia nasionalisme melahirkan Fascisme dengan tokohnya Mussolini yang merebut kekuasaan pada tahun 1922 dengan menjadi Perdana Menteri sebagai diktator yang totaliter yang menyebabkan Italia kalah dalam perang dunia kedua. Akhirnya dia mati dibunuh rakyatnya sendiri dengan cara digantung terbalik, kepala ke bawah dan kaki ke atas di Milan tanggal 29 April 1945.

Nasionalisme Jepang menimbulkan Imperialisme baru di Asia. Dan dengan kekuatan angkatan perangnya, Jepang dengan Jenderal Tojo sebagai Perdana Menterinya telah menghancurkan Asia dengan apa yang dinamakannya perang Asia Timur Raya. Selama tiga setengah tahun di bawah imperialisme Jepang, Asia Raya mengalami penderitaan yang luar biasa pahit dan buasnya, terutama bagi bangsa Indonesia. Kebuasan dan kekejaman Jepang itu berakhir setelah bom atom meledak di Jepang menghancurkan kota-kota Hirosima dan Nagasaki pada

tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Jenderal Tojo sebagai penjahat perang dihukum gantung pada tanggal 23-12-1948, walaupun pada mulanya ia berusaha melakukan harakiri yang gagal.

Di Turki Nasionalisme menimbulkan musibah yang luar bisa terhadap kaum Muslimin. Di sana muncul Kemal Attaturk dengan Turki barunya sebagai diktator yang anti Islam. Ia menjalankan *sekulerisasi* di seluruh Turki termasuk menyerang kesucian agama Islam. Mari kita simak kalimat-kalimat di bawah ini:

"Mustafa Kemal memulai rezimnya dengan melancarkan kampanye caci-maki terhadap agama dan pemimpin-pemimpin agama. Ini sama sekali fanatik dan merupakan puncak dari kegila-gilaan. Adzan dalam bahasa Arab dilarang dan bahasa Turki ditonjolkan kembali. Tulisan Arab harus diubah dengan todongan pisau dan cambuk (26 Maret 1926) dan rakyat dipaksa memakai huruf latin (3 November 1928). Pemakaian fez (tarbus) dilarang dengan undang-undang (25 November 1925) dan topi model Inggris diperkenalkan secara resmi. Kemudian seluruh pakaian Barat dipergunakan. Perkataan "Islam" dicoret dari Konstitusi Turki dan demikian kasarnya perlakuan rezim sekuler terhadap agama yang menyembah Allah hingga masjid pun dipaksa untuk ditutup, misalnya dua masjid yang terkenal di Istanbul, Aya Sophia dan Masjid Fatih ditutup dan masing-masing dijadikan museum dan depot." (Baca: Khurshid Ahmad, *Islam lawan Fanatisme dan Intoleransi*, hal. 9-10, Tintamas, Jakarta, 1968). Tetapi hal ini berakhir setelah Kemal meninggal dunia tahun 1938 dan Partainya dikalahkan oleh gabungan Partai-partai Islam dalam Pemilu di tahun 1950 yang menyebabkan *Jalal Bayar* tampil sebagai Presiden Turki yang baru. Dan Turki kembali kepada Islam!

Tetapi anehnya kaum Nasionalisme di Indonesia mengagung-agungkan Kemal yang bejat itu bahkan menjulukinya sebagai "Bapak Turki", konon dia suka mabok. Dan oleh Penulis sejarah dia disejajarkan dengan Stalin dan Hitler. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar di Televisi Indonesia, seorang dok-

tor masih memuja-muja Kemal Attaturk dengan Turki barunya. Ya, kaum Nasionalisme di semua negeri mempunyai sikap yang sama, sekuler dan anti-agama.

Disamping itu di Timur Tengah Nasionalisme membawa malapetaka tersendiri. Ia melahirkan Partai Baath (Nasional Sosialisme Arab) yang sering juga disebut Nazinya Arab yang telah menyingkirkan ideologi Islam dan mengakibatkan permusuhan dan peperangan antara sesama bangsa Arab yang menguntungkan Israel dan Amerika Serikat dalam perang Teluk yang terkenal itu serta merusak citra Islam.

Di Indonesia Nasionalisme muncul dalam bentuk suatu partai Nasionalis yang didirikan orang pada tahun 1927, persis dan tepat setelah 400 tahun berdirinya kota Jakarta. Dan kebanggaan atas Nasionalisme itu telah menyebabkan Indonesia menyerang negara-negara tetangganya, Malaysia dan Singapura yang banyak memakan korban pada pihak penyerang pada zaman *Kabinet Dwikora* tahun 1960-an.

Paham Nasionalisme jelas tidak menghiraukan agama dan bersifat sekuler dan sering menentang ajaran agama terutama Islam. Memang salah satu ciri paham Nasionalisme ialah bahwa ia *netral* agama. Sedang umat Islam harus melibatkan dirinya terhadap agama yang dianutnya. Pertentangan Islam dan Nasionalisme berlangsung sejak zaman kolonialisme Belanda, zaman pergerakan sampai berlanjut kepada zaman prakemerdekaan di waktu bersidangnya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Anggota yang beragama Islam menghendaki negara yang berdasar Islam sedangkan kaum Nasionalisme menghedaki negara yang bebas dari pengaruh agama. (Baca: Mohammad Hatta, *Memoir*, hal. 435, Tintamas, Jakarta, 1979). Akhirnya tercapailah kompromi dengan lahirnya *Piagam Jakarta* yang merupakan sejarah yang paling penting sebagai dasar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Piagam Jakarta yang merupakan dokumen terpenting itu ditandatangani tepat tanggal 22 Juni 1945, ulang tahun hari jadi Jakarta yang ke-418 yang ditandatangani oleh 9 orang tokoh terkemuka Indonesia.

Disamping itu Prof. Dr. Slametmuljana membandingkan sikap pemeluk agama dengan seorang nasionalis seperti ini:

"Seseorang pemeluk agama bercita-cita meluaskan agamanya di antara orang-orang sebangsa khususnya, tetapi seorang nasionalis akan memperalat agama untuk mencapai kekuasaan politik. Bagi pemeluk agama perluasan agama adalah tujuan, bagi seorang nasionalis, agama adalah alat untuk memperkuat kekuasaan. Jadi bila agama tidak dapat memberi kesempatan untuk perluasan kekuasaan, agama harus ditinggalkan." (Prof. Dr. Slametmuljana, Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa, hal. 124).

Sedang Prof. Dr. Albert Einstein, kelahiran Jerman (1879-1955) yang bom atomnya meledak di Jepang pada tahun 1945 itu menegaskan dengan gamblang dengan kata-kata seperti ini: *"Nasionalism is an infantil disease. It is the measles of mankind." (Nasionalisme adalah suatu penyakit kekanak-kanakan. Ia adalah penyakit campak bagi umat manusia).* (*The Indonesia Times*, 27-2-1985).

Dan Nabi kita Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah membuat garis pemisah yang jelas antara Islam dan Nasionalisme dengan ucapan beliau yang terkenal: *"Bukanlah dari golongan kami orang yang menyeru kepada kebangsaan; bukanlah dari golongan kami orang yang berperang atas dasar kebangsaan dan bukan dari golongan kami orang yang mati atas dasar kebangsaan."* (Hadits Shahih, Riwayat Imam Abu Daud). (Baca: A. Hassan, *Islam dan Kebangsaan*, hal. 20, Bangil, 1984).

Ajaran Pluralisme

Di antara paham yang santer diperdengarkan orang kini adalah ajaran Pluralisme. Ajaran ini sering dicanangkan oleh mahasiswa-mahasiswa kita yang telah beroleh Doktor di negara Sekuler seperti Amerika Serikat. Maksud Pluralisme adalah kebenaran berganda, tidak satu. Sebenarnya ajaran ini ditujukan oleh kaum Deislamisasi untuk merintangi keunggulan Islam

sebagai satu-satunya kebenaran mutlak yang datang dari Allah. Bagi kaum pluralisme, agama adalah semuanya sama, sama-sama mengajarkan kebenaran; ya sama-sama benar. Karena sering dikumandangkan oleh para sarjana, banyak pula orang yang tertarik kepada ajaran yang berbahaya itu.

Memang ada dua macam kebenaran, yang relatif dan yang mutlak. Kebenaran yang relatif itulah yang berganda. Sarjana A. berbeda pendapat dengan sarjana B. yang menganggap paham dialah yang benar; sarjana C. berbeda pendapat dengan sarjana D. yang menganggap dia yang benar. Yang semuanya mereka itu menganggap dirinyalah yang benar. Itu mungkin saja, karena kebenaran yang lahir dari pikiran manusia itu adalah relatif. Tetapi lain halnya dengan kebenaran agama, ia adalah mutlak, satu dan tidak berganda, karena dia datang dari Allah yang satu pula, tunggal tanpa sekutu. Jadi kebenaran Islam itu adalah mutlak, karena dia diwahyukan Allah. Menurut Ali Imran ayat 19 dan 85, *bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah Islam; dan barangsiapa yang mencari agama yang lain dari Islam, tidak diterima, dan dia kelak di akhirat termasuk orang yang merugi.* Dan menurut Al-Maidah ayat 3, *bahwa agama yang diridhai Allah hanyalah Islam*. Jadi jelaslah dalam kebenaran tentang agama yang datang dari Allah, tidak ada *Pluralisme*. Yang benar di sisi Allah hanya satu karena Allah itu adalah satu pula.

Karena bagi kaum Pluralisme itu agama adalah sama, maka tidak menjadi soal baginya dengan siapa anaknya kawin, apakah dengan laki-laki Islam, Kristen, Yahudi, Hindu ataupun Konghucu. Dan tidak menjadi soal baginya ideologi apakah yang dianutnya, ideologi Islam atau ideologi sekuler yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Dari itu kaum Muslimin haruslah waspada, karena paham ini sekarang sedang melanda ibu kota, Jakarta, dan kota-kota besar yang lain.

Hipokrit

Di antara bahaya yang melanda Jakarta kini adalah mun-

culnya kaum hipokrit alias Munafik yang bermuka dua. Walau mengaku Islam tetapi mengecam bahkan menghina Islam dan menuduh Islam tidak mempunyai konsep tentang Negara. Apakah orang yang seperti ini membaca Al-Qur'an dengan teliti atau bukan. Kalau mata kita buta janganlah dikatakan matahari tidak bersinar. Apakah Negara-negara Islam sejak zaman nabi itu tidak mempunyai konsep kenegaraan walaupun telah berusia empat belas abad? Apakah Negara-negara Islam seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Mesir, Marokko, Saudi Arabia, Yordania, Pakistan dan Iran itu tidak mempunyai konsep tentang negara Islam? Bahkan Prof. Dr. Hazairin, SH. mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang disegani dan mantan Menteri Dalam Negeri Kabinet Ali Sastro Amijoyo mengatakan dengan tegas dan gamblang dalam bukunya *Demokrasi Pancasila* bahwa apabila rakyat Indonesia menghendaki negara Islam, tidak perlu kepada yang lain, cukup Al-Qur'an saja. Mana yang lebih pintar kita daripada Prof. Hazairin dalam Ilmu Hukum?

Memang dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi: *"Dan sesungguhnya Kami (Allah) telah menjelaskan dalam Al-Qur'an ini bagi manusia beberapa perumpamaan (Konsep), tetapi manusia itu paling banyak yang membangkang."* (QS. Al-Kahfi: 54). Konsep-konsep dalam Al-Qur'an tentang berbagai kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, hukum, pendidikan dan sebagainya tidak mendetail dan rinci, tetapi cukup dengan garis-garis besar dan pokok-pokoknya saja. Dan terserahlah kepada akal dan kecerdasan manusia menafsirkan dan menjabarkannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di negara masing-masing. Tetapi menuduh Islam tidak punya konsep tentang negara, adalah sutu penghinaan yang menyakitkan Allah dan Rasul. Allah berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan mengutuki mereka di dunia dan di akhirat, dan menyiapkan bagi mereka siksaan yang hina."* (QS. Al-Ahzab: 57). *Na'udzubillah min dzalik!*

Tetap Benteng Islam

Walaupun demikian banyak kendala yang merintangi kaum Muslimin untuk mencapai cita-citanya, namun Jakarta yang terkenal sebagai kota Proklamasi dan kota Adzan yang dikumandangkan dari lebih dua ribu masjid dari segala pelosok kota dan kampung, bersama para Remaja Masjidnya tetap merupakan *Benteng Islam* yang jaya. Yakni asal saja penduduknya meningkatkan iman dan takwanya sebagai rasa syukur kepada Khaliknya yang telah memberikan kepada bangsa Indonesia nikmat kemerdekaan sehingga mereka duduk sama rendah dan tegak sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di bawah kolong langit ini. *Hayya'alash shalah, hayya'alal Falah!* (Marilah Shalat! Marilah mencapai Kemenangan!)", kata bunyi panggilan Adzan yang terdengar setiap waktu diteriakkan oleh suara para Muadzdzin dari puncak-puncak menara Masjid di seluruh Jakarta Raya.

Mudah-mudahan berkat *Istiqamahnya* kaum Muslimin, Jakarta Insya Allah akan merupakan benteng Islam yang tak terkalahkan sepanjang abad! Amien! Dan dalam *Pemilu* yang akan datang bisakah Jakarta jadi benteng Islam yang tak terkalahkan?

Akhirnya mari simak Firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai pegangan tetap kita, dua ayat yang persis sama dalam Surat yang berbeda yang berbunyi: *"Hai Nabi, lawanlah kaum kafir dan munafik itu, dan besikap keraslah terhadap mereka!"* (At-Taubah: 73 dan At-Tahrim: 9).

Tanggapan atas Diskusi Terbatas "Kompas" tentang Pengembangan Kebangsaan

Sungguh menarik dan mengasyikkan juga membaca hasil *Diskusi Terbatas "Kompas"* tentang Pengembangan Kebangsaan yang dimuat dalam "KOMPAS" tanggal 16 Agustus 1991. Pada bagian akhir tulisan setelah mengecam *Syarikat Islam* dengan mengatakan ...." pada akhirnya SI menghadapi dilema yang tidak bisa diselesaikan dengan baik," kemudian memuji Indesche Partij di bawah Douwes Dekker yang dikatakan "memberi penyelesaian yang jitu."[1] Selanjutnya mengambil kesimpulan dengan kalimat-kalimat seperti ini: *"Akhirnya mereka yang menganut paham "pluralis"-lah, dari semua golongan yang membawa bangsa Indonesia ke kemerdekaan.* "Kesimpulan yang terakhir inilah yang patut dipertanyakan.

Karena kaum *Syarikat Islam* bukan termasuk kaum Pluralis, apakah SI tidak ikut membawa bangsa ke kemerdekaan? Kaum SI adalah kaum yang beriman kepada *kebenaran yang mutlak* yang berdasar kepada Al-Qu'ran dan Hadits yang nyata (Shahih). Tetapi kaum SI tidak pernah absen dalam arena

---

[1] Informasi "Kompas" yang mengatakan IP "memberikan penyelesaian yang jitu" adalah tidak ilmiah, karena tidak masuk akal. Mana mungkin Partai "bayi" yang lahir pada tgl. 25 Desember 1912 di Bandung dan bubar pada bulan Maret 1913, beberapa bulan kemudian, dapat memberikan penyelesaian yang jitu? (Baca: Mr. A.K. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, cetakan kelima, hal. 23, P.T. Pustaka Rakyat, Jakarta, 1964).

perjuangan menuju Indonesia merdeka sejak ia dilahirkan 16 Oktober 1905 sampai berhasil mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Sebagai bukti bahwa tiga orang di antara 9 orang penandatangan *Piagam Jakarta* adalah orang Syarikat Islam atau mantan anggota SI. Mereka itu adalah Abikusno Tjokrosujoso, Abdulkahar Muzakir dan H. Agus Salim. Sedang Soekarno adalah anak-didik dan dibesarkan di rumah Tjokroaminoto dan bahkan kemudian diambil jadi menantu gurunya itu. Sedang Bung Hatta adalah simpatisan yang setia kepada SI, karena seperti diakuinya sendiri bahwa tokoh Wakil Ketua SI, Abdul Muislah yang membuka matanya dalam melihat dunia politik. (Baca: Mohammad Hatta, Memoir, Tintamas, Jakarta, 1979). Ya, walaupun Syarikat Islam tidak termasuk pluralis, tetapi SI telah mengantarkan bangsa Indonesia sampai ke pintu gerbang kemerdekaan. Dan jasanya tidak kalah dengan siapa pun juga.

Disamping itu agak terasa aneh analisa Diskusi Terbatas "Kompas" yang menimbulkan kesan bahwa dia telah mengagungkan Indische Partij, perkumpulan kaum Indo-Eropa yang tidak berakar kepada rakyat Indonesia, disamping itu mengecilkan arti Syarikat Islam yang berakar ke dalam lubuk hati berjuta-juta rakyat Indonesia sehingga SI digelari orang "Partai Rakyat Desa". SI telah dipandang Parlemennya Rakyat tempat rakyat membicarakan nasibnya dan sekaligus menjadi ujung tombak rakyat menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Akhirnya dengarlah *Korver* berkata tentang SI seperti ini: "*Dengan memilih Islam sebagai identitasnya: Sarekat Islam memastikan diri menjadi sarana yang ampuh dalam cita-citanya.... Dan mengingat dia di sini pada tingkat yang cukup tinggi juga berhasil, dapatlah kita menganggap Sarekat Islam sebagai gerakan, yang telah memberikan sumbangan penting bagi penyatuan Indonesia.*" (A.P.E. Korver, Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil? Grafitipers, hal.271, Jakarta, 1985).

PERJUANGAN POLITIK ISLAMISASI DI INDONESIA

1. Menuju Republik Indonesia

Perjuangan menuju Republik Indonesia adalah melalui proses yang cukup panjang. Proses Islamisasi yang berhasil dicapai Wali Songo yang sukses dalam mengislamkan tanah Jawa pada pertengahan abad ke-16, akhirnya tersendat setelah kedatangan Belanda yang datang menjajah Indonesia lebih tiga ratus tahun lamanya (1602-1942).

Tetapi setelah para Wali itu wafat, maka perjuangan Islamisasi Indonesia dilanjutkan oleh para pahlawan Indonesia yang mengadakan perlawanan bersenjata terhadap Belanda. Muncullah Imam Bonjol dengan perang Paderinya yang berperang menghalau Belanda yang berlangsung dari tahun 1821 sampai dengan 1837 di Sumatera Barat. Diikuti oleh Diponegoro di Jawa dari tahun 1825 sampai dengan tahun 1830. Disambung oleh Cik di Tiro di Aceh dari tahun 1873 sampai tahun 1904 yang cukup sengit yang terkenal dengan perang tiga puluh tahun yang cukup melelahkan Belanda, dan yang telah menewaskan panglima pasukan Belanda, Jenderal Kohler; mati tertembak tidak jauh dari masjid Baiturrahman Banda Aceh.

Semua pahlawan Indonesia itu berjuang selain dari mengusir kaum penjajah, yang lebih utama adalah menuju kemerdekaan dan Islamisasi Indonesia.

Tetapi setelah perlawanan mereka itu dapat dipatahkan Belanda, maka timbul perlawanan secara modern, yaitu berjuang melalui organisasi yang diarahkan untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka. Dengan harapan melalui kemerdekaan

itu, Islamisasi akan berjalan dengan lebih lancar. Timbullah organisasi Syarikat Dagang Islam yang kemudian berganti nama dengan Syarikat Islam yang menuntut kemerdekaan Indonesia atau Indonesia berdiri sendiri yang dipimpin oleh Haji Samanhudi dan HOS Tjokroaminoto.

Kemudian disusul oleh organisasi dan partai politik lain yang semuanya bermuara kepada tercapainya Indonesia Merdeka. Dan akhirnya perjuangan melalui organisasi itu membuahkan terwujudnya Proklamasi Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.

2. Kendala-kendala

Ada dua pokok cita-cita Syarikat Islam. Pertama, kemerdekaan Indonesia, dan kedua, hendak menjalankan Islam seluas-luasnya dan sepenuh-penuhnya. Atau dengan bahasa lain, Islam Raya dan Indonesia Raya. Cita-cita yang pertama telah berhasil dengan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta.

Cita-cita yang kedua banyak menemui kendala atau hambatan di sana-sini.

1. Dicoretnya kata "Islam" dalam UUD 1945, baik dalam Pembukaan maupun dalam tubuh Undang-undang itu sendiri. Pencoretan itu terdapat pada pasal 6 dan pasal 29.
2. Melalui Asas Tunggal Pancasila sebagai putusan Sidang MPR pada tahun 1983, sehingga partai-partai dan ormas Islam tidak diperkenankan lagi memakai dasar Islam yang sudah tercantum puluhan tahun sejak sebelum Indonesia merdeka di dalam Anggaran Dasar organisasi mereka.

   Dengan memakai kata "Asas Tunggal" maka mereka mengagung-agungkan Pancasila di atas segala-galanya, bahkan mengungguli Islam. Padahal Nabi Muhammad telah menegaskan dalam sabda beliau yang terkenal, "Islam itu agung dan tidak ada yang dapat mengunggulinya." (*Al-Islamu ya'lu wala yu'la 'alaihi*).

Mengagung-agungkan seperti itu bisa membawa orang Islam menjadi munafik dan syirik serta merusak iman kepada Allah. *Na'udzubillahi min dzalik*! Dan apakah mereka merasa lebih pintar dan lebih benar daripada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?

3. Dengan memanipulasi sejarah. Sudah jelas bahwa SDI atau SI itu lahir 3 tahun lebih dahulu dari Budi Utomo, tetapi yang diperingati sebagai tonggak hari kebangkitan Nasional bukan SI tetapi Budi Utomo yang terkenal sebagai alat penjajah Belanda dan lagi anti Islam. Sungguh mereka itu melukai perasaan umat Islam disamping membuat skandal dalam penulisan sejarah. Mereka mewariskan sesuatu yang tidak benar kepada generasi yang akan datang. Apakah itu adil? Dan generasi muda yang masih murni dan ingin kemurnian sejarah yang akan mewarisi dan dipedomi mereka, harus mengeritik dan meluruskan hal itu dengan sikap yang kritis, demi kebenaran sejarah itu sendiri. Dan semua kendala itu merupakan serangan atau ofensif dan pengkhianatan terhadap Islam. Serangan balik? Kosong!

Seribu aneh dan ajaib bahwa SI di zaman penjajahan Belanda diizinkan memakai Islam sebagai asas partainya, tetapi setelah Indonesia merdeka parpol dan ormas Islam tidak diperkenankan lagi menjadikan Islam sebagai asas partainya. Ya, habis manis sepah dibuang! Padahal SI-lah yang berdiri paling depan memperjuangkan kemerdekaan itu. Inilah gejala tidak sehat dan indikasi bahwa negara menjurus kepada Deislamisasi yang berbahaya yang ingin menjauhkan masyarakat dan negara dari Islam.

Generasi penerus dan pelurus yang mempunyai jiwa dan semangat Islam harus tampil ke depan untuk berbuat sesuatu yang positif untuk menyelamatkan Islam dan negara dari bahaya pengaruh kaum Islam Phobi yang telah menyimpang dan melenceng dari konstitusi negara. Keadaan ini harus diakhiri segera dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut sampai kiamat. Bukankah membiarkan yang batil adalah dosa?

3. Perjuangan Ideologi

Sadarilah bahwa kini tidak ada lagi partai Islam yang sejati. Partai Islam ialah partai yang berasaskan Islam dan berjuang untuk menegakkan hukum syari'at Islam dalam masyarakat dan negara. Kalau tidak demikian, itu bukanlah partai Islam walau anggotanya orang-orang Islam.

Bukankah kondisi dan situasi ini jauh lebih buruk dari zaman penjajahan kolonial Belanda dulu?

Indonesia kini secara ideologis telah hilang dari apa yang dicita-citakan oleh kubu Islam dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai pendiri Republik Indonesia. Dan umat Islam menjadi terapung-apung di atas arus gelombang sejarah sebagai penonton, dan bukan sebagai pelaku. Ya, penonton yang tidak berdaya terhadap sejarah yang sedang berjalan. Dan yang muncul berperan adalah bekas-bekas boneka Belanda yang pintar bermain sandiwara. Mereka merusak Islam dan Negara, dan mereka merusak Demokrasi! Dan ini adalah aib nasional. Ini adalah noda bagi sejarah Indonesia. Itu disebabkan karena kita mengabaikan sejarah termasuk latar belakang sejarah politik pribadi seseorang tokoh.

Wahai generasi yang beriman, berpikirlah dengan akal sehat, dan kemudian bangkitlah berjuang untuk membela kebenaran Islam yang kini dalam krisis! Allah beserta kita!

4. Krisis Identitas (Jati Diri)

Kini banyak orang yang telah dilanda krisis identitas, sehingga mereka mengorbankan jati dirinya. Mereka bersikap seperti bunglon mengubah-ubah warnanya. Tak berani mengatakan kebenaran Islam, dan sikapnya selalu berubah-ubah sesuai dengan sikon.

Khalifah Ali bin Abi Thalib sangat mencela orang-orang yang berubah-ubah sikap itu. Dia mengatakan bahwa Allah sangat benci kepada orang-orang yang berubah-ubah warna, tak berani menampilkan jati dirinya:

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَلَوِّنِيْنَ.

"Allah tidak sayang kepada orang yang berganti-ganti warna."

5. Iman dan Istiqamah

Inilah sebenarnya kekayaan rohani bagi seorang Muslim yang amat tinggi nilainya. Tanpa iman, pertahanan diri kita mudah rubuh dan manusia hidup mengambang tanpa arah. Tanpa Taqwa, manusia mudah melanggar aturan Al-Qur'an dan jiwanya mudah dipermainkan syetan.

Pada suatu ketika para shahabat melihat Rasulullah bertambah tua dan ubannya bertambah banyak. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau kelihatan bertambah tua?" Rasulullah menjawab, "Yang membuat aku beruban adalah Surat Hud." Di bawah ini saya turunkan Surat Hud yang membuat Nabi beruban itu:

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. ﴿هود: ١١٢-١١٣﴾

"Maka bersikap Istiqamahlah engkau sebagai apa yang diperintahkan kepadamu, begitu juga dengan orang yang taubat bersamamu, dan jangan engkau melanggar batas! Sesungguhnya Dia (Allah) melihat dengan jelas apa yang kamu lakukan! Dan janganlah kamu cenderung berpihak kepada mereka yang zhalim, niscaya kamu disentuh api neraka, dan tidak ada bagimu para pembela selain Allah, kemudian kamu tiada mendapat pertolongan." (QS. Hud: 112-113)

Disamping itu baik pula direnungkan ayat-ayat di bawah ini terutama bagi para ilmuan:

قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. ﴿الإسراء: ١٠٧-١٠٩﴾

"Katakanlah, 'Berimanlah kamu kepada Al-Qur'an itu atau tidak beriman (terserah). Sesungguhnya orang-orang yang berilmu sebelum turunnya, apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka bertiarap sujud atas keningnya.' Dan mereka berkata, 'Maha Suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami pasti dipenuhi'. Dan mereka tiarap atas kening mereka sambil menangis, dan Al-Qur'an itu menambah khusyu' hati mereka." (QS. Al-Isra': 107-109)

Disamping itu untuk mendukung dan menafsirkan ayat-ayat di atas silakan simak Hadits Nabi seperti tersebut dibawah ini:

عَنْ أَوْسَ بْنِ شَرَحْبِيْلَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيُقَوِّيَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ. ﴿رواه البيهقي﴾

"Dari Aus bin Syarahbil bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, 'Barangsiapa yang berjalan bersama orang zhalim untuk memperkukuh kedudukannya, padahal dia tahu bahwa orang itu zhalim, maka sungguh dia telah keluar dari Islam'." (HR. Imam Baihaqi)

Alangkah beratnya sangsi hukuman Allah dan Rasul bagi orang yang menjadi boneka penguasa yang zhalim! Dia telah keluar dari Islam. Dari itu jangan bersikap yang membuat Nabi kita beruban! Sekarang apakah definisi Istiqamah yang mahal itu? Istiqamah ialah senantiasa konsisten terus-menerus berada dalam jalur kebenaran yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Orang yang istiqamah ialah orang setia kepada fitrah kejadiannya seperti ikan di laut senantiasa tawar, kecuali kalau dia telah mati diasinkan para penangkap ikan. Orang yang Istiqamah pantang menyerah, pantang didekte oleh lawannya. Kalau perlu dia harus menyongsong arus yang keras sekalipun seperti halnya ikan Salmon di Amerika Serikat yang berani menyongsong arus "Air Terjun Niagara" yang terkenal sangat deras arusnya itu dan berhasil mencapai tujuannya. Orang istiqamah pantang berubah oleh situasi dan kondisi. Ia tidak kuning karena kunyit, tidak hitam karena tinta, tidak merah karena darah, tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan dan tidak asin karena garam. Ia senantiasa setia kepada asas dan kepribadiannya. Ya, umat Islam kini sangat mengharapkan generasi penerus dan pelurus serta pembaharu yang senantiasa Istiqamah seperti tersebut itu!

Dengan adanya iman dan taqwa yang senantiasa menyala di dalam dada para pemuda kita, insan-insan istiqamah itu insya Allah akan mucul kepermukaan untuk membela Islam yang dalam keadaan krisis seperti sekarang ini, agar tidak menyerah dan tiarap selama-lamanya. Amien! Mari terus berdakwah dan berjihad, demi Islamisasi Indonesia! Ya, kita berjuang menuju RI berdasarkan Islam! Perjuangan ini adalah *to be or not to be*! *Billahi Fi Sabielil Haq*!

KEMBALI KEPADA GARIS PANGLIMA BESAR JENDERAL SUDIRMAN

Pernyataan Kepala Staf Sospol ABRI Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono di Markas ABRI Cilangkap kepada wartawan yang mengatakan bahwa ABRI sedang mencermati aspirasi yang berkembang di masyarakat tentang peranan Dwifungsi ABRI, bagaimana ABRI menarik diri dari berbagai posisi sipil dewasa ini (Kompas, 26-5-1998) adalah merupakan angin segar yang berhembus sepoi-sepoi dalam arena reformasi yang bergejolak di Republik Indonesia dewasa ini.

Berkaitan dengan niat ABRI yang tulus itu, maka Penulis terkenang kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman sebagai Bapak ABRI yang sejati, seorang Jenderal yang shaleh dan sederhana yang menjadi teladan bagi kita bersama, seorang yang mempunyai disiplin yang tinggi, konsekuen dan konsisten dalam garis politiknya.

Garis Politik Sudirman

Sebagaimana diketahui bahwa Panglima Besar Jenderal Sudirman tidak setuju tentara melakukan politik praktis, ya, tidak setuju terlibat dalam berbagai politik praktis.

Pada tahun 1946 dalam sebuah pidato beliau dalam rapat umum Persatuan Perjuangan yang diketuai oleh Tan Malaka dengan anggota-anggotanya dari berbagai partai politik antara

lain Masyumi, PNI dan lain-lain, Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman berkata antara lain, "Kabinet boleh berganti 5 kali satu hari, tentara tetap tentara." (Mr. Mhd. Yamin, Sapta Dharma, hal 160, Islamiyah, Medan, 1950).

Dalam kata-kata beliau yang merupakan ketegasan sikap sebagai seorang pemimpin yang sekaligus merupakan amanat dan pesan kepada seluruh jajaran ABRI, jelas bahwa ABRI tidak boleh tergiur dan masuk ke dalam kancah politik praktis, karena itu bukan bidang pengabdian tugasnya. Dan dalam hal ini beliau membuktikan kesetiaannya akan garis politiknya dengan konsisten.

Di kala tentara Belanda menyerbu Ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948 dan Presiden bersama semua menteri telah menyerah dan ditangkap Belanda sebagai tawanan politik, maka hal itu sebenarnya, kalau dia mau adalah momentum yang tepat bagi Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk mengambil alih kekuasaan sebagai Presiden Republik Indonesia.

Tetapi hal itu tidak dilakukannya, karena beliau setia kepada garis politiknya secara konsekuen dan ingin memberi contoh kepada anak buahnya bahwa tentara tidak boleh campur dalam usuran politik praktis. Dan waktu Syafruddin Prawiranegara tampil sebagai Presiden Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tanggal 22 Desember 1948, maka Jenderal Sudirman mengirim kawat ke Sumatera menyokong dan berdiri di belakang Mr. Syafruddin Prawiranegara. (Telegram Panglima Besar ABRI itu dapat dibaca kembali dengan lengkap dalam majalah Gema Angkatan '45 No.20, Jakarta Agustus 1977 Edisi Khusus Peringatan Hari Proklamasi R.I.).

Berbagai Penyimpangan

Panglima Besar teladan itu wafat di Rumah Sakit Magelang pada tanggal 29 Januari 1950 setelah mengidap sakit paru-paru beberapa lamanya.

Dan sedihnya pula dua tahun sepeninggal Sudirman tokoh-tokoh Militer (TNI) menyimpang dari garis politik Panglima Besarnya.

1. Demontrasi Militer ke Istana Merdeka

Pada tanggal 17 Oktober 1952 terjadilah di Jakarta demontrasi satu Batalion tentara ke Istana Negara Jakarta yang terkenal dengan peristiwa 17 Oktober. Dengan moncong meriam dihadapkan ke Istana di mana sedang berkumpul Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta, pihak tentara mendesak dibubarkannya Parlemen dan mengadakan Pemilihan Umum. Tetapi setelah Presiden berpidato di hadapan para demonstran, mereka mundur teratur dengan membawa kembali meriam ke tempatnya semula.

Suasana Jakarta waktu itu sangat mencekam, dan masyarakat mengira akan terjadi kup. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Yang bertanggung-jawab atas demonstrasi yang gagal itu adalah antara lain tokoh-tokoh militer bekas-bekas KNIL (baca: Bekas tentara Belanda): A.H. Nasution, T.B. Simatupang, dan Kemal Idris yang bukan bekas KNIL.

Dengan jujur beberapa tahun kemudian, mantan Kepala Staf Angkatan Perang waktu itu mengatakan antara lain: "Peristiwa itu merupakan titik tolak hilangnya kepercayaan TNI terhadap kejujuran politisi sipil", kata Jenderal Purnawirawan T.B. Simatupang. Sedang Jenderal A.H. Nasution, Kepala Staf Angkatan Darat waktu itu berkata dengan pengakuan yang tulus pula seperti ini, "Sejak saat itu TNI terlibat dalam politik praktis secara terbuka." (Tempo, 18 Oktober 1986).

2. Dwifungsi ABRI

Setelah terjadi peristiwa G.30 September PKI yang gagal itu, maka Jenderal A.H. Nasution melanjutkan gagasan politiknya yang amat terkenal saat ini, Dwifungsi ABRI. Nasutionlah yang menjadi arsitek dan konseptor Dwifungsi ABRI itu yang muncul kepermukaan sekitar tahun 1966 pada awal Orde Baru yang kemudian menjadi "Penjajahan Baru."

Maksud Jenderal Nasution dengan Dwifungsinya hanya untuk sementara, yaitu sampai situasi keamanan stabil dan mantap mengingat Bung Karno masih bermain di belakang layar setelah gagalnya G.30 S itu.

Dan dia menyerahkan untuk menggulir dan menjalankan mesin Dwifungsi itu ke tangan orang lain yang belum dikenal beliau watak kepribadiannya, yaitu Jenderal Soeharto. Ternyata tamaknya akan harta-benda dan hausnya kepada kekuasaan sungguh luar biasa! Di sinilah letak kekeliruan Nasution, dia tidak konsekuen! Mengapa tidak dia sendiri yang tampil menjalankannya, padahal dialah tokoh pimpinan tentara yang oleh masyarakat dipandang paling berhak menjalankan konsep yang dirancangnya sendiri. Lagi pula waktu itu dialah perwira yang lebih senior di kalangan tentara. Dan mana tahu Soeharto bahwa Dwifungsi itu hanya untuk sementara. Karenanya dia pergunakanlah kesempatan itu sesuai dengan selera dan ambisinya, dan keenakan sampai dia berkuasa lebih 32 tahun. Dan tidak ada di dunia ini dalam sejarah sebuah negara demokrasi, seorang Presiden yang berkuasa selama Soeharto, kecuali dalam negara komunis seperti Fidel Castro di Cuba yang berkuasa sejak tahu 1959. Dan bagi Jenderal Nasution sendiri, Dwifungsi ABRI menjadi bumerang, karena dia sendiri dicekal berobat keluar negeri, dan baru diizinkan setelah dia sakit parah. Cukup menyedihkan bahwa ketika dia berada di Masjid Istiqlal untuk turut menyalatkan jenazah mantan Wakil Presiden Adam Malik, dia didorong ke luar oleh Intel ABRI, tidak boleh turut shalat. Namun demikian, Jenderal A.H. Nasution tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab atas dosa dan akibat buruk dari Dwifungsi ABRI itu yang telah merusak masyarakat dan negara! Dan cukup ironis bahwa yang turut melakukan penyimpangan adalah bekas para ajudan Panglima Besar sendiri di zaman Revolusi. Mereka itu adalah Cokropranolo, jadi Gubernur DKI Jakarta; Supardjo Rustam, Menteri Dalam Negeri; dan Soeharto, Presiden RI. Atau seperti apa yang diucapkan Nuku Suleman dari balik dinding tembok penjara Cipinang dengan istilah

SDSB yang dipelesetkannya dengan kata-kata "Soeharto Dalang Semua Bencana." (Kompas, 29-5-1998). Sementara itu seorang terdakwa berkata dalam pledoinya, antara lain, "Tuan Hakim, apakah saya yang patut duduk di bangku terdakwa ini ataukah Soeharto?" Ya, Soeharto telah memainkan politik belah bambu, satu diinjak dan yang lain diangkat!

3. KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

Kata orang, kekuasaan itu bagaikan orang meminum air laut, makin banyak diminum makin haus. Apalagi bila yang berkuasa itu seorang jenderal. Seorang budayawan dan sejarawan Inggris terkenal, Lord Acton, pernah berucap, "Power tends to corrupt, and the absolut power corrupt absolutely." (Kekuasaan cenderung untuk melakukan korupsi, dan kekuasaan yang mutlak korupsi secara mutlak pula).

Pernyataan Lord Acton ini terjadi di banyak negara, tetapi dalam negara kita terjadi secara mencolok sekali. Prof. Dr. Sumitro, Bapak Ekonomi Indonesia mensinyalir beberapa waktu yang lalu, bahwa Anggaran Belanja Negara kita bocor sebanyak 30%. Dan Baharuddin Lopa Sekjen Komnas HAM yang terkenal mengatakan, bahwa separuh kekayaan negara masuk ke kantong-kantong para pejabat. Alangkah dahsyatnya korupsi di bawah Dwifungsi ABRI ini! Pantaslah lembaga Riset di luar negeri menjuluki Indonesia negara yang paling korup di Asia dan mungkin juga di dunia. Karenanya utang luar negeri Indonesia paling besar dibandingkan dengan negara-negara pada empat benua di dunia ini. Jumlahnya kini diperkirakan telah lebih 150 milyar dollar Amerika Serikat, dan kalau dirupiahkan di saat rupiah terpuruk ini akan merupakan angka yang panjang dan mengerikan sekaligus memalukan.

Ya, korupsi telah membudaya, kata Bung Hatta.

Menurut hasil penelitian Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI), harta kekayaan mantan Presiden Soeharto dan keluarganya diperkirakan mencapai jumlah Rp. 200 trilliun (Republika, 2 Juni 1998). Soeharto mengaku bahwa dia dulu keluarga

miskin, tetapi kini kekayaannya sebanyak itu. Dari mana uang itu? Soeharto telah melanggar sumpah jabatannya sebagai Presiden!" Soeharto penuh manipulasi," kata Frans Seda, mantan Menteri Keuangan Orde Baru. (TV Indosiar 18-12-1998).

Soeharto mengatakan bahwa dia tidak punya uang sepeser pun di luar negeri; pernyataan ini di bantah oleh Majalah *Time* edisi Asia yang terbit tgl. 17 Mei 1999. Menurut *Time*, kekayaan Soeharto sekeluarga yang disimpannya di Bank Austria adalah sebanyak 15 milyar dollar A.S. atau 120 triliun rupiah. (Republika 18-5-1999).

Tentang kolusinya Pejabat Tinggi Negara dengan kaum yang bermata sipit, hal itu sudah menjadi rahasia umum. Hal itu telah menyebabkan Liem Sioe Liong dan Bob Hasan telah menjadi kaya raya; disamping itu kekayaan dan perusahaan keluarga Soeharto sudah sangat mencolok seperti yang diungkapkan Majalah Warta Ekonomi No.02, Juni 1998. Ya, korupsi dan kolusi telah melahirkan Karun-karun Indonesia yang tidak kalah tamaknya daripada Karun Mesir abad silam yang ditenggelamkan Allah dengan istananya ke dalam bumi dan tak seorang pun dapat menolong. (Al-Qashash: 81).

Tentang nepotisme dalam politik adalah lebih mencolok lagi yang belum pernah dikenal dalam sejarah suatu negara demokrasi. Soeharto tanpa malu-malu sedikit pun untuk mengangkat anaknya Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut menjadi Menteri Sosial. Sejelek-jeleknya Presiden Soekarno, dia masih punya malu untuk mengangkat anaknya jadi Menteri.

Sidang MPR yang berlangsung awal Maret 1998 yang lalu adalah merupakan sandiwara politik kaum nepotisme belaka. Pada hari pertama bapaknya naik panggung berpidato, dan kemudian para anggota bertepuk tangan dengan riuh. Pada hari yang kedua tampil pula anaknya berpidato, dia memuji ayahnya yang jadi Presiden yang berpidato terlebih dahulu. Setelah selesai juga disambut tepuk tangan riuh. Tentang kritik, itu jangan diharapkan, akan jauh sama sekali. Mungkinkah seorang anak akan mengecam ayahnya di muka umum, walaupun kesalahan-

kesalahan ayahnya telah bertumpuk-tumpuk dan negara telah terpuruk ke dalam lembah kehinaan? Tentu tidak mungkin! Demikian pula para anggota MPR yang lain, mereka itu tak ubahnya seperti robot-robot yang diorganisir, tidak akan berani melawan arus. Mereka berperilaku bagai patung-patung 5 D (Datang, Duduk, Dengar, Diam dan Duit). Tetapi mereka harus dipandang sebagai wakil rakyat yang harus dihormati, walaupun fakta sebenarnya mereka tak lain dari robot (menurut istilah Mohammad Assegaf SH, Pengacara Soeharto: bebek-bebek) sebuah rezim yang sedang berkuasa mutlak, tidak boleh disanggah. Sungguh sidang MPR sandiwara!

Dan cukup mengherankan bahwa para Sarjana, Ulama dan Da'i yang menjadi anggota DPR/MPR yang sering berteriak-teriak di hadapan umat di dalam masjid, tetapi di muka lembaga tinggi negara itu mereka diam membisu seribu bahasa bagaikan patung. Mereka hanya jadi tukang angguk dan Yes Men belaka! Marilah kita sajikan keluarga kaum nepotisme yang duduk dalam DPR/MPR setelah Pemilu 1997 yang lalu seperti tersebut di bawah ini, kita turunkan sebagian saja sekedar sebagai bukti:

1. Keluarga Soeharto (Mantan Presiden RI)
   a. Siti Hardiyanti Rukmana, Putri sulung, anggota MPR.
   b. Bambang Triatmodjo, putra ketiga, anggota MPR.
   c. Halimah Triatmodjo, menantu, anggota MPR.
   d. Siti Hediati HP, putri keempat, anggota MPR.
   e. Hutomo Mandala Putra. putra kelima, anggota MPR.
   f. Sudwikatmono, kerabat, anggota MPR.
   g. H. Probosutedjo, kerabat, anggota MPR.
2. Keluarga Jenderal Wiranto (Menhankam/Pangab)
   a. Ny. Rugaiya Usman Wiranto, istri (sudah mundur)
   b. Amalia Santi, putri sulung (sudah mundur)
3. Keluarga Harmoko (Ketua DPR/MPR)
   a. Harmoko, ketua DPR/MPR.
   b. Ny. Sri Romadhiyati Harmoko, istri, anggota MPR.

c. Adi Sutrisno, adik, anggota MPR.

4. Keluarga Ginandjar Kartasasmita (Menko Ekuin)
   a. Ny. Dra. Hj. Gunarijah RM Kartasasmita, adik, anggota MPR.
   b. A. Gumiwang Kartasasmita, putra, anggota MPR.
   c. Agus Guriaya Kartasasmita, adik, anggota DPR.[1]

Sebagai sedikit perbandingan marilah kita menoleh ke negara sahabat kita, Pakistan, yang juga pernah melakukan KKN. Perdana Menteri Benazir Bhutto, anak Perdana Menteri Ali Bhutto yang mati di atas tiang gantungan rezim militer Ziaul Haq, juga nepotisme, dengan mengangkat ibu dan suaminya sebagai menteri. Tetapi Presiden Pakistan, Ghulam Ishaq Khan, memecatnya dengan tuduhan korup, nepotisme, dan tidak bisa lagi mempertahankan kepercayaan rakyat terhadap dirinya. Begitulah Benazir Bhutto, dan demikian pula halnya Soeharto yang "dipecat" rakyat Indonesia, yaitu oleh para mahasiswa revolusioner Angkatan 98 yang militan, pelopor dan pahlawan reformasi.

Namun demikian kita cukup prihatin sekaligus geli jika menyimak pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berbunyi: "Rasa syukur MUI lahir daripada keyakinan bahwa kepemimpinan H.M. Soeharto telah teruji dan masih amat dibutuhkan dalam mengatasi keadaan krisis yang dihadapi bangsa dewasa ini." (Kompas, 11-2-1998).

Dalam hati kita bertanya, "Itu sandiwara politik ataukah kultus individunya Ulama terhadap Umara? Di mana terletak amar makruf nahi munkar? Di mana terletak Ulama sebagai pewaris para Nabi?" Tampaknya Ulama jelas sudah ketinggalan zaman! Sungguh sayang, Ulama tidak arif membaca peta situasi politik! Ya, mengapa Ulama menjadi boneka untuk membela yang batil? Quo vadis MUI?

---

[1] Tim Komisi VI DPR RI yang mengadakan kunjungan kerja ke Rumah Sakit UKI Jakarta diusir oleh para mahasiswa UKI dengan alasan bahwa anggota-anggota DPR hasil Pemilu 1997 adalah robot-robot Soeharto belaka, seperti ditayangkan oleh TV Indosiar pada tanggal 28 Juli 1998.

4. Asas Tunggal Pancasila dan SARA

Inilah produk bikinan Orde Baru yang paling kontroversial, paling menekan kaum agama. Asas Tunggal Pancasila dan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) terkesan aroganisme tokoh-tokoh Orde Baru karena mereka telah menempatkan dirinya di atas kebenaran agama Allah. Satu-satunya asas, berarti dia sendiri yang benar, dan orang lain salah semua.[1]

Orde Baru telah mendramatisir Pancasila sebagai satu-satunya asas! Congkak! Bung Karno sendiri sebagai pencetus dan arsitek Pancasila tidak pernah mengatakan bahwa Pancasila itu ideologi negara, dan tak pernah mengatakan harus merupakan satu-satunya asas. "Pancasila hanyalah sekedar filsafat negara belaka, bukan ideologi," kata Presiden Soekarno.

Kalau Orde Baru mengatakan Pancasila harus satu-satunya asas bagi ideologi negara dan masyarakat, itu berarti Pancasila di atas kitab Suci, seperti Al-Qur'an dan Injil, umpamanya; dan juga berarti bahwa para tokoh rezim Orde Baru lebih tinggi daripada para Nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan kebenaran Kitab Suci kepada seluruh umat manusia. Dan kalau yang boleh tampil hanya partai yang berdasar Pancasila saja, berarti Orde Baru bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), bertentangan dengan demokrasi kedaulan rakyat, dan bertentangan dengan UUD'45 pasal 28. Dari itu bertaubatlah! Apakah mereka lupa sejarah bahwa yang memperjuangkan kemerdekaan ini di zaman penjajahan adalah partai-partai agama dan nasional yang tidak satu pun di antara semuanya itu berasaskan Pancasila? Kalau di zaman penjajahan ada partai-partai agama (Islam), mengapa di zaman merdeka

---

[1] Komite Umat Islam untuk Reformasi dan Konstitusi Nasional menggelar aksi di Kantor Sekretariat Negara, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Kehakiman secara berturut-turut, Rabu (29-7-1998). Dalam aksinya, Komite Umat Islam yang diketuai oleh Eggy Sudjana itu menuntut pencabutan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi, pengusutan tuntas atas peristiwa Tanjung Priok 1984, dan pembebasan tahanan/narapidana politik Islam. (Kompas, 30-7-1998).

tidak diperbolehkan?

Perlu diingat bahwa Pancasila itu adalah ajaran Majapahit seperti ditegaskan oleh Permadi, SH dalam Majalah TEMPO beberapa waktu yang lalu. Kalau begitu selama ini tanpa disadari kita telah berada di zaman Majapahit yang syirik dan bertangan besi yang penuh dengan pujian kepada dewa-dewa yang dimurkai Allah. Ya, kita harus berpikir historis dan ideologis agar kita tak terumbang-ambing dihanyutkan arus tanpa arah, ya, arus kemusyrikan dan kebatilan. Pantaslah langkah kita dimurkai Allah selama Orde Baru yang berakhir dengan kegagalan yang memalukan. Tetapi setelah Majapahit runtuh pada tahun 1478, maka muncullah kerajaan Demak dengan Wali Songonya yang terkenal.

Memang di zaman Panglima Besar Sudirman yang shaleh itu memimpin tentara, tidak dikenal istilah SARA. Di zaman Sudirman, di zaman revolusi fisik demokrasi berkembang baik, dan tentara berjuang bahu-membahu dengan rakyat membela negara dan demokrasi.

Adapun Asas Tunggal Pancasila dan SARA adalah hasil bikinan tiga tokoh militer yang diragukan masyarakat komitmennya kepada agama. Mereka itu adalah Soeharto, Amir Machmud dan Soedomo. Masing-masing telah cacat di mata masyarakat. Soeharto telah menyengsarakan rakyat, menyesatkan bangsa dan merusak Demokrasi serta merusak citra negara di mata rakyat dan luar negeri. Amir Machmud oleh Angkatan 66 digelari dengan Buldozer dan bicara asal bunyi, serta sangat anti Islam. Sedang Soedomo terkenal dengan katabelecenya yang telah membobol Bapindo Rp. 1,3 triliun serta berkolusi dengan Edy Tanzil si mata sipit yang telah raib entah ke mana. Mengapa dia tidak diadili? Padahal si Maman Pegawai Bapindo terpuruk dalam penjara Salemba sampai mati!

5. Tragedi Universitas Trisakti

Penembakan oknum ABRI terhadap beberapa mahasiswa Tri Sakti 12 Mei 1998 telah memicu timbulnya kemarahan selu-

ruh mahasiswa di seluruh Indonesia kepada ABRI, sehingga citranya rusak di mata masyarakat dalam negeri, apalagi peluru tajam yang berlumur darah itu telah merenggut nyawa tidak kurang dari empat orang mahasiswa yang gugur sebagai pahlawan reformasi.

Hal inilah yang memicu segera kejatuhannya Soeharto dari tahta kekuasaannya, tak terbendung walaupun oleh sejuta jin dan dewa dari kayangan. "Lengser Keprabon" kemudian menjadi kenyataan. Gugurnya empat orang mahasiswa harapan bangsa itu telah menyebabkan pula nama Universitas Tri Sakti menjadi sangat termasyhur ke seluruh penjuru dunia.

Dalam kasus Tri Sakti ini jangan hendaknya ada orang yang membela yang batil seperti halnya dengan peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984 yang lalu. Ratusan orang tertembak oleh ABRI. Tetapi aneh, yang menembak tidak diadili dan yang kena tembak diseret ke pengadilan di antaranya ada orang yang peluru masih bersarang di badannya. Di mana letak keadilannya? Dan alangkah zhalimnya!

Ya, selama rezim Soeharto yang zhalim itu berkuasa, ribuan rakyat yang mati ditembak ABRI; sejak dari peristiwa Aceh, Lampung, Tanjung Priok, Tim-Tim dan lain-lain peristiwa yang terjadi di tanah air kita Indonesia yang kita cintai bersama ini!

Di Aceh saja sejak DOM (Daerah Operasi Militer) diberlakukan di sana hingga Desember 1998 terdapat ribuan pembunuhan, penculikan dan perkosaan. Korban meninggal sebanyak 1021 orang; penduduk yang hilang tercatat 864 orang. Sampai akhir tahun 1998 tercatat wanita-wanita yang jadi janda sebanyak 1376 orang, sedang jumlah anak yatim tercatat 4521 orang.

Didata pula mereka yang cacat sebanyak 375 orang, dan rumah yang terbakar sebanyak 680 buah. (Republika, 18-12-1998).

Dalam hal ini semua, Soeharto sebagai Panglima Tertinggi ABRI dan menantunya Prabowo, Komandan Kopassus yang

turut operasi di Aceh harus turut memikul tanggung jawab atas dosa-dosanya!

Kasus atau lebih tepat disebut "Pembantaian Tanjung Priok (Killing Field)" adalah peristiwa besar yang harus diselesaikan secara tuntas. Media massa waktu itu menyebut dua orang nama Jenderal oknum ABRI yang terkait dengan peristiwa itu yang kini telah Purnawirawan. Kasus ini merupakan PR bagi para penegak hukum yang belum selesai. Ratusan orang yang mati, tetapi tak diketahui kuburnya. Ini tidak masuk akal. Waktu itu DPR terutama Fraksi PPP, dan begitu pula MUI bersikap tak peduli, dan tak berani bicara walaupun untuk bertanya: dimana kuburnya para Syuhada itu? Tetap mesterius sampai kini![1] Bila nanti ditemukan, pantas dijadikan "Taman Syuhada Tanjung Priok". Komnas HAM patut cepat bergerak membentuk Tim Pencari Fakta. Sungguh sebuah noda hitam bagi rezim Soeharto.[2] Keadilan harus tegak walaupun langit akan runtuh! Awas dan ingatlah agar jangan ada yang mau dibujuk dan disogok (disuap) supaya tidak diteruskan ke pengadilan! Para syuhada jangan dikhianati!

Tetapi semua malapetaka yang menimpa masyarakat dan negara itu penyebab utamanya tidak lain adalah turut campurnya ABRI di arena politik praktis baik dalam lembaga eksekutif maupun legislatif. Maka antisipasinya buat masa depan, tidak ada jalan lain, ialah ABRI harus kembali kepada garis Panglima Besar yang melarang tentara terjun ke dalam politik praktis. Kita

---

[1] Yayan Indrayana, salah seorang korban tragedi Tanjung Priok dalam unjuk rasa di Komnas HAM dan sebelumnya menggelar mimbar bebas di Kejaksaan Agung berkata, "Kami hanya menyuarakan aspirasi, yakni tragedi Tanjung Priok 1984 diusut lagi. Kami menuntut semua orang yang terlibat dalam tragedi itu, terutama L.B. Moerdani (Menhankam/Pangab saat itu) dan Try Soetrisno (Pangdam Jaya saat itu) diadili." (Kompas, 20-6-1998).

[2] Di hadapan non-Muslim, Soeharto pernah berkata, "Our common enemy is Islam." (Musuh kita bersama adalah Islam). (David Jenkins, Soeharto and His Generals, hal. 29, Cornell University, New York, 1984). Ini sudah sangat keterlaluan! Munafik agung!

sebenarnya memerlukan pimpinan ABRI seperti halnya Jenderal Besar Sudirman sebagai tokoh teladan yang belum ada duanya sampai sekarang di Indonesia ini. Mungkinkah Jenderal Wiranto mengikuti jejak langkah Panglima Besar Sudirman? Semoga!

Dengan mengikuti garis Sudirman, demokratisasi Indonesia sesuai dengan konstitusi, Insya Allah akan berjalan lancar. Karena tak ada di dunia ini negara yang demokrasinya berjalan lancar di bawah kekuasaan tentara. Lihatlah Mesir, Al-Jazair, Myanmar (Burma), dan lain-lainnya yang berada di bawah rezim militer, di sana demokrasi berubah menjadi democrazy alias sinting, ya, demokrasinya orang-orang sinting di mana politisi prodemokrasi dan Ulama meringkuk dalam penjara. Maka dengan kembalinya ABRI kita kepada garis politik Panglima Besar Sudirman, Insya Allah hal yang sedemikian itu tidak akan terulang kembali setelah 32 tahun kita berada dalam suasana democrazy politik di bawah Jenderal Soeharto, bekas KNIL.

Menurut Kolonel A. Latief, Soeharto terlibat dalam G.30.S./PKI. Karena waktu gembong G.30.S./PKI itu melaporkan kepada Soeharto bahwa akan terjadi penculikan para Jenderal, ternyata Soeharto diam saja dan manggut-manggut. Dia hanya tanya: Siapa pemimpinnya? Dan kalau dia tidak setuju, sebagai panglima Kostrad, mestinya dia harus lapor kepada atasannya yaitu Jenderal Ahmad Yani.

Dalam sidang Mahmilub tahun 1973 Soeharto diminta jadi saksi, tetapi dia tidak mau. Latief divonis hukuman mati, kemudian diganti dengan hukuman seumur hidup. Dia dipenjara di penjara Cipinang sampai saat ini (oleh Presiden Habibie-Latief diberi grasi, red.). Dalam Sidang Mahmilub itu, Latief menuntut supaya Soeharto juga diadili! Tetapi aneh, bukan diadili, tetapi dia malah menjadi Presiden. Soeharto memang licik! Kita semua tertipu oleh Soeharto!

Latief melapor kepada Soeharto di RSPAD pukul 22.00 di waktu Soeharto membezuk anaknya Tommy yang sedang sakit

pada tanggal 30 September 1965. (Majalah TAJUK, 17 September 1998).

Harapan Kepada Presiden B.J. Habibie

Kita berharap kepada Presiden yang baru, B.J. Habibie, agar dia berhasil menghidupkan semangat demokrasi yang sejati di negara kita dengan dibukanya kesempatan seluas-luasnya mendirikan partai-partai politik baik yang berdasar agama (Islam) dan agama lainnya atau yang nasionalis.

Dengan begitu kita akan berhasil mewujudkan suatu negara yang adil makmur, aman damai, di bawah lindungan dan ampunan Ilahi. Tetapi tanpa terwujudnya parta politik yang berdasar agama (Islam), dan kembalinya ABRI kepada garis Sudirman, maka demokrasi dan reformasi adalah absurd alias tidak masuk akal dan sia-sia belaka. Dan ridha Allah akan semakin jauh!

Habibie jangan sampai terpengaruh dengan pikiran-pikiran negatif Nurcholish Majid yang dipandang sesat oleh banyak umat Islam, karena dia anti Partai Agama (Islam). Tanda dia kurang paham tentang sejarah pergerakan bangsa! Sebagaimana diketahui, Nurcholish Majid adalah termasuk sembilan orang kepercayaan Soeharto yang diundang ke Istana tanggal 19 Mei 1998 untuk mempertahankan kekuasaannya.

Semoga Habibie berhasil mencapai sasaran yang diamanatkan masyarakat ke atas pundaknya, yaitu reformasi total dan menyeluruh di segala bidang, terutama reformasi Dwifungsi ABRI, sesuai dengan aspirasi pejuang-pejuang reformasi.

Begitulah jadinya bila urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, berantakan selama 32 tahun. Nabi Muhammad bersabda, "Bila urusan (negara) diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat kehancurannya." Kita semua telah merasakannya!

Bagaikan benda yang bulat reformasi akan bergulir dan bergulir terus sampai dia tiba di tempat yang datar, yaitu pada titik cita-cita yang terakhir di mana kebenaran dan keadilan ter-

wujud secara merata dalam negara. Sehingga apa yang diharapkan Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agum Gumelar dan juga oleh kita semua, "Di masa datang tidak ada lagi sandiwara politik" Insya Allah akan terwujud! Kini era kultus "menuhankan" Soeharto telah tamat!

Allah berfirman, *"Katakanlah kebenaran telah datang dan kebatilan telah pergi. Sesungguhnya kebatilan itu harus pergi."* (Al-Isra': 81).

Ya, Orde Baru yang buruk dan lapuk telah berganti dengan Era Reformasi yang sedang berjuang mencapai sasaran dan tujuannya. Suatu pertanyaan timbul: mampukah Habibie melepaskan diri dari bayang-bayang Soeharto yang telah berdosa, agar dirinya tidak turut ternoda? Insya Allah! Di sini terletak kuncinya. Karena membela atau melindungi yang batil sama dengan turut melakukannya. Ini harus diperhatikan benar oleh para Penguasa dan para Pengacara agar mereka jangan masuk neraka bersama-sama dengan orang zhalim dan batil yang dilindungi dan dibelanya itu di akhirat kelak! Yaitu berdasar peringatan Allah dalam Al-Quran, surat Hud ayat 113 yang melarang berpihak kepada orang zalim! Terkesan pemerintah kurang serius memeriksa Soeharto. Transkrip pembicaraan telepon yang disadap antara Habibie dengan Andi M. Ghalib memang terkesan masih jalan di tempat, belum juga dilimpahkan ke Pengadilan. Bahkan ada yang memandang sandiwara belaka. Khawatir mereka bisa dilanda arus reformasi yang deras!

Kini terdengar suara seorang Jenderal Purnawirawan yang ingin jadi Presiden. Apakah kita dan generasi penerus akan menderita tiga puluh tahun lagi di bawah rezim otoriter yang represif? Jangan lupakan sejarah, bukankah kemerdekaan negara ini dirintis oleh kaum pergerakan, dan kemudian diproklamasikan oleh politisi sipil, bukan oleh yang lainnya? Ya, apakah kita akan berlutut lagi di bawah telapak kaki diktator militer?[1)]

[1)] Mayjen Polri (Pur) Koesparmono Irsan, menyatakan seperti ini: "Tugas Polisi pengayoman, perlindungan, penegakkan hukum dan sebagainya. Sedang tugas militer penghancuran. Karena itu, militer selalu mencari senjata yang bisa menghancurkan sebanyak-banyaknya orang....." (Republika, 5-7-1998).

Ya, orang berebut mengklaim kekuasaan, tetapi mereka lupa bahwa kekuasaan itu awalnya memang manis bagaikan madu, tetapi akhirnya pahit bagaikan empedu. Dan itulah yang dialami dan dirasakan Soeharto.[2] Disamping itu kita harus ingat akan fatwa nenek moyang kita sebagai peringatan bagi kita bersama, "Bila Hulubalang (Tentara) telah jadi Raja, tanda negeri akan celaka." Dan itu telah terbukti selam ini. Naudzubillah! Semoga kita terlindung! Cukup sekali tentara jadi Presiden. Ini untuk pertama sekaligus terakhir!

---

[2] Kalau kita baca latar belakang sejarah hidup Soeharto, memang dia tidak layak jadi Presiden RI. karena pendidikannya yang cukup rendah. Di kala para pejuang kemerdekaan dan kaum pergerakan meringkuk dalam penjara-penjara kolonial, Soeharto malah membela penjajahan Belanda sebagai serdadu Belanda (KNIL) yang bersumpah setia kepada kaum penjajah itu. Tetapi aneh, setelah penjajah Belanda pergi, maka Soeharto muncul sebagai Presiden RI di zaman Orde Baru yang kemudian berganti dengan penjajahan baru!
Sebagai perbandingan, maka marilah kita ke Prancis! Di sana ada seorang Jenderal terkenal, namanya Petain. Jenderal Petain ini dalam perang dunia yang kedua (1939-1945) berpihak kepada musuh Prancis, yaitu Jerman. Tetapi setelah Jerman kalah dalam perang dunia kedua itu, maka tak ayal lagi Jederal Petain oleh Pengadilan Prancis divonis hukum mati, dan kemudian diganti menjadi hukuman seumur hidup. Begitulah nasib pengkhianat di negeri orang. Berbeda dengan di negeri kita, Soeharto yang telah mengkhianati kaum pergerakan, malah diangkat menjadi Presiden RI. Dan selama 32 tahun dia telah mengkhianati bangsa Indonesia dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perahan dan dia memperkaya diri dan keluarganya serta kroni-kroninya. Tetapi setelah dia lengser, Kabinet Reformasi malah akan memberinya pula sebuah rumah seharga Rp 26,5 milyar. Aneh!
Ya, Kabinet Reformasi telah memanjakan Soeharto yang mestinya meringkuk dalam penjara untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosanya, tetapi malah memperkenankannya bepergian ke mana-mana dan bicara sekehendak hatinya. Berbeda dengan Soekarno yang dikenakan tahanan politik sampai akhir hayatnya, dan tak seorang pun di antara keluarganya yang diizinkan untuk menghampirinya ketika dia menghembuskan nafasnya yang terakhir! Mengapa ada diskriminasi di antara kedua mantan Presiden?
Dan di mana letak keadilan? Ya, mestinya Soeharto dikenakan status tahanan politik, dan segera diadili di Mahkamah Militer seperti dituntut oleh pejuang-pejuang Reformasi.
Rakyat menunggu kehadiran seorang Presiden dan Jaksa Agung yang mampu menghadapkan Soeharto ke Meja Hijau.

Dari itu kembalinya ABRI kepada garis Sudirman adalah mutlak perlu, *conditio sine qua non*, demi demokrasi dan reformasi. Ya, ABRI kita mestinya berdiri pada bidang masing-masing, yaitu di luar pemerintahan, sesuai dengan kaidah effesiensi pekerjaan, "the right man in the right place." Agar Demokrasi bersinar kembali setelah cahayanya redup selama Soeharto berkuasa. ABRI itu adalah "Wasit", dan dia tidak boleh turut menendang bola.

Semoga negara kita selamat dari segala marabahaya dan malapetaka. Amien! *Billahi Fi Sabielil Haq*. Renungkanlah!



LAWAN DAN KAWAN DALAM DUNIA POLITIK

"Demikianlah Kami (Allah) Jadikan Musuh Bagi Setiap Nabi." (QS. Al-An'am: 112)

Mukaddimah

Arena perjuangan politik adalah termasuk gelanggang yang keras. Dia memerlukan seni, taktik, dan strategi yang jitu; dan di sana kita akan menemukan lawan dan kawan. Demikianlah hukum dunia politik sejak dari zaman para Nabi sampai kepada masa kini. Allah telah memberitahukan kepada kita hal itu dalam ayat yang kita kutip di atas.

Dalam ilmu siasat ada kaidah yang berbunyi, "*Aduwwul 'aduw syaqiq wa syaqil 'aduw 'aduw*". Artinya: Musuh dari musuh kita adalah kawan, dan kawan dari musuh kita adalah musuh.

Sebagai contoh, perjuangan rakyat Palestina yang menuntut kemerdekaan negerinya adalah perjuangan seorang kawan. Dan musuh yang menghalanginya sama dengan musuh kita sendiri. Demikianlah negara Yahudi (Israel) termasuk musuh kita, karena dia musuh dari kawan kita yaitu Palestina terutama Hamasnya. Demikian pula kawan dari musuh kita (Israel) seperti Amerika, Rusia dan Singapura umpamanya, menurut kaidah politik di atas adalah termasuk musuh politik kita, walaupun dia tetangga kita. Tampaknya langkah-langkah strategi dan lobi Yahudi untuk Asia Tenggara dirancang dan diprogram dari Singapura. Bandingkanlah hal itu kepada hal-hal yang lain, kawan dan lawan dalam partai politik, termasuk tokoh-tokohnya. Dan yang perlu diwaspadai adalah musuh dalam selimut, berbahaya!

Sekarang mari kita berbicara tentang lawan dan kawan dalam perjuangan politik di tanah air kita, terutama tokoh-tokohnya yang menonjol dalam gelanggang politik.

1. Gus Dur (Abdurrahman Wahid)

Abdurrahman Wahid atau yang lebih akrab dipanggil orang dengan Gus Dur, adalah tokoh kontroversial yang muncul di arena politik pada tahun 1984 melalui Kongres NU yang ke 27 di Situbondo, Jawa Timur, dengan cara yang agak unik. Adalah menjadi tradisi setiap Muktamar, tokoh utamanya dipilih langsung melalui suara masing-masing utusan Cabang partai. Tetapi kali ini menyimpang dari tradisi itu, Gus Dur didrop dari atas oleh sesepuh NU, Ulama kharismatik, yaitu K.H. As'ad Syamsul Arifin yang terkenal. Mengapa demikian? Karena para sesepuh khawatir kalau diserahkan kepada suara para utusan Cabang, belum tentu Gus Dur akan bisa terpilih, karena belum tentu akan kuat bersaing dengan K.H. Idham Chalid yang sudah puluhan tahun berpengalaman sebagai orang nomor satu dalam PB NU. Dari itu tidak ada jalan lain, kecuali mendrop dari atas. Karena dalam NU ada tradisi *Taqlid*, patuh kepada putusan Ulama terkemuka, maka akhirnya Gus Dur tampil sebagai Ketua Umum PB NU yang "terpilih" sebagai *sami'na wa atha'na*, kami dengar dan kami patuhi oleh Muktamirin. Tetapi ini adalah cara "diktator", cara kharismatik yang kurang sehat, bukan cara demokrasi musyawarah yang sejati.

Tetapi hal itu beberapa waktu kemudian menjadi bumerang bagi Kyai As'ad, karena Gus Dur ternyata sangat mengecewakannya. Gus Dur melangkah tanpa musyawarah dan bicara seenak isi perutnya belaka. "Islam tidak mempunyai konsep kenegaraan". "Assalamu'alaikum boleh diganti dengan selamat pagi", dan sebagainya yang membuat sang Kyai marah besar. Gus Dur juga mengatakan, "Orang Kristen dan Yahudi bukan kafir, karena mengakui Tuhan." (Republika, 1-3-1999). Pernyataan ini menyesatkan. Padahal Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menegaskan dalam Al-Qur'an, *"Sesungguhnya mereka yang*

kafir dari ahli Kitab (Yahudi dan Kristen) dan orang-orang musyrik, tempatnya dalam neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah manusia yang sejahat-jahatnya." (QS. Al-Bayyinah: 6).

Apakah dia tidak percaya Al-Qur'an?

Kemudian sang Kyai mengucapkan kata-kata yang keras terhadap Gus Dur: "Imam kentut", katanya. Dan karena Gus Dur masih berdiri di depan sebagai Imam (baca; Pemimpin NU), maka sang Kyai menegaskan sikapnya dengan *"Mufaraqah"* dari Imam; dia tidak mau mengikuti dan mengakui Gus Dur jadi imamnya lagi, memisahkan diri, dan dia berharap tidak mau melihat wajah Gus Dur sampai akhir hayatnya; dan memang demikianlah yang terjadi. Kisah ini diceritakan kembali oleh paman Gus Dur sendiri, K.H. Yusuf Hasyim, dalam SABILI No.13, 6 Januari 1999, dengan sedikit tambahan informasi dengan apa yang Penulis ketahui. (Sebagaimana diketahui bahwa K.H. As'ad Syamsul Arifin adalah Ulama terkemuka NU yang cukup kharismatik. Dulu konon beliau pernah menjadi pengikut Haji Agus Salim tokoh terkemuka Syarikat Islam yang terkenal. Haji Agus Salim dan HOS Tjokroaminoto adalah Dwitunggal Syarikat Islam yang disegani oleh lawan dan kawan. Tetapi setelah Tjokroaminoto wafat pada tahun 1934, Haji Agus Salim memisahkan diri dari SI, dan kemudian mendirikan Barisan PENYADAR pada tahun 1936. Waktu itulah K.H. As'ad Syamsul Arifin bergabung dengan Haji Agus Salim).

Namun demikian kerasnya kecaman K.H. As'ad Syamsul Arifin di atas, Gus Dur tetap membuat langkah-langkah yang membuat tanda tanya bagi masyarakat. Di waktu terjadi peristiwa pembantaian Umat Islam Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984 di mana Panglima ABRI Jenderal Benny Murdani harus bertanggung jawab, Gus Dur malah sowan kepada sahabatnya itu dan membawa Murdani sowan keliling ke Pesantren-pesantren Jawa Timur. Dan anehnya para santri dan Kyai Pesantren mencium tangan Jenderal Benny Murdani yang beragama Nasrani itu seperti jelas terlihat di TVRI yang mena-

yangkan kejadian itu. Demikian akrabnya Gus Dur dengan sahabatnya itu yang oleh Umat Islam, terutama bagi korban pembantaian Tanjung Priok dipandang sebagai musuh mereka yang harus diseret ke Meja Hijau (Pengadilan).

Pada tahun 1994 Gus Dur membuat heboh lagi dengan membuat dunia Islam mengeritiknya. Bersama dengan Djohan Effendi dari Sekneg, Habib Chirzin dari Muhammadiyah, Gus Dur (NU) berkunjung ke Israel, negara Yahudi musuh Islam itu, dan sudah barang tentu berjabat tangan dengan musuh Allah dan musuh Islam itu.

Sepulang mereka kembali ke Jakarta, datanglah reaksi dan caci maki dari mana-mana, terutama kalau diperhatikan bahwa negeri musuh Islam itu tidak ada hubungan diplomatik dengan Indonesia. Habib Chirzin dari Muhammadiyah dapat peringatan keras dari organisasinya. Tetapi Gus Dur dari NU mendapat pujian dan berkibar terus sampai kini.

Dan tak lama kemudian Gus Dur mengejutkan masyarakat lagi dengan sepak terjangnya yang mendesak Pemerintah supaya mengadakan hubungan diplomatik dengan musuh Islam dan musuh negara-negara Arab itu. "Pemerintah Indonesia sudah perlu memikirkan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel", ujar sahabat Israel itu. (Kompas, 7-11-1994).

Selain Gus Dur ada pula seorang sahabat Gus Dur yang nyeleneh dan bicara asal bunyi dan menyakitkan umat Islam, yaitu Dr. H. Aqil Siradj. Dr. yang katanya lulusan Universitas Ummul Qura Makkah ini lain lagi tingkahnya. Dia malah bersahabat dengan para pendeta Nasrani, dan pernah ceramah di Gereja Algon, Surabaya, 28 Februari 1998. Simaklah celotehan beliau itu seperti ini: "Asal bukan khutbah Jum'at, boleh saja mereka berceramah di masjid. Kenapa tidak? Kita juga siap menerima mereka." (Tabloid AKSI No.68, 11-3-1998). Intelektual yang satu ini oleh KH. Alawy Muhammad dikatakan *sesat* seperti ditegaskannya kepada wartawan SABILI, 20 Januari 1999. Betapa tidak, padahal Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah melarang orang musyrik untuk mendekati Masjid, karena

mereka itu najis, apalagi memasuki dan berceramah di dalamnya. (QS. At-Taubah: 28). Dan pernyataan Gus Dur tentang Ambon *diprotes* demo Islam Ambon.

Namun walau demikian langkah-langkah strategi Gus Dur masih ada juga orang yang mengagung-agungkan dan memujinya setinggi langit.

Seorang promovendus IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam Disertasinya untuk mencapai titel Doktor dengan judul "Kepemimpinan Kharismatik Nahdhatul Ulama" malah menyebut Gus Dur sebagai seorang *Sufi* dan menyamakannya dengan Mahatma Gandhi serta John Calvin. Apakah ini tidak meleset? Gandhi dari India, Ketua Partai Kongres itu adalah pejuang kemerdekaan India yang gigih dan dia hidup sederhana, dan berpakaian amat sederhana, kain putih yang disandang hampir seperti setengah telanjang. Apakah Gus Dur seorang pejuang kemerdekaan di zaman revolusi? Apakah Gus Dur berpakaian sederhana? Gandhi berjalan lurus, tetapi Gus Dur berjalan zigzag, berbelok-belok bagaikan ular, avonturir, oportunis, dan sukar dipercaya! Sebagaimana diketahui Gus Dur baru saja sekaligus memborong saham dua buah Bank yang sedang sekarat (sekarang sudah dibekukan, red.) yaitu Bank Papan Sejahtera (BPS) dan Bank Ficorinvest seperti diberitakan oleh sebuah majalah ibu kota. Dipertanyakan: dari mana dia mendapat uang Rp. 30 Milyar untuk keperluan itu? Memanfaatkan dana Cendana? tanya Panji Masyarakat, No.45, 24 Februari 1999. Apakah watak dan sifat seperti itukah watak seorang Sufi? Apakah Promovendus lupa bahwa syarat menjadi orang sufi itu haruslah zuhud, tawadhu', wara' dan qana'ah. Tanpa itu bukanlah sufi yang sejati, tetapi sufi palsu dan imitasi.

Juga Gus Dur disamakan dengan John Calvin (1509-1564), tokoh rohaniawan Roma Katholik Prancis yang terkenal. Juga ini kurang tepat, jauh panggang dari api. Sebab Calvin mengutuk kekuasaan, sedang Gus Dur mati-matian mengejar kekuasaan itu, dan mencalonkan diri jadi Presiden RI tanpa

hirau kepada kesehatan yang tidak mendukung. Lagi pula dia tidak memiliki suatu keahlian yang dapat dihandalkan, ya, kurang bercermin diri. Ya, apakah dia tidak merasa malu dalam keadaan dirinya seperti itu?

Berbeda dengan Gus Dur yang pro Israel, sebagai perbandingan, seorang Muslim Libanon, Dawoud Hussein, yang tangguh pendirian dan imannya, bersikap seperti ini yang ditegaskannya kepada Kantor Berita Reuters di Beirut ibukota Libanon: *"The Friend of my enemy is automatically my enemy and he shook hands with the Israelis. What more can I say?"* (The Jakarta Post, 10-2-1999).

Disamping itu Presiden Mesir Anwar Sadat yang telah berkunjung ke negara Yahudi itu untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, mati ditembus dua belas peluru di waktu tentara Mesir melakukan parade militer, justru oleh tentara yang turut serta melakukan "Show of Force" itu. "Saya bunuh dia demi Islam," kata Khaled Islambouli, anggota Jihad Islam dalam pengakuannya di muka Sidang Pengadilan Militer. Kemudian dia melambaikan tangannya di balik terali penjara Mesir. (K.H. Firdaus A.N., Pelangi Dakwah, Pedoman Ilmu Jaya, hal.89, Jakarta, 1993). Dan Allah berfirman: *"Demi, sesungguhnya engkau akan mendapatkan manusia yang paling memusuhi orang-orang beriman yaitu orang-orang Yahudi dan musyrikin."* (QS. Al-Maidah: 82).

Dawam Rahardjo berkomentar tentang Gus Dur seperti ini. "Gus Dur juga terlalu jauh untuk disebut sufi. Dia jarang sekali berbicara tentang tasawuf. Pandangannya lebih condong ke sekuler. Anggapan sementara orang bahwa dia itu sufi, sama sekali tidak benar. Sufi rendah hati, tindakannya dilandasi rasa cinta. Sedangkan Gus Dur, tindakannya justru penuh dengan rasa kebencian. Misalnya terhadap HMI, ICMI, dan memendam rasa benci. (Panji Masyarakat, No.45, 1999).

Dengan demikian mungkin lebih bijaksana Promovendus bila merevisi Disertasinya kembali, karena memang antara jarak Sufi, Bankir atau Kapitalis sangat jauh, dalam dua kutub

yang sangat berbeda, demi menjaga nama baik IAIN. Disertasi yang kurang pas! Namun patut dipertanyakan bahwa Disertasi yang "cacat" itu oleh Tim Penguji dinilai dengan Yudisium baik. (*Ibid*, hal.69, Jakarta, 24 Februari, 1999)

Disamping itu Gus Dur tergolong Soehartois yang mendukung Soeharto dengan fanatik. Di waktu demonstrasi mahasiswa berada dalam klimaksnya yang mendesak Soeharto segera turun, maka Gus Dur datang ke Istana bersama sembilan orang Soehartois lainnya untuk mempertahankan kekuasaan Soeharto walaupun kesehatannya kelihatan menyedihkan. Satu-satunya orang yang datang dengan kursi roda dengan mata terpicing karena sakit. Namun demikian dia masih membela Soeharto dengan menyerang pahlawan dan pejuang-pejuang reformasi dengan kata-kata seperti ini: "Saya harap demonstrasi dihentikan!" sambil duduk di atas kursi rodanya dengan mata tertutup. Namun kata-kata Gus Dur itu dianggap mahasiswa dan kaum pejuang yang revolusioner sebagai angin lalu saja. Adi Sasono mengatakan bahwa yang datang ke Istana itu adalah badut-badut politik. Terakhir, apakah Gus Dur bisa mengubah citra dirinya untuk menjadi kawan yang baik? Semoga! Ya, demi untuk menyuci dosa!

Dan cukup merupakan pukulan pahit bagi Gus Dur bahwa dia harus "terusir" dari Aceh sebagai persona non grata bagi masyarakat serambi Makkah itu. Dia ditolak untuk berdialog dengan mahasiswa Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dalam rangka kampanye Pemilu 1999. (Republika, 21.5. 1999).

Mengapa rakyat Aceh benci dan antipati kepada Gus Dur? Mungkinkah karena ulah dan pernyataan-pernyataan Gus Dur yang sering menyakitkan hati umat Islam? Ataukah karena dia sering dekat dan akrab dengan lawan-lawan Islam seperti CSIS, Benny Moerdany, Theo Syafei, dll.? Wallahu A'lam!

2. Jenderal Soeharto

Soeharto naik ke puncak ke kekuasaan sebagai Presiden Republik Indonesia adalah melalui kup yang tidak berdarah,

tidak konstitusional. Ya, Presiden Soekarno digulingkan oleh ABRI dan Angkatan '66 karena dia telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai seorang diktator. Dan Soeharto pun terguling karena dipecat oleh rakyat Indonesia, yaitu oleh pejuang-pejuang reformasi yang revolusioner, karena juga telah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya sebagai diktator militer yang lebih zhalim dengan melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) demi kepentingan diri dan keluarganya serta kroni-kroninya.

Banyak orang tertipu oleh Soeharto selama 32 tahun dia menjadi orang nomor satu di negeri ini. Tetapi barangsiapa yang membaca buku *"Suharto and His Generals Indonesia Militery Politics 1975-1983"*, tentu lebih mengetahui tentang siapa Soeharto yang sebenarnya. Apa-apa yang diucapkannya kepada umat Islam berbeda dengan apa yang dikatakannya kepada non-Muslim.

Pada suatu ketika waktu tokoh-tokoh non-Muslim menghadap kepadanya, dia berucap seperti ini: "Our common enemy is Islam" (Musuh kita bersama adalah Islam). (David Jenkins, *Suharto and His Generals*, hal.29, Cornell University, New York, 1984). Dengan begitu Soeharto jelas seorang munafik, musuh Islam!

Latar belakang sejarah hidup Soeharto telah menempatkan dirinya sebagai lawan Islam; lawan kaum pergerakan yang menuntut kemerdekaan Indonesia, karena dia pada waktu itu menjadi serdadu Belanda yang menjadi musuh bangsa Indonesia. Cuma dia termasuk orang yang bernasib baik; setelah penjajah itu pergi, maka Soeharto bisa muncul sebagai Presiden. Mana ada dalam sejarah dunia bekas serdadu musuh tampil sebagai kepala negara, kecuali di Indonesia.

Dosa-dosa Soeharto selama 32 tahun berkuasa cukup banyak, baik berupa KKN maupun dalam operasi militer dan pertumpahan darah. Soeharto bertanggung jawab dalam pertumpahan darah di Aceh, Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh ABRI; peristiwa Lampung, Tanjung Priok, Dili dan lain-lain.

Dan jauh sebelum itu pada tahun 1951 dia harus bertanggung jawab atas penumpasan Batalion 426 di Jawa Tengah yang terkenal dengan Batalion TNI yang berideologi Islam; bekas pasukan Hizbullah dan Sabilillah.

Waktu para korban pembantaian Tanjung Priok berdemonstrasi menuntut supaya Jenderal-jenderal yang terlibat dalam peristiwa yang amat sadis itu, seperti Benny Murdani dan Try Sutrisno supaya diadili, Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI, tidak setuju kalau hanya dua itu saja. Dia menuntut Panglima Tertinggi ABRI waktu itu juga harus diadili, yaitu Jenderal Soeharto.

Sebagai seorang yang menganut paham aliran kebatinan, Soeharto memang lawan Islam dari segi Akidah. Imam Al-Ghazali berkata dalam bukunya: *"Al-Fadhaihul Bathiniah"* (Skandal-skandal Kaum Kebatinan) seperti ini: *"Inna Hadfahumul Akbar huwa ibthalul Syaraik"* (Tujuan mereka yang paling utama adalah membatalkan berbagai syariat Islam).

Dari itu kaum kebatinan itu tidak menjalankan syariat Islam; tidak puasa Ramadhan, tidak shalat Jum'at dan sebagainya. Dan kalau ada orang kebatinan yang shalat, maka shalatnya itu shalat politik, dan kalau ada yang pergi haji, maka hajinya adalah haji sekuler dan riya' belaka.

Sedikit pengalaman. Penulis ini sebenarnya sekitar antara tahun tujuh puluhan dan delapan puluhan, alhamdulillah, termasuk salah seorang Khatib Jum'at Masjid Baiturrahim yang terletak di kompleks Istana Negara di Jakarta. Dalam kurun masa selama itu Penulis bertanya kepada pengurus Masjid, di mana Presiden Soeharto melakukan shalat Jum'at? Karena Penulis tidak pernah satu kali pun berjumpa dengan Presiden. Yang bertemu hanya para Wakil Presiden yang silih berganti. Pengurus Masjid menjawab hanya dengan kalimat: "Tidak tahu", tanpa komentar lagi.

Dan di waktu Presiden Pelestina, Yasser Arafat, berkunjung ke Indonesia beberapa waktu yang lalu, dia menyempatkan

diri shalat Jum'at di Masjid Baiturrahim, tetapi aneh dia tidak didampingi Presiden Soeharto yang seharusnya mendampingi tamu agung yang datang dari jauh itu. Cukup mengherankan, Arafat hanya didampingi oleh Menteri Pertahanan Edi Sudrajat belaka. Padahal menurut keyakinan orang, Soeharto ada di dalam Istana. Ini cukup mengherankan bagi masyarakat, apalagi bagi tamu agung kita sendiri, Yasser Arafat. Padahal menurut hukum fiqih, Arafat diberi kelonggaran sebagai Musafir untuk hanya melakukan shalat zhuhur belaka.

Sekarang marilah kita sejenak mengikuti jalannya sejarah pertarungan antara Islam dan Kebatinan di Indonesia!

Pada zaman Wali Songo ada seorang guru kebatinan, namanya mirip dengan nama wanita, Syeikh Siti Jenar dari Lemah Abang. Dia mengajarkan faham kebatinan yang sesat, dan dia tidak melakukan shalat dan juga ibadah Fardhu lainnya. Dan kalau ajarannya itu dibiarkan, maka Masjid-masjid bisa kosong melompong tak ada gunanya.

Dari itu para Wali Songo bersidang di Masjid Cipta Rasa (Kasepuhan) Cirebon, pada pertengahan abad ke-16. Dalam Sidang Pengadilan yang dipimpin oleh Sunan Giri, Siti Jenar mengatakan, tidak ada Jum'at dan tidak ada Masjid dan yang ada hanyalah Tuhan. Yang dimaksudnya dengan Tuhan itu tidak lain dari dirinya sendiri, yaitu Siti Jenar. Ringkas kata, Hakim memutuskan bahwa Siti Jenar harus dihukum pancung. Dan yang tampil sebagai algojonya adalah Sunan Kalijaga dari Semarang. (Baca; A. Johns, Dr. Taufik Abdullah, *Islam di Indonesia*, hal.136).

Peristiwa seperti itu telah lebih dahulu terjadi pada Syeikh Kebatinan, Al-Hallaj, di Baghdad, di zaman Khalifah Abbasiah di mana Majelis Ulama Baghdad memutuskan juga dengan hukuman pancung setelah Al-Hallaj dipenjara beberapa tahun lamanya. Demikianlah dalam masalah akidah tidak boleh menyimpang menjadi syirik, dan ulama harus tegas menjatuhkan sanksi hukum tak ada kompromi! Demikian Majelis Ulama Baghdad, dan begitu pula Wali Songo. Tetapi Majelis Ulama

Indonesia sekarang impoten dan bungkam terhadap masalah itu. Dan MUI tidak berani mengeluarkan fatwa atas *haram*nya perempuan jadi Imam negara (Presiden). Walaupun para Imam Mazhab yang empat (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal) telah ijmak atas *haram*nya.

Dan sekitar seratus tahun kemudian terjadilah serangan balik kaum kebatinan terhadap Islam.

Tanah Jawa di zaman Sultan Agung cukup menikmati kejayaan Islam. Sultan yang pada mulanya bergelar dengan Penembahan Ingalogo (Panglima yang masyhur), kemudian oleh Kesultanan Turki yang sedang berkuasa di Makkah mengganti gelar itu dengan Sulthan, yaitu pada tahun 1641, karena Penguasa di Makkah memandang Sultan Mataram berhasil mengembangkan Islam di pulau Jawa. Tetapi setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, maka dia digantikan anaknya yang kemudian bergelar dengan Amangkurat I. Di sinilah terjadi serangan balik kaum kebatinan terhadap Islam bekerja sama dengan Belanda. Pembalasannya cukup dahsyat!

Amangkurat I yang berpaham kebatinan itu yang selama ini dimanjakan ayahnya, dapat dihasut oleh Belanda untuk membendung perkembangan Islam di tanah Jawa; karena Belanda memandang bahwa Islam itu juga musuhnya yang menantang penjajahan Belanda di Indonesia, khususnya di pulau Jawa.

Amangkurat I dapat dihasut Belanda untuk menumpas Islam. Pada suatu hari Amangkurat, orang kebatinan yang musuh Islam itu mengeluarkan titah perintah yang berbunyi: "Segera tangkapi Kyai-kyai itu, Santri-santri itu! Mereka membawa adat Arab, adat yang tidak cocok dengan kepribadian kita orang Jawa!"

Perintah seperti ini hampir sama halnya dengan perintah rezim Orde Lama dan Orde Baru yang memerintahkan para Hakim dan Jaksa supaya menangkap para Ulama dan para pejuang Islam dan memenjarakannya sampai menderita bertahun-tahun dalam penjara dan bahkan ada yang dibuang ke Nusakambangan.

Tersebutlah dalam sejarah tanah Jawa, bahwa lebih dari 6000 (enam ribu) Kyai dan Santri disuruh berdiri di alun-alun

kemudian ditembak mati semua. Maka tinggallah robot-robot dan boneka-boneka Raja yang mau bersujud dan berjongkok kepada sang Maharaja.

Kekejaman Amangkurat I ini mungkin lebih kejam dari Fir'aun abad silam yang memerintahkan kepada tentaranya supaya membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir pada masa tertentu, karena Fir'aun khawatir kekuasaannya akan terguling karena pemberontakan bayi-bayi itu apabila kelak mereka telah besar.

Kalau di zaman Fir'aun lahir Nabi Musa yang akan menggulingkan Fir'aun itu sebagai Nabi pejuang, maka di zaman Amangkurat I muncul pula pejuang agung dari Madura yang bernama Trunojoyo yang akan menggulingkan sang penindas, Amangkurat I, dari tahta kekuasaannya.

Trunojoyo menyerang Mataram dan mengobrak-abrik Keraton Mataram, tetapi Amangkurat I telah pindah ke Istananya yang lain di Pleret. Setiap malam dia tidak bisa tidur karena halusinasi pada pikirannya akibat pengaruh kejadian pembantaian para ulama dan santri di alun-alun itu.

Dengarlah pujangga Hamka melukiskan keadaan Amangkurat I pada dekat akhir hayatnya seperti ini: "Dari alun-alun bila hari telah malam, desir-desir angin pun seakan-akan membawa seruan kalimat syahadat dari para santri syuhada yang ingin pulang ke dunia, buat jihad melawan Belanda (dan juga Amangkurat I, Pen.) dan mati lagi." (Hamka, *Perkembangan Kebatinan di Indonesia*, hal.64, Bulan Bintang, Jakarta, 1971).

Amangkurat I kemudian jadi gila, karena setiap hari gelisah dan stres memikul beban dosanya yang begitu berat dan besar. Akhirnya diam-diam dia keluar dari Istananya berjalan kaki dengan pakaian yang tidak senonoh dan tidak sopan sebagai orang sinting; akhirnya dia tiba dalam keadaan sakit di sebuah desa, Wonosoyo. Di sanalah beliau mangkat, dan dimakamkan di kota Tegal sekarang. Makam beliau disebut Tegal Wangi, atau Tegal Arum. Dia wafat pada tahun 1677, dan kemudian berganti nama dengan Sunan Tegal Arum. (*Ibid*, hal. 65).

Tampaknya untuk melawan aliran kebatinan yang sesat dan paham-paham nasionalisme sekuler yang memusuhi Islam, kita memerlukan pahlawan pejuang atau mujahid-mujahid yang tangguh seperti halnya Trunojoyo dari Madura itu. Tetapi kini adakah orang Madura yang mewarisi darah kepahlawanan Trunojoyo? Mengapa banyak orang Madura yang dibantai kaum kafir?

Tentang tokoh kebatinan Soeharto yang telah menyengsarakan rakyat Indonesia selama 32 tahun, suatu waktu dia tentu akan mempertanggungjawabkan dosanya dalam Mahkamah sejarah dan Mahkamah Allah di akhirat nanti seperti halnya Amangkurat I. Dan Duta Besar Korea Selatan berucap, "Kalau di negeri kami, Soeharto telah masuk penjara." (Republika, 16-10-1998).

3. B.J. Habibie

Setelah dua kali kehilangan tongkat, muncullah tongkat ketiga, B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga.

Dua orang Presiden yang terdahulu selama lebih lima puluh tahun gagal menjadikan Indonesia sebagai negeri yang aman makmur. Bahkan sebaliknya menjadikan Indonesia negeri yang sengsara seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an: *"Apakah engkau tidak perhatikan kepada mereka yang mengganti nikmat Allah (kemerdekaan) menjadi kekufuran, dan menempatkan bangsanya dalam suatu negara yang sengsara?"* (QS. Ibrahim: 28).

Ya, Presiden yang pertama dan kedua telah bertindak sewenang-wenang dengan melanggar konstitusi negara, dan keduanya tampil sebagai diktator yang munafik penuh tipuan, atau kasarnya: brengsek! (maaf).

Keduanya bukanlah tipe pemimpin yang mengantarkan rakyatnya ke negeri yang aman-makmur, gemah ripah loh jinawi, atau menurut Al-Qur'an: *Baldatun thayyibatun wa rabbun*

ghafur. Negeri yang aman makmur di bawah lindungan Allah Yang Maha Pengampun. Tetapi negara yang penuh kesengsaraan yang didera oleh utang yang bertumpuk-tumpuk dan makin membengkak dari tahun ke tahun. Ya, dua tokoh pemimpin itu membawa malapetaka bagi rakyatnya. Telah dua kali orang tua kehilangan tongkat. Ini telah melanggar fatwa nenek moyang kita: tidak boleh dua kali orang tua kehilangan tongkat! Tetapi kenyataannya demikianlah yang terjadi. Sedang Nabi kita mewasiatkan:

لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ. ﴿الحديث﴾

"Orang beriman tidak boleh dua kali disengat kalajengking dalam lubang yang sama." (Al-Hadits).

Dengan demikian kita kurang belajar dari pengalaman, karena sudah dua kali disengat dalam lubang yang sama, telah dua kali orang tua kehilangan tongkatnya. Kita telah dua kali tertipu oleh orang-orang munafik dalam jabatan kepresidenan. Dan apakah kita akan disengat lagi untuk ketiga kalinya? Keempat kalinya atau kelima kalinya? Na'udzubillah! Di mana letak keimanan kita? Mengapa kita telah dua kali disengat dalam lubang yang sama? Jawabnya terserah kepada rakyat dan bangsa Indonesia sendiri.

Latar belakang sejarah kehidupan B.J. Habibie cukup meyakinkan. Dia lahir dan berasal dari daerah yang kuat agamanya, Sulawesi Selatan. Dan sejak kecil dia telah menamatkan Al-Qur'an, dan konon sampai sekarang dia taat menjalankan puasa Senin dan Kamis sebagai orang shaleh.

Pada awal masa jabatannya dia memang menimbulkan cahaya harapan bagi kaum pejuang yang menginginkan reformasi total, setelah dijajah Orde Lama dan Orde Baru sekian puluh tahun. Ia membuka pintu Demokrasi selebar-lebarnya, tetapi dia terbentur dalam penegakan hukum keadilan, terutama bila berhadapan dengan Jalan Cendana. Di sinilah mulai tampak ke-

lemahannya. Masyarakat mulai curiga, setelah Habibie mengganti Jaksa Agung Sujono dengan segera dengan Andi M. Ghalib tanpa alasan yang masuk akal, karena Jaksa Agung Sujono justru sangat berhasrat untuk menghadapkan Presiden Soeharto ke meja hijau. Padahal Sujono baru saja memangku jabatannya sekitar dua bulan. Dan tanpa menjadikan hukum sebagai Panglima, Reformasi hanyalah basa-basi belaka yang dapat mengundang timbulnya revolusi sosial.

Untuk melindungi Soeharto dari jerat hukum, maka muncullah ke permukaan filsafat Jawa: *Ewuh pakewuh. Mikul dhuwur mendhem jero*. Artinya, sungkan dan tidak tega. Menjunjung tinggi menggali dalam. Ditujukan kepada pemimpin atau orang tua yang harus dihormati. Padahal Allah telah memerintahkan supaya berlaku adil tanpa pandang bulu. *"Dan jangan engkau kasihan dalam menegakkan hukum."* (QS. An-Nur: 2). *"Aku diperintahkan supaya menegakkan keadilan hukum di antara kamu."* (QS. Asy-Syura: 15). Dan Nabi menegaskan: *"Andaikata Fathimah putri Muhammad yang mencuri maka saya sendiri yang akan memotong tangannya."* (Hadits shahih). Dalam pada itu seorang Sarjana Hukum menegaskan: "Walaupun langit akan runtuh hukum keadilan harus ditegakkan!" Timbul pertanyaan: apakah kita akan menegakkan hukum atau filsafat dan budaya Jawa dalam Republik Indonesia yang berdasar hukum ini? Apakah kita akan memanjakan Soeharto?

Walaupun Habibie mengaku bahwa Soeharto adalah "gurunya", tetapi dalam menegakkan keadilan hukum, maka hal itu harus dikesampingkan dulu. Bukankah Aristoteles, filosof besar Yunani yang amat terkenal itu telah memperingatkan: "Hanya keadilan yang dapat memberikan kebahagiaan kepada rakyat umum dalam negara."

Kini setelah beredar transkrip kaset pembicaraan telepon yang disadap orang, antara Habibie dan Andi M. Ghalib, timbul pertanyaan: Apakah B.J. Habibie berada dalam posisi kawan atau lawan kaum Reformasi? Itu sebenarnya terserah kepada

sikap Habibie sendiri dalam memperbaiki dirinya. Dia bisa menjadi lawan politik kaum pejuang reformasi, dan bisa pula berubah menjadi kawan. Dan kita berharap, intelektual Muslim tingkat tinggi ini bisa menjadi kawan yang baik, dan semoga dia kelak mengakhiri karier politiknya dengan akhir yang indah! Amien! Yaitu setelah dia berhasil menghadapkan Soeharto ke Pengadilan sebagai terdakwa. Rakyat menunggu Presiden yang bisa mengadili Soeharto!

4. Mereka Yang Telah Menyeberang

Dalam aksara Jawa ada yang disebut "tanda Pangku" yang berfungsi mematikan huruf terakhir dari suatu kalimat. Jadi tugasnya mematikan! Bagi orang Jawa pengertian ini diperluas menjadi semacam filsafat atau psikologi dalam kehidupan. Dari itu pada umumnya orang Jawa kalau sudah dipangku atau kena pangku (berhutang budi) ia akan "mati"; mati semangat juangnya, dan menurut saja kemauan pihak yang memangkunya.

Beberapa waktu yang lalu seorang kenalan Penulis, seorang profesor, bila dia bicara sering mengecam Pancasila yang dikatakannya mengandung syirik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kebetulan yang tampil menjadi Menteri Agama juga kenalan Penulis. Dia memangku sang Profesor. Caranya dengan memperingati Hari Ulang Tahun sang Profesor. Maka diadakanlah Ulang Tahun ke-70 beliau itu di Masjid Istiqlal dan mendapat kunjungan cukup ramai atas biaya Departemen Agama. Efeknya cukup ampuh, sang Profesor jadi "mati" tidak berkutik lagi, dan tidak pernah lagi mengeritik Pancasila. Ya, sang Profesor sudah kena pangku (berutang budi). Ya, beliau telah diam, tidak berbunyi lagi.

Kawan Penulis yang lain, seorang Sarjana juga. Dia juga kena pangku dengan cara membawanya jalan-jalan ke luar negeri, ke Maroko, padahal di sana tidak ada konferensi Internasional. Tampaknya sekedar untuk merangkul belaka. Kawan ini dulu termasuk kelompok oposisi, anggota Petisi 50, bahkan termasuk pimpinan hariannya. Dan yang menjadi Menteri Aga-

ma waktu itu seorang Dokter ahli Jiwa (Psikiater) yang telah lama tinggal di Jawa.

Ringkas kata kawan kita sepulang dari Rabat ibu kota Maroko, dia jadi "Robot" dan menyeberang ke Istana dan main-main mata dengan pihak Istana, dan dialah mungkin orang pimpinan teras Petisi 50 satu-satunya yang menyeberang ke pihak lawan politiknya.

Pada tahun 1997 di Jakarta terbit sebuah buku "ajaib" dengan judul *"Di Sekitar Lahirnya Republik"*. Orang membayangkan buku ini hebat sekali, ternyata cuma hebat dalam nama belaka. Barangsiapa mengerti sejarah lahirnya Republik Indonesia tentu akan terbayang bagaimana hebatnya perdebatan Bapak-bapak Pendiri Republik Indonesia dalam Sidang-sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Tetapi setelah membaca buku ini orang akan kecewa besar, karena sepatah kata pun tidak ada menyebut-nyebut tentang BPUPKI. Yang ada sering disebut dalam buku itu adalah sejarah lahirnya GPII, organisasi pemuda Islam pada awal revolusi, di mana sang Penulis sebagai Pengurusnya. Mestinya buku itu berjudul "Lahirnya GPII" karena cerita mengenai GPII-lah yang dominan dalam buku itu. Bukan dengan judul seperti di atas. Ya, tak ada keistimewaannya buku itu; walaupun Penulis sendiri mantan anggota Pucuk Pimpinan GPII pada tahun 1950-an, namun harus menilainya dengan jujur. Dan memang ada kejutannya buku itu yang tidak terduga, ialah bahwa buku itu kata sambutannya diberikan oleh Presiden Soeharto sendiri. Kok aneh, buku yang kurang bermutu tetapi disambut oleh Presiden! Tetapi lagi-lagi itu bukti "tanda pangku" yang menyebabkan pengarangnya menjadi Soehartois tak terelakkan lagi.

Di kala para mahasiswa berdemonstrasi di seluruh Indonesia berteriak-teriak turunkan Soeharto, dan menuntut adanya Reformasi total, maka kawan kita itu tampil di TVRI dengan sikap yang tidak masuk akal: "Yang akan memimpin reformasi adalah Pak Harto!" Padahal Soehartolah yang akan direformasi,

tiga hari lagi akan lengser. Semua orang geleng-geleng kepala, dan protes datang dari mana-mana ke kantor kawan kita itu. Itu namanya menyeberang tanpa perhitungan politik, dan tanpa membaca dan menghayati perkembangan peta dan situasi politik yang sedang berjalan cepat. Apakah dia lupa berkaca pada diri sendiri? Padahal usia telah lanjut, sepuh, dan tak lama lagi dunia ini akan ditinggalkan; buat apa lagi mendekati pusat kekuasaan sebagai Soehartois? Ya, buat apa menumpang perahu yang telah bocor yang sebentar lagi akan tenggelam? Semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan mereka!

Ada lagi yang lebih menyedihkan. Beberapa orang pejuang yang sudah mendekam dalam penjara bertahun-tahun lamanya di waktu Soeharto berkuasa, malah seribu aneh, sekeluar dari penjara mereka menyeberang kepada Soeharto, justru setelah Soeharto lengser; mereka malah menyatakan tidak senang kalau orang menghujat Soeharto. Ya, mereka telah kena pangku, dan kemudian menyeberang ke pihak lawan. Sebelum masuk penjara, mereka beroposisi, setelah keluar penjara mereka berkapitulasi. Kasihan! Di mana letak keindahan iman, taqwa dan istiqamah itu?

Namun demikian filsafat dan psikologi "tanda pangku" di atas tidak hanya berlaku bagi orang Jawa; yang bukan Jawa pun bisa juga kena pangku seperti halnya pejuang-pejuang yang berbalik arah setelah keluar dari penjara itu. Dan tidak semua orang Jawa bisa luluh kena pangku, tentu ada sedikit pengecualian, di antaranya Dr. Sri Bintang Pamungkas. Walaupun telah dipangku oleh PPP dengan memberinya kursi DPR (kemudian direcall), tetapi dia tidak terpengaruh hal itu. Dia tetap beroposisi baik sebelum masuk maupun setelah keluar dari penjara. Itulah tanda kader yang terlatih, dan jiwanya telah digembleng oleh imannya yang mantap. Simaklah dia berkata selagi Soeharto masih duduk di atas kursi kekuasaannya: "Soeharto adalah musuh politik saya", seperti ditulisnya dalam sebuah selebaran yang disebarkannya. Itulah sikap pejuang yang jantan! Bukan seperti tokoh-tokoh PPP yang berpuluh-puluh tahun menjadikan dirinya Soehartois.

Ya, kalau Anda ingin jadi pimpinan atau Ulama teladan, buatlah jarak dengan penguasa, jangan zig-zag dan oportunis, istiqamah (konsisten)-lah dalam pendirian membela kebenaran, setialah kepada asas dan prinsip, dan jangan lupa mewaspadai "tanda pangku" yang mematikan semangat juang. Membuat jarak dengan pemerintah itu perlu, agar kita mempunyai ruang gerak untuk menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Sering Islam dan Penguasa itu bersimpang jalan!

5. Partai-partai Politik

Demokrasi cara Barat seperti kini adalah tidak sesuai dengan Islam. Demokrasi Barat menghitung banyaknya kepala. Tetapi demokrasi Islam menghitung kebenaran isinya kepala. Kini Indonesia punya lebih dari seratus partai yang kesemuanya merupakan firkah-firkah yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Banyak partai politik itu malah akan membingungkan umat, dan susah menentukan mana lawan dan mana kawan yang sebenarnya. Cara seperti ini bukan Islami. Beberapa buah partai itu didirikan oleh Soehartois, pendukung Soeharto, termasuk sebuah Partai Islam tertentu.

Yang ideal, di Indonesia cukup memiliki dua buah partai politik, yaitu Partai Islam dan yang satu lagi Partai Pancasila. Di negara-negara besar yang matang demokrasinya seperti Amerika dan Inggris cuma ada dua buah partai politik. Dengan itu orang mudah menentukan pilihannya dan mudah pula menentukan lawan dan kawan.

Bagi mereka yang tidak setuju ideologi Islam walaupun ia orang Islam silakan masuk partai Pancasila, dan mereka yang bercita-cita untuk kajayaan Islam dan kaum Muslimin, mari masuk Partai Islam. Dengan demikian dapat diketahui mana orang beriman sejati dan mana pula orang yang munafik musuh Allah dan Rasul. Apakah itu mustahil? Itu tergantung kesadaran seseorang bahwa Islam dan Politik itu tidak bisa dipisahkan. Kita bukan seperti kaum Nasrani yang memisahkan antara Gereja dan Negara. Bagi Islam, Negara dan Masjid jadi satu, sama-sama sarana untuk menegakkan Kalimat Allah Yang Agung.

Kalau para pemuda Angkatan tahun 1928 bisa berikrar: Satu bangsa, bangsa Indonesia, satu tanah air, tanah air Indonesia, dan satu bahasa, bahasa Indonesia, mengapa kita Umat Islam tidak bisa berikrar: Satu Agama, Agama Islam, Satu Kiblat, Masjidil Haram, dan Satu Partai, Partai Islam? Di mana letak iman dan takwa kita?

Islam tidak pernah mengenal kebenaran berganda atau Pluralisme. Paham ini dibawa ke Indonesia terutama oleh para mahasiswa yang belajar di negara sekuler Amerika Serikat. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan: "Islam Yes, partai Islam no!" Kalau partai Islam no, maka mafhum mukhalafahnya, partai kafir yes! *Na'udzubillah*!

Bila kita merenungkan Al-Qur'an dengan agak mendalam, maka jelas menurut Al-Qur'an, bahwa kebenaran itu hanya satu, tidak berganda. Ambillah contoh, lafal *"An-Nur"*, dalam Al-Qur'an hanya ada bentuk *mufrad*, tunggal, tidak pernah ada dalam bentuk *jamak (Anwaar)*. Jadi cahaya kebenaran Islam itu hanya satu, karena Allah juga satu, tunggal. Beda dengan *Zhulumaat* selalu dalam bentuk *jamak*; tidak ada kata *zhalam* atau *zhulmat* dalam bentuk *Mufrad*. Karena selain dari kebenaran Islam, adalah kegelapan-kegelapan belaka, ya banyak yang gelap. Ideologi Sosialisme, Komunisme, Kapitalisme, Nasionalisme, Pluralisme dan Pancasilaisme, semuanya adalah kegelapan belaka, karena mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak benar menurut Islam; ya, ajaran sesat!

Para pemimpin yang mengajarkan ajaran sesat itulah yang kemudian di akhirat bertengkar dengan para pengikutnya di hadapan Allah di pintu neraka, saling tuding sebelum dilemparkan ke dalam neraka sebagai pembalasan terhadap dosa-dosa yang telah mereka lakukan.

Silakan simak ayat ini yang artinya berbunyi: "*Masuklah kalian ke neraka bersama pemimpin kamu yang terdahulu, jin maupun manusia. Setiap masuk suatu umat dia mengutuk pemimpinnya yang telah menyesatkannya. Ya, Tuhan kami,*

mereka itulah pemimpin yang telah menyesatkan kami, dari itu berilah mereka azab yang berlipat ganda. Allah menjawab, 'Masing-masing kalian (Pemimpin maupun umat yang disesatkannya) akan beroleh azab yang berganda, tetapi kalian tidak mengetahuinya'." (QS. Al-A'raf: 38).

Ayat ini haruslah menjadi peringatan keras bagi kita semua bahwa sebelum menyesal dan saling menuding di akhirat nanti di pintu neraka, maka baiklah umat ini diajak ke jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, yaitu Umat Islam harus bergabung kompak dalam hanya satu Jama'ah atau Partai politik Islam di negara Indonesia ini. Karena selama masih banyak partai Islam, itu namanya masih berfirqah-firqah yang dilarang Allah dalam surat Ali Imran ayat 103.

Ketika Islam kini dihinggapi polusi banyak partai politik di Indonesia, maka baiklah simak dialog Nabi kita dengan shahabat beliau yang terkenal, Huzaifah bin Al-Yaman. Karena banyaknya propaganda yang mengajak umat ke jalan yang menyimpang dari Sunnah Nabi, yang oleh Rasulullah dinamakan para da'i yang menyeru orang ke pintu neraka, maka Huzaifah bertanya kepada Nabi; "Apa yang akan engkau perintahkan kepada saya bila saya menemui hal itu?"

(Bandingkanlah ini dengan para da'i tertentu masa kini! Dulu mereka *Ghurabak* (orang asing) yang setia kepada prinsip dan asas dakwah. Tetapi kini mereka tinggal *Gerobak* yang isinya abu gosok, botol-botol, dan kaleng-kaleng kosong; tak bermutu, karena telah turut dihanyutkan arus SIKON, tidak konsisten lagi menyuarakan amar makruf dan nahi munkar. Dan bahkan di antara mereka ada yang memburu materi dengan mendakwahkan *Mie*, bukan akidah dan ideologi Islam!).

Rasulullah menjawab, "Engkau harus bergabung dengan Jama'ah Muslimin (Satu Partai Islam) dan imam mereka!"

Huzaifah bertanya lagi, "Apabila tidak ada Jama'ah dan tidak pula ada imam?" (Maksudnya tidak ada satu Partai Islam saja, Pen.).

Maka Nabi menjawab, "Tinggalkan firqah-firqah itu semuanya sampai engkau wafat, sekalipun engkau akan memakan akar kayu (singkong)!"

Hadits shahih ini diriwayatkan oleh tokoh-tokoh Ulama Hadits terkemuka: Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim dan Ahmad. Dan Nabi sendiri memberi contoh bagaimana cara menggalang kekuatan Umat Islam dalam kesatuan yang kuat terpadu, sehingga di zaman Nabi dan shahabat terwujudlah suatu Jama'ah umat Islam yang kuat, sehingga di tanah Arab waktu itu tidak ada suatu kekuatan yang bisa menandingi Islam. Ya, di zaman Nabi dan shahabat tidak ada sekte-sekte. Dan kemudian, Umat Islam yang bersatu kuat bagaikan baja itulah yang dapat mengalahkan dua buah Imperium raksasa dunia, Persia dan Romawi di zaman Khalifah Umar bin Khaththab.

Islam di Indonesia kini barulah terbatas kepada Islam teori dan ritual di masjid-masjid dan langgar-langgar belaka. Belum mengideologi yang memperjuangkan cita-cita atau ide besar yang harus dicapai dalam masyarakat dan negara. Islam yang mengideologi adalah Islam yang dinamis dan senantiasa berjuang menuju sasaran yang telah dirancang dengan tepat dan cermat. Karena di Indonesia Islam belum mengideologi dan dinamis, tetapi statis dan beku, maka Negara Indonesia dikuasai oleh kaum yang berideologi sekuler lagi anti Islam.

Dari itu timbul pertanyaan: Kapankah lagi waktunya Umat Islam Indonesia akan menjalankan perintah Al-Qur'an, Ali Imran ayat 103, dan Hadits Huzaifah yang memerintahkan terbentuknya suatu Jama'ah yang kuat dan bersatu kompak itu? Tanpa adanya satu Jama'ah atau adanya hanya satu Partai politik Islam bagi Indonesia, maka Umat Islam akan selalu terpecah-pecah, mudah dikuasai, dipermainkan, mudah diinfiltrasi, dan tidak akan pernah menang! Karena Allah hanya akan memenangkan mereka yang berjihad untuk memenangkan Islam (Al-Haj: 40). Kita Khawatir bahwa tokoh-tokoh dan pemimpin partai-partai yang banyak itu, akan dituding pengikut-pengikutnya di pintu neraka kelak dengan kata-kata: *"Haulai Adhalluuna."*

Wahai Tuhan kami, mereka itulah semuanya orang yang menyesatkan kami. (QS. Al-A'raf: 38). *Na'udzubillah*!

Perpecahan ini mungkin telah direkayasa dengan rapi oleh lobi Yahudi yang memainkan peranannya di Indonesia, yaitu untuk melemahkan dan menghancurkan Islam!

Kongres Umat Islam Indonesia yang diadakan oleh MUI pada awal November 1998 yang lalu gagal mencapai sasarannya untuk menyatukan kaum Muslimin dalam satu barisan yang bersatu; dan mengundang protes, karena yang diundang hanya Parpol dan Ormas yang berdasarkan Pancasila saja. Sedang Parpol yang berdasar Islam satu pun tidak ada yang diundang. Lebih tepat Kongres itu disebut Kongres Umat Pancasila. Tetapi alangkah bahagianya Umat Islam Indonesia, bila Kongres itu berhasil mewujudkan IKRAR atau sumpah Juang Umat Islam dengan semboyan: Satu Agama, Agama Islam, Satu Kiblat, Masjidil Haram (Ka'bah), dan Satu Partai, Partai Islam. Dan untuk mencapai cita-cita yang mulia itu, kini harapan tertuju dan tertumpah kepada Generasi Penerus dan Pelurus yang masih suci dan bersih dari virus-virus penyakit Orde Lama dan Orde Baru yang anti Islam. Sekali lagi, hanya Satu Partai Islam di Indonesia! Agar terang mana lawan dan mana kawan.

Dan itu semua adalah demi kesadaran, kejayaan Islam dan kaum Muslimin. Allah berfirman, *"Bawalah kaummu ke luar dari suasana gelap gulita kepada nur cahaya yang terang benderang!"* (QS. Ibrahim: 5). Dengan itu kita memasuki Indonesia Baru yang penuh harapan!

Selama Pancasila dan UUD 45 menjadi nomor satu dalam negara RI; Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah jadi nomor dua, itu berarti semangat jihad kita kaum Muslimin belumlah optimal. Dan itu adalah hal yang cukup memalukan dalam suatu negara yang penduduknya hampir 90% yang memeluk agama Islam. Ini adalah dosa! Itu suatu bukti bahwa Iman dan kesadaran kita terlalu lemah dan melempem! Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya kelak di akhirat di hadapan Allah SWT? Padahal Nabi kita telah menegaskan bahwa Islam adalah nilai

tertinggi yang tidak ada yang mengunggulinya! (*Al-Islamu ya'lu wala yu'la 'alaihi*).

Dan kalau ada di antara para pembaca yang budiman menanyakan tentang cita-cita Pengarang Anda, maka dengan segala ketulusan dan kerendahan hati saya jawab, "Hidup bahagia dalam sebuah negara Islam, di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan kemudian mati tersenyum dalam negara Islam pula dengan Husnul Khatimah, akhir yang indah!"

Billahi Fi Sabielil Haq! Renungkanlah!

Kepustakaan

Tafsir Ibnu Katsir, Ismail Ibnu Katsir.

Tafsir Al-Manar, Syekh Muhd. Abduh/Rashid Ridha.

Tafsir Al-Jamal, Sulaiman bin Umar As-Syafi'i.

Nailul Maram min tafsiri Ayaatil Al-Ahkam, Muhammad Shiddiq Hasan Khan.

Mohammad Hatta, Memoar, Tintamas, 1979.

Moh. Hatta, Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, Tintamas, Jakarta 1969.

Bung Hatta 70 tahun, Panitia Ulang Tahun Bung Hatta, Jakarta, 1972.

Adam Malik, Riwayat Proklamasi 17 Agustus 1945, Wijaya, Jakarta 1950.

Adi Negoro, Ensiklopedi Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta 1954.

Dr. A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 4, Gunung Agung 1984.

Pinardi, Kartosuwiryo, Aryaguna, Jakarta 1964.

Prof. Dr. Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Pancuran Tujuh Jakarta 1975.

Prof. Muh. Yamin S.H., Proklamasi dan Konstitusi, Jambatan, Jakarta 1952.

Prof. Dr. Hazairin S.H., Demokrasi Pancasila, Tintamas, Jakarta 1970.

Notosoetarjo, Kembali Kepada Jiwa Proklamasi 1945, Harian Pemuda, 1959.

Dokumen Rapat Panitia Perancang Undang-undang Dasar 1945.

Majalah TEMPO, 19 Agustus, Jakarta 1989.

Adam Malik, Mengabdi Republik, Gunung Agung, Jakarta 1978.

Mohammad Hatta, Himpunan Karangan, Balai Buku Indonesia, Jakarta 1953.

Nugroho Notosusanto dan kawan-kawan, Sejarah Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1975.

Prof. Dr. R.M. Sutjipto Wiryosuparto, Sejarah Dunia, Indira, Jakarta.

Prof. Dr. Slametmuljana, Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa, Balai Pustaka, 1968.

DMG. Koch, Menuju Kemerdekaan, Yayasan Pembangunan, Jakarta, 1951

Sanusi Pane, Sejarah Indonesia I, Balai Pustaka, Jakarta 1965.

Mr. A.K. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Pustaka Rakyat, Jakarta, 1964.

Muhammad Yusuf Al-Kandahlawy, Hayatus Shahabat, Darun Nashri, Cairo, 1969.

Solichin Salam, K.H. Ahmad Dahlan, Jayamurni, Jakarta, 1963.

Panji Masyarakat, No. 355, 1 April 1982.

Harmonis, No. 267, 1983.

Harmonis, No. 410, Oktober 1989.

Panji Masyarakat, 11 November 1990.

Al-Muslimun, No. 258, September 1991.

Panji Masyarakat, No. 698, 11 Oktober 1991.

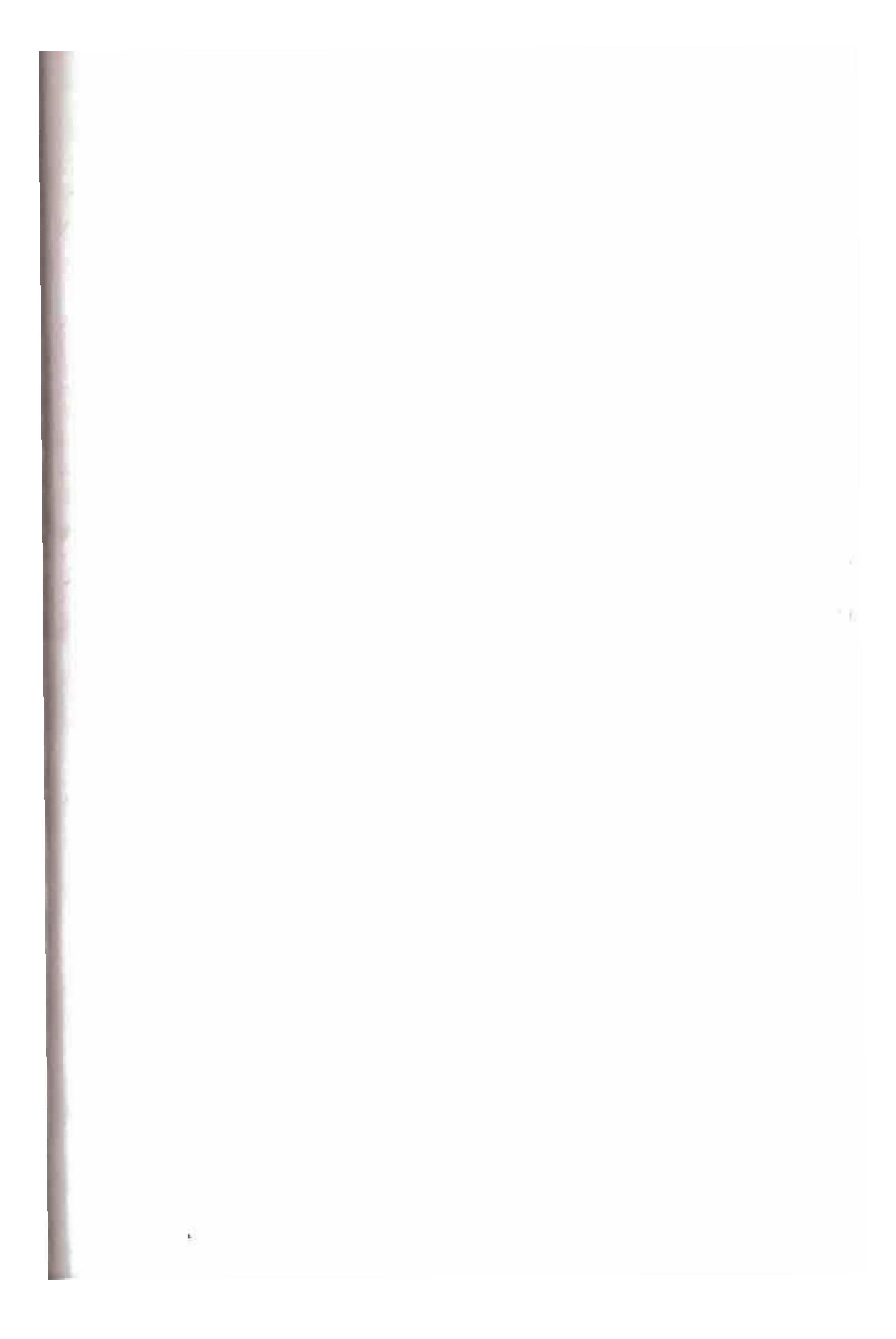
Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, 1996.

Mr. Ahmad Subardjo, Lahirnya Republik Indonesia, P.T. Kinta, Jakarta, 1972.

Mr. Mhd. Yamin, Sapta Dharma, Islamiyah, Medan, 1950.

David Jenkins, Suharto and His Generals, Cornell University, New York, 1984.

Hamka, Perkembangan Kebatinan di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta, 1971.







Pengarang Anda dilahirkan pada tanggal 20 Agustus 1924 di Maninjau Sumatera Barat. Sejak mudanya ia telah menjadi orang pergerakan disamping meneruskan kuliahnya pada berbagai Perguruan Tinggi.

Sebagai orang pergerakan ia duduk dalam pimpinan organisasi Islam seperti PII, GPII, BKMI (Badan Kongres Muslimin Indonesia), Sekjen Front Anti Komunis (FAK); dan pada Kongres Nasional PSII (Majlis Tahkim) Majalaya, Bandung, tahun 1972, terpilih sebagai Wakil Presiden PSII. Di bidang keulamaan, duduk dalam Majelis Ulama Persatuan Islam dan terakhir sebagai Ketua Majelis Syar'i Syarikat Islam.

Selaku seorang Pengarang, ia banyak menulis di berbagai surat kabar dan Majalah; menulis berbagai buku bermutu dan menerjemahkan buku-buku karangan Pengarang-pengarang kaliber dunia seperti *Risalah Tauhid* (Muhammad Abduh), *Pedoman Islam Bernegara* (Ibnu Taimiyah) dan *Islam dan Perundang-undangan* (Abdul Kadir Audah).

Di antara buku-buku karangannya terdapat "Laporan Dari Belakang Tirai Bambu" yang diterjemahkan di Hongkong dan Taiwan ke dalam bahasa-bahasa Inggris dan Mandarin (Cina); *Jalan ke Surga; Detik-detik Terakhir Kehidupan Rasulullah; Kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdil Aziz; Dari Penjara ke Meja Hijau*, dan lain-lain.

Pada tahun 1957 Himpunan Pengarang Islam mengadakan angket umum melalui Pers untuk memilih sepuluh orang *Pengarang Islam Terkemuka* dewasa ini. Sebagai hasilnya muncullah 10 orang Pengarang terkemuka yang tulisan-tulisannya digemari umat Islam Indonesia. Di antaranya terdapat nama Pengarang Anda Sendiri. Dalam nomor urut adalah seperti di bawah ini : 1. HAMKA, Jakarta, 2. K.H.M. Isa Anshary, Bandung, 3. M. Natsir, Jakarta, 4. H. Tamar Jaya, Jakarta, 5. K.H. Munawwar Khalil, Semarang, 6. Z.A. Ahmad, Jakarta, 7. Hasbi Ash-Shiddieqy, Yogyakarta, 8. A. Hassan, Bangil, 9. H. Firdaus A.N., Jakarta, 10. H.Z. Arifin Abbas, Medan. Demikian *the best Ten* itu.

Beberapa kali Pengarang Anda berkunjung ke luar negeri. Antara lain, Saudi Arabia, Irak, Kuwait, Hongkong, RRC, Taiwan, Jepang, Filipina, Pakistan, Saigon, dan Bangkok. Kedua kota terakhir ini sebagai Ketua Delegasi Indonesia dalam Komperensi Liga Anti Komunis Asia (APACAL) pada tahun 1957 dan 1958.

Dalam *Dosa-dosa Politik Orde Lama dan Orde Baru Yang Tidak Boleh Berulang Lagi di Era Reformasi* ini terdapat koreksi total dan menyeluruh atas kesalahan beleid politik yang tak efektif dari para tokoh pendahulu kita, baik oleh rezim Orde Lama maupun Orde Baru termasuk pula oleh tokoh-tokoh Islam sendiri sehingga kaum Muslimin tidak berperan dalam mengambil keputusan-keputusan negara yang penting-penting. Dan itu menjadi pelajaran bagi generasi penerus dan pelurus untuk tidak diulangi kembali di masa reformasi ini. Semua tulisan di dalamnya berisi pesan-pesan patriotik yang bernafaskan Islam yang Insya Allah berguna bagi para pembaca, terutama angkatan baru sebagai generasi penerus dan pelurus yang berjuang menegakkan bendera keadilan dan kebenaran Islam dalam masyarakat dan negara.

ISBN : 979-592-115-0